



UNIVERSITAS INDONESIA

**STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN
BINTAN BERDASARKAN MODEL SIKLUS HIDUP
KAWASAN WISATA (*TOURISM AREA LIFE CYCLE*)**

TESIS

**RUTH NINA M KEDANG
1406657872**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
SEPTEMBER 2016**



UNIVERSITAS INDONESIA

**STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN
BINTAN BERDASARKAN MODEL SIKLUS HIDUP
KAWASAN WISATA (*TOURISM AREA LIFE CYCLE*)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi**

RUTH NINA M KEDANG

1406657872

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
JAKARTA
SEPTEMBER 2016**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 30 September 2016


Ruth Nina M Kedang

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ruth Nina M Kedang

NPM : 1406657872

Tanda tangan :



Tanggal : 30 September 2016

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Ruth Nina M Kedang

NPM : 1406657872

Program Studi : Magister Kebijakan Publik

Judul Tesis : Strategi Pengembangan Pariwisata
Kabupaten Bintan berdasarkan Model
Siklus Hidup Kawasan Wisata (*Tourism
Area Life Cycle*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Pembimbing : Dr. Nining I. Soesilo

Ketua Penguji : Dr. Telisa Aulia Falianty

Penguji : Lydia Napitupulu, Msc.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat Tuhan YME penulis dapat menyelesaikan tesis ini pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi MPKP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akan sulit untuk dapat menyelesaikan tulisan ini, karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Suamiku tercinta, Rio Siagian. Atas masukan, motivasi dan dukungan untuk senantiasa mengejar ilmu dan memilih yang terbaik.
2. Ibu Dr. Nining I Susilo, atas bimbingannya dan masukannya selama penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. Indradjati Sidi atas dorongannya untuk selalu *academically fresh and update*.
4. Ibu SB Yanti Sukamdani, CHA anggota DPR RI dan ketua DPP PDIP bidang *Tourism*, atas ide *economic tourism*-nya.
5. Deni Khanafiah atas masukan dan diskusi selama penyusunan tesis ini: *best mentor ever!*
6. Nurcholis, SE, MSi: atas serangkaian diskusi kita: mengapa dan bagaimana.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan berbagai pihak yang telah membantu saya dalam menyusun Tesis ini. Akhir kata, tesis ini tentunya belum sempurna, namun kiranya dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. Segala kesalahan yang terjadi dalam penulisan tentunya ada di penulis.

Jakarta, September 2016

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruth Nina M Kedang
NPM : 1406657872
Program Studi : Magister Kebijakan Publik
Departemen : Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul:

Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bintan berdasarkan Model Siklus Hidup Kawasan Wisata (*Tourism Area Life Cycle*)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas karya akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 September 2016

Yang menyatakan



(Ruth Nina M Kedang)

ABSTRAK

Nama : Ruth Nina M Kendang
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bintan berdasarkan Model Siklus Hidup Kawasan Wisata (*Tourism Area Life Cycle*)

Kabupaten Bintan merupakan destinasi wisata yang potensial dan tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini. Penelitian ini mengkaji tahapan perkembangan pariwisata Kabupaten Bintan berdasarkan Model Siklus Hidup kawasan Wisata. Identifikasi tahapan perkembangan dilakukan dengan melihat perubahan yang terjadi pada berbagai kriteria, yaitu karakteristik destinasi, pemasaran, dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari hasil identifikasi didapati bahwa kawasan pariwisata Kabupaten Bintan berada pada tahapan *development*. Permasalahan pada setiap kriteria tahapan siklus hidup kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan prioritas strategi pengembangan kawasan wisata Kabupaten Bintan. Model AHP dikembangkan sebagai sistem pendukung penyusunan strategi pengembangan pariwisata Kab. Bintan, dimana prioritas strategi ditentukan dari penilaian berbagai ahli yang terkait dalam pengembangan pariwisata Kab. Bintan. Dari hasil analisis menggunakan AHP didapati bahwa kriteria ekonomi dan sosial merupakan aspek yang lebih diprioritaskan dalam upaya pengembangan kawasan wisata Kabupaten Bintan. Sementara, strategi pengembangan kawasan wisata, yaitu peningkatan keamanan, peningkatan kualitas pelayanan, dan penyusunan tata ruang yang baik, mempunyai prioritas lebih tinggi untuk meningkatkan pengembangan kawasan wisata Kabupaten Bintan ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan *consolidation*.

Kata Kunci: Siklus hidup kawasan wisata, strategi pengembangan, *analytic hierarchy process*

ABSTRACT

Name : Ruth Nina M Kendang
Study Program : Magister of Planning and Public Policy
Title : Bintan District Tourism Development Strategy based on the Tourism Area Life Cycle Model

Bintan regency is regarded as a potential tourist destination, where the tourism sector has developed quite rapidly in recent years. This study examines the stages of development of tourism in Bintan regency based upon Butler's tourism area life cycle model. Identification of stage was performed by identifying the characteristics of various criteria that is destination characteristics, marketing response, economic impacts, social impact and environmental impact. The stage identification result has shown that Bintan district is in the development phase. By using this result, we then develop a strategy for developing Bintan regency to the next stage in TALC model. AHP model was developed as decision support system to determine the priority of strategy based upon the assessment of experts involved in the tourism development of Bintan district. From the analysis we have found that the economic and social criteria have a higher priority in the development of the tourist area of Bintan regency. Meanwhile, security and safety improvement, as well as quality of service improvement has a higher priority, and also regarded as most important strategied to develop the tourist area of Bintan regency to the next stage, that is consolidation stage.

Keywords: tourism area life cycle, development strategy, analytic hierarchy process.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Penelitian.....	6
1.6 Keterbatasan Penelitian.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
2 TINJAUAN LITERATUR	10
2.1 Model Siklus Hidup Kawasan Pariwisata.....	10
2.1.1 Prediksi Siklus Hidup Kawasan Wisata.....	14
2.2 Analisis Akar Permasalahan.....	16
2.3 Analytical Hierarchy Process (AHP).....	17
3 METODOLOGI	21
3.1 Kerangka Kerja Penelitian.....	21
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	23

3.1.1	Data Primer.....	23
3.1.2	Data Sekunder.....	23
3.2	Teknik Pengumpulan data.....	23
3.3	Metode Analisis Data.....	24
3.3.1	Analisa Deskriptif Potensi Pariwisata Kab. Bintan.....	24
3.3.2	Analisa Model Ekonometrika: Data Panel.....	30
3.3.3	Identifikasi Siklus Hidup Kawasan Pariwisata.....	32
3.3.4	Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata.....	35
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	38
4	PROFIL DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	39
4.1	Profil Kabupaten Bintan.....	39
4.2	Profil Pariwisata Kabupaten Bintan.....	40
4.2.1	Pariwisata Terpadu Lagoi.....	43
4.2.2	Destinasi Wisata Trikora.....	44
4.3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian.....	45
4.4	Pertumbuhan Sektor Pariwisata Kabupaten Bintan.....	46
4.5	Analisa <i>Location Quotien</i> (LQ) Sektor Pariwisata Kabupaten Bintan.....	49
4.6	Hasil Analisa <i>Shift-share</i> (SS) Sektor Pariwisata.....	53
4.6.1	Analisa <i>Shift-Share</i> Sektor Pariwisata Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau.....	53
4.6.2	Analisa <i>Shift-Share</i> Sektor Pariwisata Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Sumatera Utara.....	54
4.7	Hasil Analisa Regresi Sektor Pariwisata.....	57
4.7.1	Estimasi dari sisi penawaran.....	60
4.7.2	Estimasi dari sisi permintaan.....	63
5	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
5.1	Identifikasi Perkembangan Kawasan Pariwisata Kab. Bintan.....	66
5.1.1	Karakteristik Destinasi Pariwisata Kab. Bintan.....	67
5.1.2	Karakteristik Pemasaran Pariwisata Kab. Bintan dalam Model TALC.....	71
5.1.3	Karakteristik Ekonomi Kab. Bintan dalam Model TALC.....	73

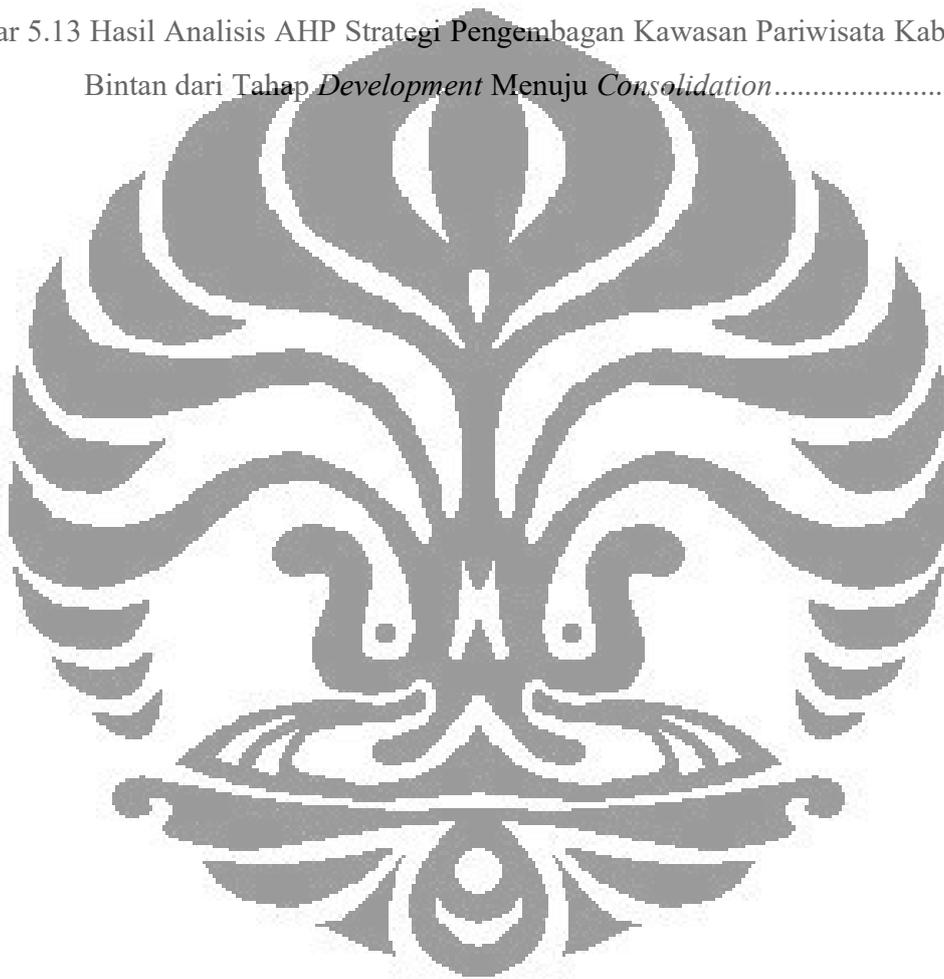
5.1.4	Karakteristik Sosial Kab. Bintan berdasarkan Model TALC.....	76
5.1.5	Karakteristik Lingkungan Hidup Kab. Bintan berdasarkan Model TALC.....	78
5.2	Model Ekonomi dalam Kerangka Siklus Hidup Kawasan Pariwisata.....	81
5.3	Analisis Pohon Masalah dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Kab. Bintan...	84
5.4	Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Kab. Bintan dari Tahap <i>Development</i> Menuju <i>Consolidation</i>	85
5.4.1	Faktor dan Pelaku dalam Pengembangan Pariwisata Kab. Bintan.....	87
5.4.2	Prioritas Strategi Pengembangan Pariwisata Kab. Bintan.....	91
6	KESIMPULAN.....	95
6.1	Kesimpulan.....	95
6.2	Rekomendasi Kebijakan.....	97
6.3	Saran Penelitian.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Siklus Hidup Butler (Butler, 1980).....	10
Gambar 2.2 Aplikasi Model AHP.....	17
Gambar 2.3. Bentuk dan Standar Dekomposisi Hirarki.....	18
Gambar 3.1. Kerangka Kerja Penelitian.....	22
Gambar 3.2. Prediksi Siklus Hidup Kawasan Wisata (Tourism Area Life Cycle/TALC)	34
Gambar 3.3. Penyusunan Hirarki AHP Berdasarkan Siklus Hidup Kawasan Pariwisata (TALC).....	37
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Bintan.....	39
Gambar 4.2 Jumlah Kunjungan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014.....	43
Gambar 4.3 Aktivitas Wisatawan di Area Objek Wisata Lagoi Bay.....	44
Gambar 4.4 Akses Utama Pariwisata Bintan Terhadap Wisatawan Mancanegara dan Nusantara.....	44
Gambar 4.5 Kondisi Pantai Trikora Kabupaten Bintan.....	45
Gambar 4.6 Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Pariwisata di Beberapa Wilayah Tahun 2011-2014.....	50
Gambar 5.1. Tren Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kab. Bintan tahun 1999-2015.....	67
Gambar 5.2 Jumlah penduduk lokal dan wisatawan yang berkunjung ke Kab. Bintan dari tahun 2010 hingga 2014.....	68
Gambar 5.3 Tren peningkatan akomodasi dan lama menginap wisatawan.....	69
Gambar 5.4. Daerah Asal Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan tahun 2013 dan 2014.....	70
Gambar 5.5. Grafik Tingkat Upah Minimum regional (UMR) Kab. Bintan Tahun 2004- 2014.....	73
Gambar 5.6 Proporsi Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bintan pada berbagai sektor tahun 2014.....	74
Gambar 5.7 Pertumbuhan Ekspor dan Impor Kab. Bintan tahun 2010-2014.....	75
Gambar 5.8 Peningkatan Penerimaan Kab. Bintan dari Pajak Daerah Tahun 2011-2014 (Hadli, 2016).....	75

Gambar 5.9 Peningkatan Laporan Kriminalitas Kab. Bintang tahun 2011-2014.....	77
Gambar 5.10 Jumlah Migrasi ke Kab. Bintang tahun 2012-2014.....	78
Gambar 5.11 Perbandingan Kurva S pada TALC dengan berbagai pola pada model ekonomi.....	82
Gambar 5.12 Diagram Akar Masalah dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Bintang dari Tahap <i>Development</i> Menuju <i>Consolidation</i>	86
Gambar 5.13 Hasil Analisis AHP Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Bintang dari Tahap <i>Development</i> Menuju <i>Consolidation</i>	94



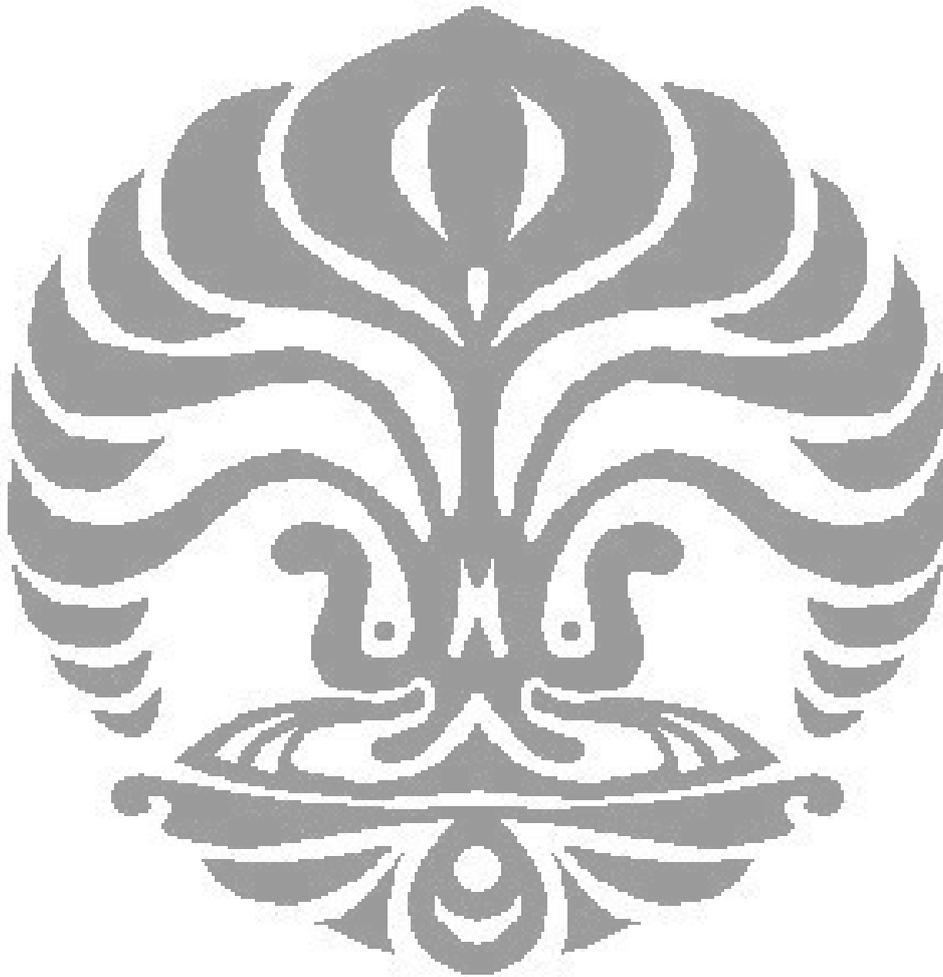
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kontribusi PDRB Pariwisata Bintang Terhadap PDP Nasional.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Bintang Tahun 2012 – 2014.....	3
Tabel 2.1. Komponen-komponen dalam setiap tahapan pada Model Buttlar.....	13
Tabel 2.2. Skala AHP untuk Perbandingan.....	20
Tabel 3.1 Kriteria, faktor, sumber data dan dasar perhitungan dalam model prediksi Tahapan siklus hidup kawasan pariwisata Kab. Bintang.....	33
Tabel 3.2 Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan.....	38
Tabel 4.1 Akomodasi Hotel di Kabupaten Bintang sampai dengan tahun 2014.....	40
Tabel 4.2 Potensi Wisata di Kabupaten Bintang Sampai Tahun 2008.....	41
Tabel 4.3 Jenis dan Daya Tarik Objek Wisata di Kabupaten Bintang 2003-2007.....	42
Tabel 4.4 Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun 2010-2014 (Dalam Persen).....	47
Tabel 4.5 Pertumbuhan Sektor Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun 2011-2014 (Dalam Persen).....	48
Tabel 4.6 Analisa LQ Sektor Pariwisata Tahun 2010-2014 : Kabupaten Bintang dan Provinsi Kepulauan Riau.....	51
Tabel 4.7 Analisa LQ Sektor Pariwisata Tahun 2010-2014 untuk Provinsi Bali, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara).....	52
Tabel 4.8 Analisa <i>Shift-Share</i> Sektor Pariwisata Tahun 2010-2014 Kabupaten Bintang dan Provinsi Kepulauan Riau.....	55
Tabel 4.9 Analisa <i>Shift-Share</i> Sektor Pariwisata Tahun 2010-2014 Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Sumatera Utara.....	56
Tabel 4.10 Definisi variabel operasional pada analisis regresi.....	58
Tabel 4.11 Statistik deskriptif variabel operasional pada analisis regresi.....	59
Tabel 4.12 Hasil estimasi OLS, FEM dan REM dari sisi penawaran.....	60
Tabel 4.13 Hasil uji Hausman untuk FEM dan REM dari sisi penawaran.....	61
Tabel 4.14 Hasil estimasi OLS, FEM dan REM dari sisi permintaan.....	63

Tabel 4.15 Hasil uji Hausman untuk FEM dan REM dari sisi penawaran.....	64
Tabel 5.1. Karakteristik Destinasi Wisata Wisata Kab. Bintan.....	71
Tabel 5.2 Kriteria Pemasaran Pariwisata Kab. Bintan pada Model TALC.....	72
Tabel 5.3 Kriteria Ekonomi Kab. Bintan pada Model TALC.....	76
Tabel 5.4. Kriteria Sosial Kab. Bintan berdasarkan Model TALC.....	78
Tabel 5.5. Kriteria Lingkungan Kab. Bintan berdasarkan Model TALC.....	79
Tabel 5.6 Hasil Identifikasi Tahapan Siklus Hidup Kawasann Pariwisata Kab. Bintan berdasarkan Model TALC.....	80
Tabel 5.7 Pembobotan Kriteria pada Tahapan Siklus Hidup.....	87
Tabel 5.8 Pembobotan faktor-faktor dalam perkembangan kawasan pariwisata berdasarkan TALC.....	88
Tabel 5.9 Pembobotan faktor-faktor dalam perkembangan kawasan pariwisata berdasarkan TALC untuk setiap pelaku.....	89
Tabel 5.10 Prioritas strategi pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan berdasarkan pada model TALC.....	91
Tabel 5.11 Prioritas strategi pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan berdasarkan pada model TALC untuk berbagai pelaku.....	93
Tabel 6.1 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata Kab. Bintan....	98

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuisisioner AHP
- Lampiran 2 Profil Responden
- Lampiran 3 Estimasi Data Panel dengan Stata



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pariwisata telah menjadi salah satu industri yang berharga bagi banyak masyarakat dan negara di dunia serta menjadi salah satu sektor kunci dalam strategi pembangunan ekonomi. Kontribusi langsung dari sektor Pariwisata terhadap GDP Dunia pada tahun 2014 diperkirakan mencapai US\$ 2.364,8 miliar atau 3,1% dari total GDP Dunia. Kontribusi ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi US\$ 3.593,2 miliar atau 3,3% dari total GDP Dunia pada tahun 2025¹.

Sampai dengan September 2013, kontribusi Pariwisata Indonesia terhadap devisa nasional mencapai nilai USD 10.054,10 juta. Hal ini menjadikan sektor pariwisata berada pada urutan ke-4 penyumbang devisa terbesar setelah sektor Minyak & Gas Bumi (US\$ 23.874,00 juta), Batubara (US\$ 18.402,00 juta) dan Minyak Kelapa Sawit (US\$ 11.351,10 juta)². Melihat kondisi perekonomian dunia saat ini dimana terjadi penurunan harga yang signifikan pada komoditas minyak & gas bumi³, batubara dan minyak kelapa sawit, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih terhadap devisa nasional. Kondisi ini juga yang menjadikan pariwisata dianggap menjadi sektor strategis penggerak perekonomian nasional. Oleh karena itu, tak mengherankan jika sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diharapkan akan menjadi tumpuan perkembangan ekonomi masyarakat oleh pemerintahan Indonesia saat ini.

Menyadari pentingnya pariwisata bagi perekonomian Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan pengembangan pariwisata menjadi salah satu agenda strategis. Penempatan pengembangan sektor pariwisata menjadi agenda strategis saat ini merupakan hal yang wajar, tatkala kita melihat bahwa terjadi tren peningkatan capaian di bidang ekonomi dari tahun ke tahun melalui naiknya kontribusi dari sektor ini terhadap perekonomian (PDB) nasional. Pada tahun 2014, perkiraan capaian pariwisata di bidang ekonomi antara lain:

¹ World Travel & Tourism Council, 2014, Travel & Tourism Economic Impact 2015 - World.

² Biro Pusat Statistik, 2014, Statistik Indonesia 2013.

³ World Bank, The Global Outlook, June 2014.

kontribusi terhadap PDB sebesar 4,01%; devisa yang dihasilkan sebesar US\$ 11 miliar dan menyerap tenaga kerja sebesar 10,32 juta orang.

Indonesia sendiri memiliki banyak potensi pariwisata, baik alam maupun budaya, yang bisa dikembangkan untuk destinasi pariwisata. Salah satunya adalah daerah-daerah yang berada pada lintas batas antar negara. Daerah lintas batas (*cross border*) menjadi daerah yang berpotensi menjadi kawasan pariwisata karena dapat terintegrasi dengan kawasan pariwisata lainnya, khususnya dengan kawasan-kawasan pariwisata di negara tetangga. Kawasan lintas batas bisa menjadi alternatif destinasi wisata bagi wisatawan-wisatawan dari negara tetangga. Pada tahun 2014 saja, terdapat 59 juta wisatawan yang berkunjung ke Singapura, Malaysia dan Thailand dengan komposisi masing-masing sebesar 13 juta, 24 juta dan 22 juta wisatawan mancanegara. Angka 59 juta manusia merupakan sebuah peluang, setidaknya untuk mendatangkan paling sedikit 10% ke Indonesia melalui wilayah *cross border* Indonesia dengan tiga negara tersebut⁴.

Berdasarkan data Kementerian PPT tahun 2014, Indonesia memiliki 27 kabupaten perbatasan, dimana Kab. Bintan merupakan satu dari tiga kabupaten di Indonesia yang berbatasan langsung dengan dua negara sekaligus, yaitu Singapura dan Malaysia dimana dua negara tersebut merupakan pasar utama Pariwisata Indonesia. Secara domestik, Kabupaten Bintan memiliki kontribusi signifikan dalam menyumbang jumlah wisman ke Indonesia. Dengan slogan Kabupaten Bintan “Family Fun 365 Days A Year”, Kabupaten Bintan menyumbang 302.246 wisman pada tahun 2013, lalu 175.117 wisman pada semester I tahun 2015 (termasuk di dalamnya 7.500 wisatawan mancanegara pada 3 minggu pertama pasca dicanangkan kebijakan bebas visa bagi 90 negara pada Oktober 2015). Kabupaten Bintan juga dinilai mampu memberikan kontribusi target 1 juta wisman untuk mencapai target 10 juta wisman pada tahun 2015 (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Data Kontribusi PDRB Pariwisata Bintan Terhadap PDP Nasional

⁴ Berdasarkan simulasi singkat dan sederhana dilakukan oleh Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia, anggota DPR RI Komisi X sekaligus pemilik Sahid Group Hotel and Property Dra. Wiryanti Sukamdani, CHA.

Tahun	Kontribusi
2010	0.0918%
2011	0,0914%
2012	0,0943%
2013	0,0931%
2014	0,1047%

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2015, diolah

Apabila dilihat dari proporsi jumlah penduduk Kabupaten Bintan terhadap jumlah wisatawan mancanegara, wilayah ini menunjukkan prestasi yang monumental dimana jumlah wisatawan mancanegara lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Bintan itu sendiri (Tabel 1.2⁵).

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Bintan Tahun 2012 – 2014

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wisman	Komposisi
2012	159.116	387.548	2,4 kali
2013	160.331	489.000	3,04 kali
2014	151.123	302.246	2,15 kali

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2015, diolah

Daya tarik Kabupaten Bintan sendiri terletak pada keunikannya yang menawarkan wisata yang eksklusif tanpa gangguan dari luar atau kegiatan penduduk lokal serta ditambah dengan keindahan alam yang sangat menarik bagi wisatawan. Selain itu, keberadaan hotel yang bertaraf internasional, bandar udara dan terminal feri yang juga berstandar internasional telah hadir di pulau ini.

Namun tentu saja potensi ini tidak akan berkembang lebih baik lagi tanpa adanya strategi pengembangan yang tepat. Oleh karena itu, strategi pengembangan wisata menjadi salah satu isu yang penting untuk dikaji dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan. Strategi pengembangan

⁵ Sumber: BPS Kab Bintan 2015

sektor pariwisata di Kabupaten Bintan ini, terutama dalam perencanaan dan manajemen pariwisata akan memainkan peranan penting untuk menjaga sektor pariwisata di Kabupaten ini berkembang dan senantiasa kompetitif.

Pemahaman tentang lingkungan, masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan serta apa yang harus dilakukan untuk menyikapi kondisi suatu daerah pariwisata ke depan tentunya sangat perlu dilakukan dalam perencanaan dan manajemen pariwisata kawasan ini. Oleh karenanya penelitian ini akan mengkaji bagaimana kondisi pariwisata Kabupaten Bintan saat ini, khususnya tahapan perkembangan pariwisatanya, serta strategi apa yang sebaiknya diterapkan dengan berdasarkan pada kondisi yang ada dan tujuan pengembangan yang ingin dicapainya ke depan.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Bintan merupakan kabupaten yang terdiri atas pulau-pulau kecil yang berada di Kepulauan Riau. Letak strategisnya sebagai kawasan yang berada pada lintas batas menjadikan kabupaten tersebut berpotensi menjadi tujuan pariwisata bagi wisatawan yang juga berkunjung ke negara-negara yang berada di sekitarnya, yaitu Malaysia, Singapura dan Thailand. Namun sangat sedikit sekali penelitian yang mengkaji bagaimana perkembangan pariwisata Kabupaten Bintan.

Perkembangan pariwisata di kabupaten tersebut tentunya akan sangat menentukan bagaimana strategi pengembangan pariwisatanya ke depan. Di sisi lain, dalam menentukan strategi yang tepat, sebuah penyusunan strategi harus didasari oleh pemahaman akan kondisi saat ini dan tujuan yang ingin dicapai, serta langkah-langkah penting apa yang cukup efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan pengembangan dan keberlanjutan, maka perlu diketahui tahap yang sedang dialami oleh tiap destinasi wisata (*existing condition*), termasuk kawasan pariwisata Kabupaten Bintan.

Destinasi pariwisata sendiri pada dasarnya memiliki siklus hidup sendiri dalam setiap tahapan perkembangannya. Proses ini dapat terjadi dalam waktu relatif pendek atau memakan waktu lebih lama, serta sangat bergantung pada sejumlah faktor yang mempengaruhinya.

Pada penelitian ini, model TALC (*Tourist Area Life Cycle*) Butler⁶ menjadi *benchmark* melihat tahapan perkembangan satu daerah wisata. Model ini sendiri menunjukkan bagaimana tahapan siklus hidup suatu tujuan wisata, yang umumnya teridentifikasi ke dalam enam tahap yaitu, *exploration, involvement, development, consolidation, stagnation*, dan *decline* atau *rejuvenation*. Dengan mengidentifikasi tahapan siklus perkembangan wisata, selanjutnya perlu dikaji bagaimana prioritas pengembangan kawasan tersebut guna menyokong percepatan perkembangan pariwisata ke tahapan siklus selanjutnya.

Dengan melihat pada latar belakang tersebut, dalam penelitian ini akan dikembangkan model TALC untuk menentukan tahap perkembangan kawasan pariwisata Kabupaten Bintan. Kedua, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kebijakan strategis yang paling tepat dalam mengembangkan daerah tersebut, agar dapat meningkat menuju tahapan siklus selanjutnya. Penilaian terhadap alternatif strategi yang tepat dilakukan dengan menggunakan model AHP (*Analytic hierarchy process*) dengan berdasarkan pada penilaian para ahli. Beberapa analisis seperti *location quotient, shift share* dan regresi dikembangkan juga guna mengetahui potensi dan kondisi kekinian pariwisata Kabupaten Bintan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

- 1) Menentukan sejauh mana perkembangan pariwisata di Kabupaten Bintan dalam kerangka model TALC.
- 2) Menyusun alternatif strategi kebijakan yang tepat untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Memberikan kontribusi ilmiah untuk pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bintan berdasarkan penelitian empiris.

b. Bagi Pelaku Industri

⁶ Butler R.W. ,1980, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources, *Canadian Geographer*, 24, 5-12.

Memberikan gambaran investasi yang dapat dilakukan pada sektor pariwisata di Kabupaten Bintan, baik secara kewilayahan atau jenis kegiatan.

c. Bagi Regulator

Memberikan pilihan strategi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bintan.

1.5 Batasan Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam tesis ini dibatasi oleh:

- a. Obyek penelitian adalah sektor pariwisata di Kabupaten Bintan;
- b. Analisis yang dilakukan meliputi kondisi kekininian pariwisata Kab. Bintan, dengan menggunakan analisis deskriptif (seperti *location quotient*, *shift share*) dan analisis regresi, sementara identifikasi tahapan dilakukan dengan analisis preskriptif menggunakan Model TALC. Untuk analisis evaluatif, yang ditujukan untuk menentukan strategi pengembangan, dilakukan dengan menggunakan model AHP.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Tujuan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai pendekatan alternatif dari perspektif yang berbeda – tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dari sosial dan bidang lainnya – tentunya diperlukan guna pemahaman lebih mendalam mengenai pariwisata. Kajian pariwisata yang multi dan inter-disiplin, mengintegrasikan ekonomi dengan disiplin ilmu sosial lainnya selanjutnya akan berkontribusi terhadap penciptaan pengetahuan dalam studi pariwisata (Shong, *et al*, 2012).

Penelitian ini mengkaji bagaimana penyusunan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Bintan Berdasarkan Model Siklus Hidup Kawasan Pariwisata. Penelitian dilakukan dengan mengelaborasi berbagai indikator dan variabel dalam setiap tahapan pengembangan dan kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi setiap strategi yang mungkin dengan berdasarkan indikator tersebut dengan menggunakan AHP. Dalam penelitian ini sendiri, ada beberapa keterbatasan yang menjadi catatan penulis:

1. Model awal yang dikembangkan adalah model TALC Butler, dimana indikator yang digunakan untuk mengembangkan untuk mengidentifikasi siklus setiap kawasan pariwisata dilakukan dengan model identifikasi tahapan yang dilakukan oleh Buhalis (2000). Beberapa variabel dan indikator yang dikembangkan belum sepenuhnya mengintegrasikan keseluruhan variabel atau indikator pariwisata, seperti halnya indikator yang dikembangkan dalam penyusunan indek kompetitif wisata dan pariwisata oleh World Economics Forum (WEF)
2. Beberapa variabel ekonomi dalam kerangka model Butler-Buhalis yang teridentifikasi dan dianalisis ini dalam penelitian ini belum sepenuhnya dielaborasi dengan tren pariwisata yang saat ini tengah berkembang seperti: penyediaan fasilitas penerbangan murah, perkembangan ICT (Wifi dan koneksi internet), penyediaan akomodasi berbasis aplikasi, dan lain sebagainya
3. Keterbatasan penelitian lainnya ditemui juga secara inheren pada model TALC itu sendiri, dimana penggunaan model ini akan dihadapkan pada kesulitan mendefinisikan 'destinasi' dalam hal batas fisik, selain dalam hal jenis destinasi wisata. Suatu destinasi pariwisata didapati memiliki tahapan yang berbeda dalam setiap tahapan evolusi perkembangannya, sementara dalam suatu area bisa jadi kita mendapati beragam jenis destinasi wisata. Oleh karenanya, sulit untuk menentukan batas-batas wilayah dengan tepat, ketika akan menganalisis perkembangan pariwisata suatu kawasan dengan menggunakan model ini.
4. Dari sisi data, model TALC umumnya memerlukan data longitudinal karena model ini mengacu pada bagaimana siklus suatu kawasan berdasarkan waktu. Akan tetapi seringkali data yang bersifat kontinu dari satu sumber sangatlah sulit didapati, sehingga pengembangan model ini memerlukan sumber informasi dari berbagai sumber untuk melihat bagaimana evolusi perkembangan suatu kawasan dalam jangka panjang, serta untuk mengidentifikasi produk wisata yang beragam dalam rentang waktu perkembangannya.

5. Keterbatasan lainnya yang cukup signifikan adalah sifat dari model tersebut yang cenderung deskriptif, sehingga cukup sulit untuk menemukan hubungan prediktif antara performa setiap tahapan dengan intervensi yang dilakukan. Hal inilah yang kemudian membuat model ini sebaiknya diperkaya dengan dengan analisis yang lebih mendalam, termasuk salah satunya adalah model-model analisis seperti analisis akar permasalahan dan *Analytical Hierarchy Proses* (AHP).

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang permasalahan yang melatarbelakangi, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : TINJAUAN LITERATUR

Bab ini memuat tentang landasan teori yang mendukung dan berkaitan dengan tema penelitian, serta penelitian sejenis yang terdahulu.

Bab 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian agar dapat memperoleh tujuan dari penelitian. Secara metodologi, kita melakukan beberapa tahapan penelitian, yang pertama adalah analisis terhadap kondisi kekinian Pariwisata Kabupaten Bintan, yang dilakukan dengan beberapa analisis, meliputi: *Location Quotien*, *Shift Share* dan *Regresi*. Lalu dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu identifikasi *stage* atau tahapan perkembangan pariwisata Kabupaten Bintan berdasarkan Model TALC (*Tourism Area Life Cycle*). Dengan berdasarkan pada kondisi kekinian dan tahapan perkembangan yang terjadi, kita kemudian mengembangkan strategi pengembangan dengan menggunakan Model AHP (*Analytic hierarchy process*).

Bab 4 : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Berisi gambaran umum pariwisata Kabupaten Bintan, yang terdiri atas profil daerah dan kondisi kekinian Pariwisata Kabupaten Bintan berdasarkan beberapa analisis, yaitu *Location Quotien, Shift Share dan Regresi*.

Bab 5 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendiskusikan hasil penelitian dimulai dengan menganalisis data untuk mengidentifikasi tahapan perkembangan pariwisata Kabupaten Bintan berdasarkan Model TALC. Dilanjutkan dengan hasil analisis pohon masalah, dan hasil AHP untuk penyusunan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Bintan.

Bab 6 : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Bab ini memberikan kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasannya, rekomendasi kebijakan, dan menguraikan saran penelitian ke depan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

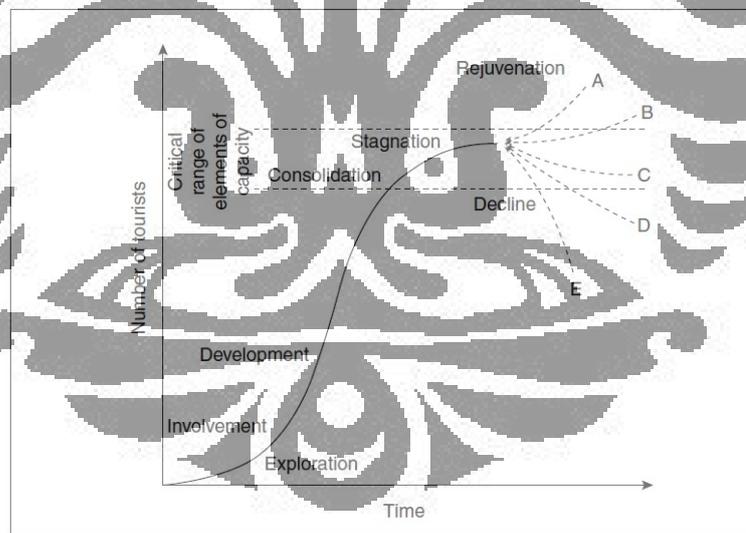


BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1 Model Siklus Hidup Kawasan Pariwisata

Model *Tourism Area Life Cycle* atau siklus hidup kawasan pariwisata merupakan model yang dikembangkan oleh Butler (1980). Model ini menekankan tentang adanya suatu siklus dalam perkembangan suatu kawasan pariwisata. Terjadinya pola siklus ini didasari oleh pemahaman akan adanya batasan (*limit*) dan daya dukung lingkungan dalam menunjang aktivitas pariwisata suatu kawasan, sehingga perkembangan suatu kawasan pariwisata akan berhenti pada suatu titik tertentu.

Buttler (1980) kemudian membagi siklus hidup sebuah kawasan pariwisata ke dalam 6 (enam) tahapan perkembangan, yaitu: *exploration, involvement, development, consolidation, stagnation* dan *decline* atau *rejuvenation*.



Gambar 2.1. Model Siklus Hidup Butler (Butler, 1980)

Dalam perkembangnya, konsep siklus hidup kawasan pariwisata Butler ini banyak digunakan untuk melihat historis perkembangan (siklus hidup) yang dilalui oleh suatu kawasan pariwisata, dimana dalam setiap tahapan diidentifikasi dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tahap *Exploration*. Merupakan sebuah tahapan yang ditandai dengan kunjungan terbatas dari wisatawan dan bersifat tidak tertentu atau sporadis. Umumnya wisatawan yang berkunjung merupakan wisatawan yang bersifat *allocentric* atau menyukai tantangan. Dalam tahapan ini kontak dengan penduduk setempat sudah terjadi, namun belum memiliki dampak sosial dan ekonomi terhadap penduduk setempat.
2. Tahap *Involvement* atau keterlibatan. Pada tahap ini kontak antara wisatawan dengan penduduk setempat semakin meningkat. Fasilitas yang disediakan oleh penduduk semakin meningkat guna menyesuaikan dengan permintaan dari wisatawan yang datang. Dari sini, penyediaan fasilitas dan akomodasi oleh penduduk setempat telah membawa dampak perubahan sosial dan ekonomi mereka. Musim kunjungan dan kemunculan beberapa destinasi wisata yang sering dikunjungi dan proses promosi atau iklan dimulai pada tahap ini.
3. Tahap *Development* atau pengembangan. Pada tahap ini, pengawasan dan partisipasi lokal justru mulai menurun karena adanya keterlibatan pihak luar guna menyokong kebutuhan wisatawan. Hal ini juga menyebabkan adanya atraksi wisata yang bukan asli daerah setempat melainkan sudah dibuat dengan sengaja untuk tujuan lebih menarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Fasilitas dan aksesibilitas terhadap destinasi wisata semakin meningkat. Iklan dan promosi daerah wisata tersebut juga menjadi semakin sering.
4. Tahap *Consolidation* atau konsolidasi. Pada tahap ini, sektor pariwisata telah mendominasi perekonomian masyarakat lokal. Pariwisata kemudian telah masuk ke dalam rantai pasok tujuan wisata global, dimana usaha-usaha yang masuk merupakan usaha waralaba dan besar. Peningkatan jumlah wisatawan terus terjadi namun dengan kecepatan yang cenderung turun. Upaya pemasaran dan periklanan dilakukan lebih melebar untuk memperpanjang musim pariwisata dan menarik pengunjung lebih banyak dan jenis wisatawan yang bervariasi.

5. Tahap *Stagnation* atau stagnasi. Dalam tahapan ini kapasitas yang berlebih pada dasarnya akan mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Di sisi lain, daya dukung lingkungan dan sumber daya pada dasarnya terbatas. Di sini, destinasi wisata dihadapkan pada tahapan yang tidak lagi mengalami perkembangan yang signifikan. Sejumlah puncak-puncak kunjungan wisatawan telah terjadi dan bersifat berulang, sehingga pada tahapan ini pengelolaan fasilitas lebih ditujukan untuk mengoptimalkan fasilitas pada puncak-puncak kunjungan wisatawan. Selain itu, pada tahapan ini objek wisata buatan telah mendominasi objek yang asli.
6. Tahap *Declination* atau penurunan. Tahap selanjutnya ditandai dengan berbagai skenario. Skenario yang pertama adalah penurunan. Dalam tahapan ini wisatawan yang datang hanya terjadi pada akhir pekan atau hari-hari kunjungan biasanya. Ketertarikan wisatawan pada daerah tersebut menjadi berkurang dan lebih tertarik pada destinasi wisata yang baru. Akibatnya fasilitas pariwisata tidak lagi dikelola oleh instansi pariwisata dan terorganisir dengan baik, bahkan kembali dikelola oleh pihak lokal. Pada akhirnya kawasan wisatawan menjadi daerah yang kurang layak dikunjungi bahkan bisa didapati sebagai daerah yang tidak lagi memiliki aktivitas pariwisata.
7. Tahap *Rejuvenation* atau peremajaan. Tahapan ini merupakan skenario lain setelah tahapan stagnasi. Pada tahapan ini ditandai dengan upaya peremajaan kawasan pariwisata. Yang dilakukan dengan perubahan secara menyeluruh dan drastis dari sumber daya pariwisata, baik dengan menyediakan objek wisata buatan yang baru atau dengan penggunaan sumber daya alam baru yang belum digunakan sebelumnya.

Secara umum indikator-indikator dalam setiap tahapan dapat disajikan dalam bentuk ringkasan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komponen-komponen dalam setiap tahapan pada Model Buttlr

Model Buttlr	
Tahapan	Komponen-komponen
1	Tahapan eksplorasi (<i>Exploration Stage</i>) Jumlah wisatawan yang sedikit Lebih didasarkan pada atraksi wisata primer (alam atau budaya) Tidak ada atraksi wisata skunder (buatan) Tidak ada dampak signifikan dari wisatawan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
2	<i>Involvement Stage</i> Masyarakat lokal menjadi terlibat dalam pariwisata Kehadiran fasilitas skunder dari pariwisata semisal rumah sewa Musim-musim kunjungan mulai muncul Adanya tekanan terhadap pihak pemerintah untuk menyediakan transportasi untuk pengunjung
3	<i>Development Stage</i> Jumlah wisatawan yang melebihi jumlah masyarakat lokal pada puncak musim kunjungan Pemasaran yang sangat masif dan menciptakan pasar destinasi pariwisata Keterlibatan masyarakat lokal menurun Organisasi atau pihak luar menyediakan daya tarik sekunder untuk pengunjung Daya tarik alam dan budaya dikembangkan lebih jauh Masyarakat lokal mulai merubah bentuk fisik/lingkungan destinasi wisata
4	Tahap Konsolidasi atau <i>Consolidation Stage</i> Kecepatan pertumbuhan menurun namun jumlah wisatawan tetap melebihi jumlah populasi lokal Kawasan ekonomi dan sektor ekonomi lainnya menjadi terlibat dalam pariwisata Pemasaran dan promosi dikembangkan lebih jauh Waralaba utama dan rantai pasok wisata global hadir di kawasan wisata Area resort memiliki kawasan bisnis rekreasi yang tertata Kemunculan ketidak cocokkan dari beberapa masyarakat lokal terhadap kehadiran pariwisata
5	Tahap Stagnasi (<i>Stagnation Stage</i>) Jumlah kunjungan wisatawan mencapai puncaknya Kapasitas daya dukung mencapai titik maksimal atau bahkan melebihi Pariwisata menyebabkan permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan Resort menjadi terpisah dengan lingkungan sekitarnya secara geografis Atraksi wisata buatan melebihi atraksi wisata yang aslinya Kawasan telah mapan namun tidak lagi bersifat <i>fashionable</i> .
6-A	Skenario Penurunan (<i>Decline Scenario</i>) Tidak lagi bisa berkompetisi dengan atraksi pariwisata yang baru Kunjungan hanya terjadi pada akhir pekan atau hari kunjungan Fasilitas pariwisata tergantikan dengan aktivitas non pariwisata Hotel menjadi tempat peristirahatan atau tempat tinggal masyarakat lokal Menjadi daerah yang kumuh atau tidak ada aktivitas pariwisata sama sekali
6-B	Skenario Peremajaan (<i>Rejuvenation Scenario</i>) Perubahan menyeluruh terhadap atraksi pariwisata yang ditawarkan Sumber daya yang belum digunakan sebelumnya dikembangkan

Model siklus hidup kawasan pariwisata Butler pada dasarnya bukan merupakan model evolusi sesungguhnya dari suatu kawasan pariwisata, melainkan sebagai sebuah siklus hipotetis—sebagaimana disebutkan Buttlr

sendiri dalam makalahnya. Akan tetapi model ini sendiri cukup menarik, terlebih untuk para perencana dan pengembang kawasan pariwisata, dikarenakan memberikan peringatan implisit mengenai tahap apa yang sedang terjadi pada suatu kawasan pariwisata dan strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengembangkan kawasan tersebut.

2.1.1 Prediksi Siklus Hidup Kawasan Wisata

Model siklus hidup suatu kawasan pariwisata Butler pada dasarnya menyediakan suatu kerangka kerja perencanaan suatu kawasan pariwisata dalam jangka panjang, terutama untuk memprediksi dan membuat strategi dari penggunaan lahan, perkembangan ekonomi dan upaya-upaya pemasaran (Getz, 1992).

Strategi pengembangan –terutama untuk sektor publik, sangat diperlukan dalam menyokong tumbuh kembang suatu kawasan pariwisata, khususnya pada tahap-tahap awal perkembangan. Keterlibatan sektor publik dalam menciptakan infrastruktur pariwisata dan bahkan beberapa unsur suprastruktur diperlukan guna mendorong peran aktif investor swasta pada tahapan selanjutnya. Keterlibatan sektor publik akan mendorong peningkatan permintaan pariwisata, yang pada dasarnya sangat tergantung pada pasokan kualitas layanan yang lebih baik. Peningkatan awal inilah yang selanjutnya akan menarik sektor swasta, karena terdorong oleh minatnya akan pasar. Oleh karena itu, perkembangan kawasan pariwisata pada dasarnya dapat didorong oleh pasar, namun bisa juga melalui intervensi negara dalam bentuk strategi pemerintah, kebijakan, legislasi dan program (Golembiski, dkk, 2010).

Model siklus hidup pada dasarnya menyediakan analisis kualitatif untuk melihat bagaimana tahapan perkembangan suatu kawasan. Tahapan yang dilalui kawasan pariwisata tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan. Hal ini dilakukan oleh Husin (2014) untuk melihat bagaimana tahapan perkembangan pariwisata di Malaysia dan bagaimana tingkat kecocokan strategi pengembangan yang dilakukannya berdasarkan tahapan yang dilaluinya. Dalam mengeksplorasi hubungan antara tahapan dan strategi ini, Husin (2014) menerapkan Model Siklus hidup kawasan pariwisata dengan

menggunakan data arsip dari tahun 1965 (Rencana Malaysia Pertama) hingga 2010 (Rencana Malaysia Kesembulan). Analisis yang dilakukannya digunakan untuk melihat tahapan perkembangan pariwisata Malaysia dan menentukan strategi untuk mencegah penurunan destinasi. Husin kemudian menekankan, sebagaimana strategi yang dikembangkan oleh Andriotis (2001), bahwa pemilihan tujuan dan strategi yang dikembangkan sebaiknya didasarkan pada tahapan siklus hidup yang ada saat ini, yang kemudian dilanjutkan dengan mengambil keuntungan dari perubahan pasar yang cepat, produk, teknologi dan lingkungan sosial relatif terhadap pesaing.

Meskipun TALC adalah konsep yang berguna untuk menggambarkan evolusi pengembangan pariwisata, akan tetapi tahapan dan/ atau durasi tahap yang dialami oleh suatu tujuan wisata pada dasarnya sangat ditentukan pada sejumlah faktor. Oleh karenanya, tidak ada formula yang baku yang bisa diterapkan untuk daerah yang berbeda. Hal ini juga yang kemudian ditemukan oleh Zhong, *et al* (2007) yang mengkaji bagaimana tahapan siklus hidup Taman Nasional Zhangjiajie di Tiongkok. Ia mendapati bahwa siklus hidup yang dilalui oleh Taman tersebut pada dasarnya mengikuti tahapan yang dihipotesiskan oleh Buttler yaitu *exploration, involvement, development, dan consolidation*. Namun pada dasarnya evolusi ini sendiri didasari pada berbagai faktor termasuk pelanggan, pemerintah, wirausaha dan agen perjalanan.

Bisa dikatakan bahwa faktor internal dan eksternal memainkan peranan yang cukup penting dalam menentukan siklus hidup suatu kawasan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Lumbanraja (2012) yang meneliti siklus hidup kawasan Dana Toba Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan gabungan (kuantitatif dan kualitatif) ia menunjukkan bahwa perkembangan kawasan pariwisata di Kawasan Danau Toba berbeda satu dengan lainnya dan tidak sepenuhnya mengikuti garis linear sebagaimana diasumsikan Butler (1980). Hal ini dikarenakan faktor yang dilihat dalam perkembangan suatu kawasan pariwisata tidak hanya mengacu pada jumlah pengunjung semata, melainkan faktor produk maupun atraksi pariwisata, dan ciri-ciri demografi, ekonomi pasar wisatawan, faktor suprastruktur, khususnya kelembagaan dan kebijakan pariwisata.

Terkait dengan manajemen untuk setiap tahapan siklus hidup, terdapat 2 tahapan transisi yang sangat penting ketika mengaplikasikan model Siklus Hidup Butler dalam proses manajemen, yang pertama tahap keterlibatan (*involvement*) yang merupakan tahapan yang menjadi tahapan awal setelah proses eksplorasi menuju tahapan pengembangan (*development*), yang kedua adalah tahapan konsolidasi yang terjadi antara tahapan pengembangan (*development*) menuju tahapan stagnasi. Kedua tahapan ini dianggap akan sangat menentukan bagaimana perbedaan laju setiap destinasi wisata dalam melewati setiap tahapannya (Butler, 1980; Breakey, 2005). Oleh karenanya salah satu proses yang sangat penting dilakukan sebelum merumuskan strategi pengembangan suatu kawasan adalah dengan memprediksi tahapan yang tengah dilalui oleh kawasan tersebut.

Setiap tahapan yang dilalui oleh masing-masing tahapan umumnya memiliki kurun waktu yang tidak sama. Namun secara umum tahapan *development* memiliki periode yang relatif lebih lama dibandingkan dengan periode lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tahapan ini berlangsung pada kurun waktu lebih dari 10 tahun. Untuk kasus kawasan pariwisata Bali, tahapan *development* terjadi pada kurun waktu 1983-1997 (Judisseno, 2015).

2.2 Analisis Akar Permasalahan

Guna penyusunan sebuah strategi pengembangan yang tepat, pemahaman terhadap permasalahan yang tengah dihadapi tentunya merupakan langkah pertama yang diambil. Beberapa pendekatan bisa digunakan dan salah satunya adalah dengan menggunakan analisis pohon masalah.

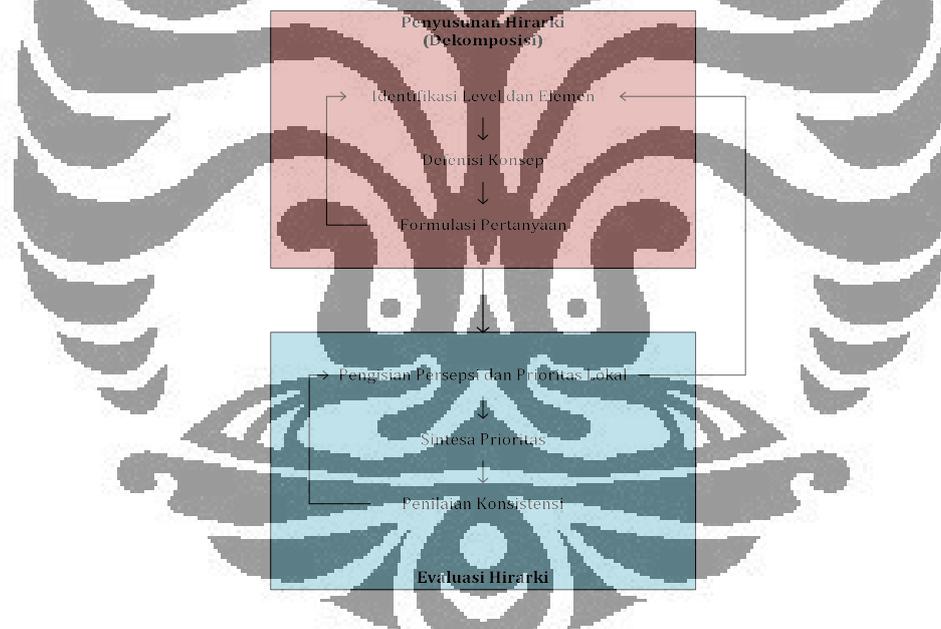
Analisis pohon masalah merupakan pendekatan yang membantu seseorang untuk memecahkan permasalahan yang kompleks ke dalam komponen-komponen yang menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Dalam kerangka ini, analisis pohon masalah menggunakan hubungan sebab akibat untuk melihat bagaimana hubungan antara faktor atau komponen penyebab permasalahan dengan permasalahan yang terjadi.

Memetakan permasalahan yang terjadi akan sangat berguna untuk penyesuaian tujuan yang ingin dicapai. Analisis akar permasalahan ini akan dapat mengilustrasikan hubungan antara masalah utama, penyebab masalah, dan

dampak dari masalah utama serta mencari solusi atas persoalan utama yang ada (Handoko, 2013).

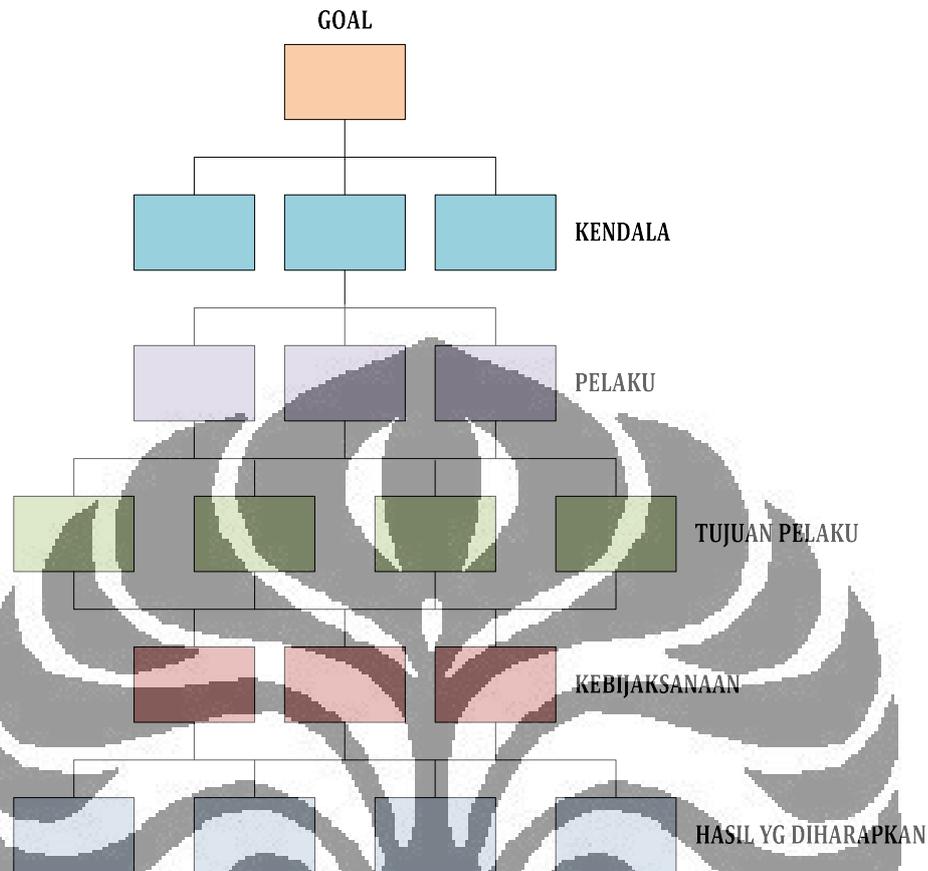
2.3 Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh Saaty (1970) sebagai salah satu sistem pendukung dalam pengambilan keputusan. AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada kriteria majemuk (*multi-criteria*) dengan menggunakan *judgment* atau penilaian subjektif dari para pembuat keputusan sebagai input. Keluaran dari AHP adalah alternatif keputusan dan bobot dari masing-masing keputusan tersebut. Secara praktik, AHP kemudian banyak digunakan sebagai analisis keputusan keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik (Saaty, 1993).



Gambar 2.2 Aplikasi Model AHP

Pemaduan model kuantitatif dan kualitatif dalam model AHP dilakukan melalui jenis *input*-nya. Jika model kuantitatif yang ada umumnya memakai *input* yang kuantitatif atau berasal dari data sekunder, yang otomatis model tersebut hanya dapat mengolah hal-hal kuantitatif, maka model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap ‘ekspert’ sebagai input utamanya. Dengan menggunakan input yang kualitatif (persepsi manusia) maka model ini dapat mengolah juga hal-hal kualitatif, disamping hal-hal yang kuantitatif.



Gambar 2.3. Bentuk dan Standar Dekomposisi Hirarki

Sebagai suatu model pengambilan keputusan, model AHP dianggap memadai untuk merepresentasikan kondisi nyata. Hal ini dikarenakan salah satu asumsi utama model AHP adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Jika umumnya dasar dari teori utilitas manusia berangkat dari konsep 'transitivity' dimana konsistensi 100% merupakan syarat mutlak, pada kenyataannya hal ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fakta bahwa keputusan yang diambil manusia selalu didasari pada perpaduan hal-hal yang bersifat logis dan yang bersifat non-logis (seperti perasaan, pengalaman, instuisi), memunculkan kesimpulan bahwa sudah sepantasnyalah suatu model pengambilan keputusan tidak menuntut syarat konsistensi 100% secara mutlak.

Aplikasi dari model AHP dilakukan dalam dua tahap yaitu: penyusunan hirarki dan evaluasi hirarki. Penyusunan hirarki adalah cara untuk mengurai masalah yang kompleks lewat pengelompokan elemen-elemen dan menyusunnya

secara berjenjang (hirarki). Tahap ini lazim disebut dekomposisi, yang mencakup tiga proses yang berurutan dan saling berhubungan yaitu identifikasi level dan elemen, definisi konsep dan formulasi pertanyaan. Sedangkan evaluasi hirarki meliputi pengisian persepsi dan prioritas lokal, sintesa prioritas, konsistensi.

Penyusunan hirarki ini tidak bersifat kaku, namun dapat disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dengan mengubah level/ jenjang hirarki. Bentuk standar penyusunan hirarki dilakukan lewat tahapan di bawah ini:

1. Mengidentifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki atau yang lazim disebut 'goal'. Yang disebutkan disini adalah masalah yang akan dicari pemecahannya lewat model AHP.
2. Menentukan kriteria-kriteria yang diperlukan atau kira-kira sesuai dengan tujuan keseluruhan tersebut. Kriteria ini biasanya terdiri dari syarat-syarat atau keadaan yang kiranya dapat menunjang tercapainya sebuah 'goal' dan biasanya masih bersifat umum (*general*).
3. Mempertimbangkan kemungkinan penambahan sub-sub kriteria di bawah setiap kriteria. Sub kriteria merupakan penjabaran lebih dari kriteria yang masih bersifat umum tersebut dan hal ini biasanya diperlukan bagi para pengambil keputusan yang menyukai hal-hal yang lebih detail. Sub kriteria dapat berupa hambatan dan/ atau pelaku.
4. Mengidentifikasi alternatif-alternatif yang akan dievaluasi di bawah sub-sub kriteria.

Jika sub-sub kriteria yang ada masih dianggap terlalu luas maka dapat dilakukan penambahan sebuah level di atas alternatif-alternatif yang mengidentifikasi atribut-atribut dari alternatif-alternatif tersebut dalam proses evaluasi. Apabila penting tidaknya atribut-atribut tersebut dapat ditentukan dalam kaitannya dengan sub kriteria maka proses penyusunan hirarki dapat dikatakan selesai. Apabila atribut-atribut tersebut tidak dapat dijelaskan, maka perlu ditambahkan lagi suatu level di atas atribut-atribut untuk evaluasi tersebut. Penambahan level-level baru harus terus dilakukan sampai didapatkan hubungan yang sesuai antar level dalam sebuah hirarki dan dapat ditentukan prioritas

elemen-elemen tersebut dalam kaitannya dengan salah satu elemen di level di atasnya.

Apabila hirarki sudah selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pengisian hirarki oleh responden. Proses pengisian ini mensyaratkan adanya pemahaman dan persetujuan responden terhadap bentuk hirarki. Proses pengisian dilakukan dengan banyak cara, diantaranya melalui penggunaan kuisioner.

Pengisian hirarki tak lain adalah pengisian persepsi pada matriks perbandingan. Persepsi manusia yang dijadikan input pada model AHP dinyatakan lewat bentuk perbandingan antara dua alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Perbandingan ini menggunakan skala rasio 1 sampai 9, yang penjelasannya tertera seperti pada Tabel 2.2.

Persepsi yang sudah disampaikan selanjutnya kita olah lewat sistem pemrosesan data untuk menentukan sintesa akhir dari hirarki. Pada dasarnya, sintesa akhir didasari oleh operasi perkalian antara matriks dan vektor. Vektor itulah yang sebenarnya merupakan tujuan akhir suatu model AHP karena para pengambil keputusan dapat menentukan alternatif tindakan yang harus diambilnya dengan berdasarkan urutan elemen-elemen pada level terakhir.

Tabel 2.2. Skala AHP untuk Perbandingan

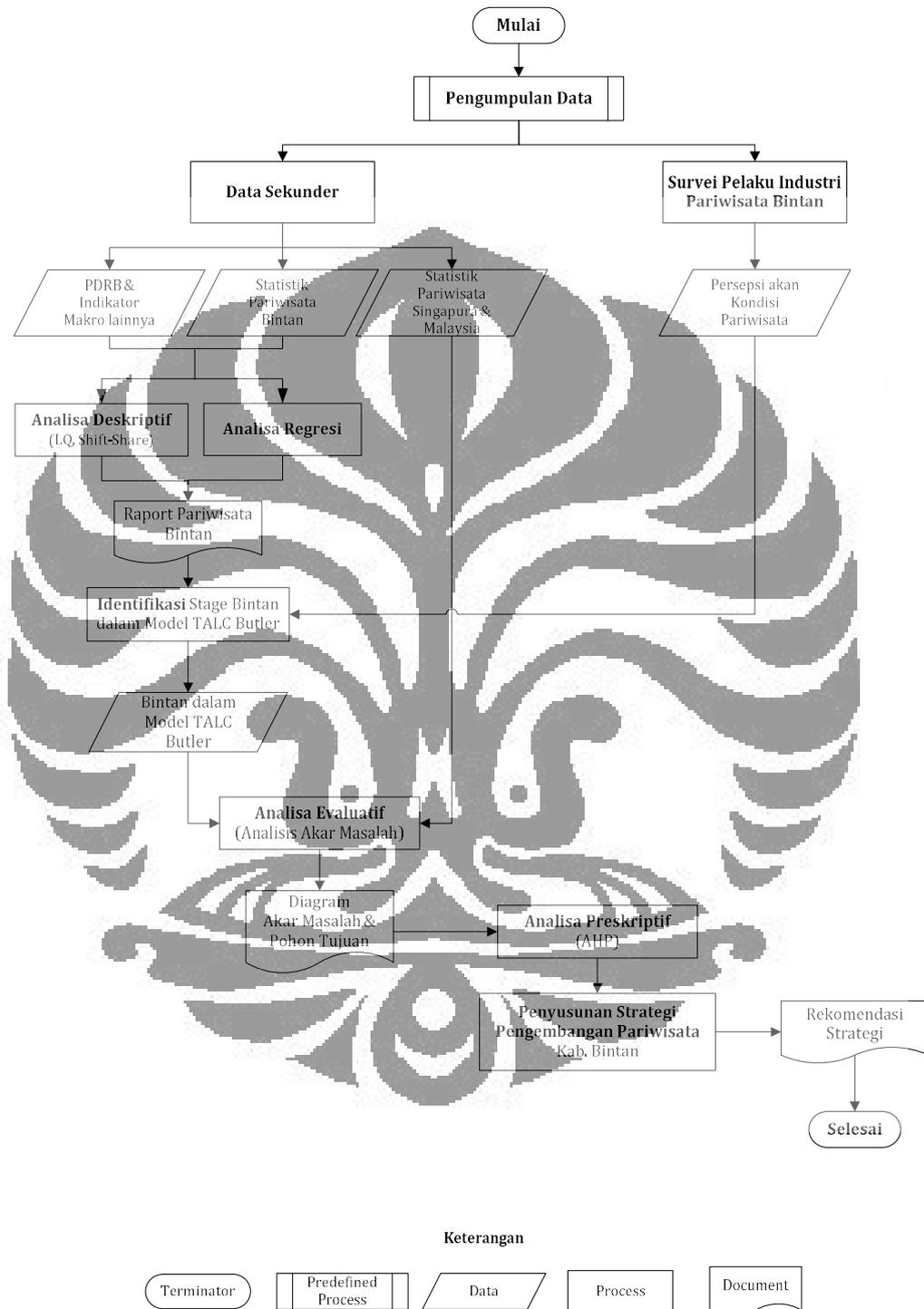
Skala	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Agak lebih penting	A agak lebih penting dari B
7	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2, 4, 6, 8	Nilai antara angka diatas	Ragu-ragu dalam menentukan skala misal 6 antara 5 dan 7
Resiprokal	Jika $A/B=9$ maka $B/A=1/9$	Asumsi masuk akal

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Kerangka Kerja Penelitian

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi yang tepat dalam pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Bintan berdasarkan pada potensi pariwisata dan kondisi kekinian yang dihadapinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dibagi ke dalam tahapan-tahapan sebagai berikut: yang pertama adalah deskripsi mengenai kondisi pariwisata Kabupaten Bintan, tahapan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kekinian dari pariwisata kab. Bintan. Untuk keperluan ini digunakan beberapa analisis deskriptif, yaitu analisis *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*. Analisis regresi dilakukan juga untuk melihat bagaimana pengaruh dari berbagai variabel dalam pengembangan kawasan pariwisata. Pendekatan-pendekatan ini dikembangkan dengan menggunakan data-data sekunder. Tahapan selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi tahapan siklus hidup kawasan pariwisata Kabupaten Bintan. Hal ini dilakukan berdasarkan model Siklus Hidup Kawasan Pariwisata (TALC) dengan menggunakan model prediksi yang diusulkan oleh Buhalis (2000). Analisis deskriptif, analisis regresi dan analisis tahapan siklus hidup ini menjadi masukan bagi penyusunan analisis evaluatif yang dilakukan dengan menganalisis akar permasalahan yang terjadi dengan mengkontruksi diagram Pohon Masalah. Tahapan berikutnya adalah tahapan preskriptif, yang dilakukan guna melihat prioritas strategi pengembangan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bintan. Evaluasi Preskriptif ini dilakukan dengan menggunakan analisis AHP berdasarkan analisis akar permasalahan yang dilakukan pada tahapan sebelumnya. Lebih jauh mengenai kerangka kerja penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Diagram Alir Kerangka Kerja
Penyusunan Tesis



Gambar 3.1. Kerangka Kerja Penelitian

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan. Sasaran dalam wawancara adalah untuk menggali informasi maupun data yang lebih detil terhadap pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Bintan dari para ahli yang memahami pengembangan pariwisata.

3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder diambil dari berbagai literatur, hasil penelitian lainnya yang terkait, penelitian hukum, maupun data-data yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi yang berwenang. Data sekunder yang utama yakni mengacu pada peraturan perundang-undangan, literatur, buku kepustakaan maupun peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bintan.

3.2 Teknik Pengumpulan data

Data kualitatif dikumpulkan dengan melakukan *in-depth interview* kepada individu-individu berdasarkan kapasitas profesionalnya dalam bidang pariwisata. *In-depth interview* dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang berbagai permasalahan yang ada terkait perkembangan pariwisata di Kabupaten Bintan dengan kemungkinan alternatif strategi dan kebijakan yang dimungkinkan untuk dapat diterapkan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap berbagai stakeholders yang terkait, baik dalam jajaran pemerintahan, pengusaha maupun pelaku industri pariwisata. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur berdasarkan pada model TALC.

Data kuantitatif dikumpulkan dengan melakukan *desk research* melalui pengumpulan data-data statistik maupun penelusuran literatur yang sesuai. Melakukan review berbagai regulasi dan kebijakan, tinjauan literatur, dan identifikasi stakeholders terkait kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan. Selain regulasi dan kebijakan, *desk study* juga dilakukan dengan pengumpulan dan analisa terhadap data-data sekunder yang terkait dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Bintan.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Analisa Deskriptif Potensi Pariwisata Kab. Bintan

A. *Location Quotient* (LQ)

Pada dasarnya sektor-sektor dalam perekonomian dapat dibagi ke dalam dua sektor besar, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor-sektor yang mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar di daerah sendiri, bahkan dapat mengekspor barang dan jasanya ke luar daerah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor yang hanya mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar daerahnya sendiri, bahkan harus mengimpor dari luar daerah yang bersangkutan.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menentukan sektor-sektor basis ini adalah pendekatan *location quotient* atau sering disingkat LQ merupakan indikator awal untuk menentukan posisi surplus/defisit suatu daerah dalam hal konsumsi/ produksi tertentu. Analisa LQ merupakan suatu metode statistik yang menggunakan karakteristik output/nilai tambah atau kesempatan kerja untuk menganalisis dan menentukan keberagaman dari basis ekonomi masyarakat daerah. Basis ekonomi dicirikan oleh karakteristik pendapatan dan kesempatan kerja. Analisis LQ memberikan kerangka pengertian tentang stabilitas dan fleksibilitas perekonomian masyarakat untuk merubah kondisi melalui penyelidikan terhadap derajat sektor-sektor yang ada di lingkungan masyarakat (Heilbrun, 1987).

Menurut Hood (1998), *Location Quotient* (LQ) adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Analisa *location quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi daya saing sektoral perekonomian di setiap daerah yang dianalisa. Analisa dilakukan dengan menggunakan indeks LQ, dimana nantinya indeks LQ untuk sektor tertentu di suatu daerah yang nilainya lebih besar dari 1 (satu) menunjukkan bahwa sektor Pariwisata tersebut merupakan sektor basis, artinya sektor tersebut selain mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri, sektor tersebut juga mampu memenuhi kebutuhan daerah lainnya.

Asumsi yang digunakan pada saat menganalisis dengan menggunakan analisis LQ antara lain adalah:

- Semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (daerah referensinya), kondisi ini mengasumsikan bahwa pola pengeluaran secara geografis adalah sama.
- Produktivitas tenaga kerja di seluruh daerah adalah sama.
- Setiap sektor dalam perekonomian menghasilkan output atau produk yang homogen.

Sedangkan kegunaan utama dengan menggunakan analisis *location quotient* (LQ) adalah:

- Untuk mengestimasi jumlah/kapasitas ekspor –baik barang/jasa atau tenaga kerja yang terjadi di masyarakat atau daerah dengan mudah dan murah, dibandingkan apabila harus melakukan survei secara langsung ke lapangan.
- Melihat seberapa besar suatu sektor mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (*self sufficient*) dalam produksi atau tenaga kerja
- Untuk melihat stabilitas perekonomian suatu daerah secara keseluruhan, dimana kestabilan ini selalu dikaitkan dengan keragaman pada basis ekonomi yaitu bahwa output atau tenaga kerja tidak terkonsentrasi pada beberapa sektor saja. Basis ekonomi seharusnya tersebar pada beberapa sektor dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerahnya dan dapat terhindar dari kondisi buruk apabila terdapat atau muncul gangguan terhadap sektor-sektor basis tersebut

Formula LQ sebagai contoh dengan menggunakan nilai output, adalah sebagai berikut :

(1)

dimana:

- S_{iR} : jumlah PDRB sektor i pada daerah R
- S_R : jumlah total PDRB pada daerah R
- S_{iN} : jumlah PDB sektor i pada wilayah nasional
- S_N : jumlah total PDB pada wilayah nasional

Terdapat tiga kondisi yang dapat dicirikan dalam perhitungan dengan metode LQ pada suatu wilayah, yaitu:

- a) Jika nilai $LQ > 1$, menunjukkan sektor tersebut disamping dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, juga memberikan peluang untuk diekspor ke wilayah lainnya. Dapat dikatakan pula bahwa wilayah tersebut terspesialisasi pada sektor yang bersangkutan (sektor tersebut merupakan sektor basis).
- b) Jika nilai $LQ = 1$, menunjukkan sektor tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri. Atau dengan kata lain, sektor yang bersangkutan di daerah tersebut memiliki tingkat spesialisasi yang sama dibandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah nasional.
- c) Jika nilai $LQ < 1$, menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga wilayah tersebut harus mengimpor dari wilayah lain. Dapat dikatakan juga bahwa wilayah tersebut tidak terspesialisasi pada sektor yang bersangkutan (sektor tersebut merupakan sektor non basis).

Semakin besar nilai indeks LQ untuk sektor tertentu di suatu daerah, semakin tinggi pula daya saing sektor tersebut terhadap daerah lainnya. Analisa LQ dilakukan untuk sektor pariwisata Kabupaten Bintan terhadap Provinsi Kepulauan Riau dan terhadap Nasional serta Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Sumatera Utara terhadap Nasional tahun 2010-2014 sebagai perbandingan.

B. Shift-share (SS)

Potensi ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari kapasitas kemampuan pertumbuhan output/produksi jika dibandingkan dengan kapasitas perekonomian sekitarnya, misalnya saja perekonomian nasional. Setiap daerah seharusnya memiliki strategi pembangunan sektoral yang dapat berbeda sesuai dengan karakteristik daerah dan keunggulan komparatif yang dimiliki. Jika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, berarti kapasitas pertumbuhan ekonomi belum tercapai secara optimal. Salah satu cara untuk mencapai kapasitas yang optimal yaitu dengan mendorong masuknya investasi di sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Analisis *shift-share* merupakan salah satu model yang memiliki kelebihan dalam melihat pola pertumbuhan daerah dan besarnya angka pertumbuhan yang seharusnya dapat dicapai atau terjadi.

Analisis *shift-share* adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa data statistik regional, baik berupa pendapatan per kapita, output, tenaga kerja maupun data lainnya. Dalam analisis ini, akan diperlihatkan bagaimana keadaan pertumbuhan di daerah dengan dibandingkan pada pertumbuhan nasional. Tujuan dari analisis *shift-share* adalah untuk melihat dan menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensi). Dengan demikian, analisis ini akan memberikan hasil perhitungan yang dapat menentukan posisi, baik berupa kelemahan maupun kekuatan, dari suatu sektor-sektor dalam perekonomian di daerah dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama di tingkatan wilayah referensinya.

Analisis *shift-share* tidak dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana proses perubahan di setiap sektor tersebut terjadi. Analisis ini hanya memberikan gambaran bagi para pengambil keputusan untuk menentukan mengapa suatu sektor tertentu dalam perekonomian memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensinya, dan sektor yang lainnya tidak.

Asumsi yang digunakan pada analisis *shift-share* adalah bahwasanya pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat dibagi menjadi tiga komponen,

yaitu: (1) komponen pertumbuhan regional (*regional share*), yaitu pertumbuhan daerah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional; (2) komponen pertumbuhan proporsional (*proportional shift*), yaitu perbedaan antara pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan nasional sektoral dengan pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan nasional total; dan (3) komponen pergeseran pertumbuhan diferensial (*differential shift*), yaitu perbedaan antara pertumbuhan daerah secara aktual dengan pertumbuhan daerah jika menggunakan pertumbuhan sektoral nasional.

Berdasarkan asumsi di atas, maka dibuat perumusan *shift-share* secara kuantitatif, yaitu:

$$G = R + S_p + S_d \quad (2)$$

dimana:

G = Perubahan total di daerah

R = *Regional share*

S_p = *Proporsional shift*

S_d = *Differential shift*

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh *regional share*, *proportional shift*, dan *differential shift*. *Regional share* suatu daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan agregat secara sektoral di daerah dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian wilayah referensinya (dalam hal ini nasional). Jika suatu wilayah tumbuh dengan tingkat yang sama dengan pertumbuhan nasionalnya maka wilayah daerah tersebut akan mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. *Proportional shift* mengukur perubahan relatif, tumbuh lebih cepat atau lebih lambat, suatu sektor di daerah dibandingkan dengan perekonomian wilayah referensinya (nasional). Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian nasionalnya. Pertumbuhan sektoral yang berbeda dengan nasionalnya bisa disebabkan karena

komposisi awal ekonominya yang dikaitkan dengan bauran sektoralnya (*component mix*). Sedangkan differential shift membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing sektoral suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian yang dijadikan referensi (nasional). Oleh sebab itu, jika *differential shift* dari suatu sektor bernilai positif, maka sektor tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian nasional, dan sebaliknya. Komponen ini biasanya dikaitkan dengan adanya keunggulan atau ketidakunggulan kompetitif suatu daerah dibandingkan dengan wilayah nasional. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya lingkungan sekitar yang kondusif atau tidak kondusif terutama dalam mendukung pertumbuhan setiap sektoralnya.

Adapun perumusan dari ketiga variabel, yaitu *regional share*, *proportional shift*, dan *differential shift* adalah:

(3)

(4)

(5)

dimana :

X menunjukkan data statistik yang digunakan.

n menunjukkan simbol nasional.

r menunjukkan simbol regional

i menunjukkan simbol sektor.

t menunjukkan simbol tahun observasi yang terakhir.

menunjukkan simbol tahun observasi awal.

Dari perumusan tersebut, untuk menentukan keunggulan komoditas, komponen S_p dan S_d merupakan kriteria kinerja komoditas pada tahap pertama. Komponen S_p yang positif menunjukkan bahwa komposisi industri sudah relatif baik dibandingkan dengan nasional dan nilai S_p yang negatif menunjukkan yang sebaliknya. Komponen S_d yang positif menunjukkan keunggulan komoditas tertentu dibandingkan dengan komoditas serupa di daerah lain.

Analisis *shift-share* juga merupakan salah satu model yang memiliki kelebihan dalam melihat pola pertumbuhan daerah dan besarnya angka pertumbuhan yang seharusnya dapat dicapai atau terjadi. Analisis *shift-share* dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan perekonomian daerah (propinsi) terhadap perekonomian nasional.

Dalam penelitian ini analisis *shift-share* dilakukan dengan membandingkan potensi pertumbuhan sektor pariwisata Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Utara terhadap Nasional antara tahun 2010 dan 2014.

3.3.2 Analisa Model Ekonometrika: Data Panel

Teknik analisis data lainnya yang digunakan untuk melihat kondisi pariwisata Kab. Bintan adalah regresi data panel. Disebut demikian, karena dalam analisisnya digunakan data panel (*pooled data*) sehingga regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel (Yana Rohmana, 2010:229). Gujarati (2003:637) menjelaskan bahwa data panel (*pooled data*) adalah gabungan dari data *time series* (antar waktu) dan data *cross section* (antar individu atau ruang). Proses pembentukan data panel adalah dengan cara mengkombinasikan unit-unit deret waktu dengan kerat lintang sehingga terbentuklah suatu kumpulan data. Proses itu sendiri disebut *pooling*.

Teknik analisis data menggunakan data panel ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penentu apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan sektor pariwisata suatu daerah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan data panel dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, meliputi 34 provinsi yang ada saat ini. Dalam analisis ini, kita menganalisis bagaimana Pendapatan Domestik Regional Bruto Pariwisata (PDRBP) ditentukan oleh beberapa variabel seperti jumlah wisatawan lokal/asing, jumlah hotel bintang/non bintang, jumlah kamar hotel bintang/non bintang, jumlah tempat tidur hotel bintang/non bintang, rata-rata lama menginap wisatawan lokal/asing pada hotel bintang/non bintang dan jumlah pekerja.

Dari sudut pandang ekonomi, umumnya digunakan 2 pendekatan dalam analisis pertumbuhan sektor pariwisata ini, yaitu dari sisi penawaran dan

permintaan. Dari sisi penawaran pada dasarnya menggambarkan destinasi (*detination*) sementara permintaan merepresentasikan asal (*origin*).

Permintaan dapat didefinisikan sebagai kuantitas komoditas atau pelayanan yang diinginkan dan dapat dibeli pada satu periode tertentu (Archer, 1980; Uysal, 1998). Dalam sektor pariwisata, permintaan umumnya didekati dengan berbagai ukuran, seperti: jumlah kunjungan wisatawan, jumlah belanja wisatawan, lama menetap atau menginap wisatawan pada destinasi pariwisata, indeks propensitas wisatawan, dan lain sebagainya, (Uysal, 1998). Dalam teori ekonomi, tenaga kerja merupakan salah satu variabel utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam memodelkan pertumbuhan pariwisata, tenaga kerja dimasukkan sebagai penentu dalam permintaan maupun penawaran sektor pariwisata.

Dari sudut pandang penawaran, pertumbuhan sektor pariwisata umumnya didekati dari karakteristik destinasinya, meliputi jumlah akomodasi, jumlah kamar, jumlah tempat tidur maupun jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor tersebut (Ioannides & Debbage, 1998). Sehingga secara umum, model regresi yang digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan pariwisata di rumuskan sebagai:

- Sisi Penawaran/Produksi sebagai adaptasi dari fungsi produksi pariwisata:

(6)

- Sisi Permintaan sebagai adaptasi dari fungsi permintaan pariwisata:

(7)

*) Jenis Hotel: Bintang dan Non Bintang

***) Wisatawan: Mancanegara dan Nusantara

****) Regresi Data Panel tahun 2010-2014 dan 34 Wilayah

Dalam penelitian ini, model regresi data panel yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). FEM mengasumsikan bahwa perbedaan dari masing-masing unit dapat dijelaskan sebagai perbedaan dari konstanta. Pada model FEM terdapat pola yang tidak acak atau korelasi antar efek individu dan peubah penjelas dengan variabel observasi sehingga komponen *error* dari efek individu dan waktu menjadi bagian dari intersep. Secara umum model ini dapat diekspresikan sebagai:

(8)

dengan asumsi bahwa . Penduga dari model ini mampu menjelaskan perbedaan atau variasi antar individu (*differences within individual*), karena model ini memungkinkan adanya perbedaan intersep pada setiap i .

Di sisi lain, REM dirumuskan sebagai :

(9)

dalam REM terdapat regresor yang konstan sebagai tambahan terhadap konstanta. merupakan gangguan acak yang menjelaskan observasi ke i dan bersifat konstan berdasarkan waktu. Dalam efek random, diasumsikan dalam bahwa tidak terdapat korelasi antara efek individu dan regresor lainnya. Asumsi ini pada umumnya menjadi dasar bagi pengujian Hausman yang menjadi pengujian dalam pemilihan FEM dan REM. Dalam pengujian Hausman diasumsikan bahwa tidak ada korelasi antara efek individu dan regressors. Jika hipotesis ditolak, maka FEM dikatakan lebih efisien dibandingkan REM.

3.3.3 Identifikasi Siklus Hidup Kawasan Pariwisata

Aplikasi model Siklus Hidup Butler dalam memprediksi suatu tahapan destinasi wisata pada dasarnya dapat dilakukan dengan mengamati perubahan yang terjadi pada karakteristik destinasi wisata yang diamati. Banyak model prediksi yang diusulkan, sebagaimana diringkas dalam Buhalis (2000) yang memprediksi tahapan siklus hidup dari perubahan beberapa kategori seperti: karakteristik tujuan, respon marketing, dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan (Gambar 3.2). Model prediksi Buhalis (2000) ini digunakan

pada penelitian ini dengan beberapa penyesuaian dengan mengacu pada kebijakan dari pemerintah mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (PP No.20 tahun 2011).

Guna memprediksi tahapan perkembangan pariwisata kabupaten Bintan dalam kerangka Model Siklus Hidup Kawasan Wisata. Beberapa kriteria, faktor data dan dasar perhitungannya kemudian disusun sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kriteria, faktor, sumber data dan dasar perhitungan dalam model prediksi Tahapan siklus hidup kawasan pariwisata Kab. Bintan.

Kriteria	Faktor	Pengukuran dan dasar perhitungan	Sumber data
Kriteria Ekonomi	Pengunjung	Jumlah kedatangan wisata	Data pemerintah/daerah, BPS dan dinas pariwisata
	Kepemilikan properti	% kepemilikan lokal dan kepemilikan pihak luar	Data pemerintah/daerah, BPS dan dinas pariwisata
	Belanja Pengunjung	Rata-rata pengeluaran per hari per pengunjung	Data pemerintah/daerah, BPS dan dinas pariwisata
	Tenaga Kerja	Jumlah posisi – Penuh waktu/paruh waktu	Data pemerintah/daerah, BPS dan dinas pariwisata
	Investasi	Jumlah dan jenis investasi	Data pemerintah/daerah, BPS dan dinas pariwisata
Kriteria Infrastruktur	Akomodasi dan produk yang ditawarkan	Jumlah atau besarnya bisnis (hotel, motel, resort)	Data pemerintah/daerah, BPS dan dinas pariwisata
	Produk pariwisata lainnya yang ditawarkan	jumlah dan besar – atraksi, operator tour, pusat informasi	Data pemerintah/daerah, BPS dan dinas pariwisata
	Fasilitas umum	Jumlah dan besarnya fasilitas umum	Data pemerintah/daerah, BPS dan dinas pariwisata
Kriteria Pemasaran	Pemasaran tujuan/produk	Branding, representasi orang dan aktivitas	Brosur, website dan data pemerintah/daerah
	Perilaku konsumen dan preferensi	Jumlah atraksi yang dikunjungi	Data pemerintah/daerah, dinas pariwisata, survey pengunjung
	Lama tinggal	rata-rata lama tinggal	Data pemerintah/daerah, dinas pariwisata, survey pengunjung
	Jenis pemesanan	Langsung atau melalui agensi	Penyedia jasa
	Akses	Jumlah penerbangan, keberadaan airport dan sarana transportasi	Dep. Perhubungan
Kriteria Sosial	Perilaku/perlakuan penduduk lokal terhadap wisatawan	Indeks	Koran, dan media massa
	Tenaga kerja lokal	% tenaga kerja keseluruhan per total	Data pemerintah/daerah, BPS, dinas tenaga kerja dan dinas pariwisata
	Penduduk lokal	Jumlah, pembangunan rumah, telekomunikasi	Data pemerintah/daerah, BPS dan dinas pariwisata
	Demografi wisatawan	Umur, asal dan jenis kelamin	Data pemerintah/daerah, BPS dan dinas pariwisata
Kriteria Lingkungan	Lingkungan alamiah	Luasan lahan	Data pemerintah/daerah, BPS, badan informasi spasial, Dept. Kehutanan dan LH
	Kualitas Lingkungan	Penilaian dampak lingkungan	Data pemerintah/daerah, BPS, Dept. Kehutanan dan LH



KRITERIA SITUASI	Tahapan Siklus Hidup					
	Eksplorasi	Involvement	Development	Consolidation	Stagnation	Decline
KARAKTERISTIK TUJUAN WISATA						
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Sedikit	Sedang	Banyak	Banyak sekali	Banyak	Banyak
Kecepatan pertumbuhan wisatawan	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi sekali	Tinggi sekali	Tinggi Sekali
Kapasitas akomodasi	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi sekali	Tinggi sekali	Tinggi Sekali
Tingkat okupansi	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Rendah
Tingkat harga pelayanan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Jenis pengunjung	Drifter	Drifter	Innovator	Innovator	Follower	Cheap-mass market
Kesan dan daya tarik	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Rendah
Perlakuan terhadap turis	Tamu	Tamu	Pelanggan	Pelanggan	Pelanggan	Orang asing
PEMASARAN						
Target pemasaran	Awareness	Menginformasikan	Mengajak	Mengajak	Mengajak	Loyalitas/pasar baru
Fokus strategi pemasaran	Eksplorasi	Eksansi	Penetrasi	Penetrasi	Mempertahankan	Memperkenalkan kembali
Biaya pemasaran	Meningkat	Meningkat	Besar	Besar	Turun	Konsolidasi
Produk	Dasar	Dasar	Mehingkat	Baik	Menurun	Mulai hilang
Promosi	Memperkenalkan	Memperkenalkan	Mengiklankan	Perdagangan Perjalanan	Perdagangan Perjalanan	Perdagangan Perjalanan
Harga	Tinggi	Tinggi	Semakin rendah	Semakin rendah	Rendah	Dibawah harga
Distribusi	Independen	Independen	Perdagangan perjalanan	Perdagangan perjalanan	Perdagangan perjalanan	Perdagangan perjalanan
EKONOMI						
Tenaga kerja	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Rendah
Pertukaran mata uang asing	Belum ada	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Rendah
Profitabilitas sektor swasta	Negatif	Sangat rendah	Meningkat	Sangat tinggi	Tinggi	Turun
Tingkat pendapatan penduduk setempat	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Penerimaan negara dan pajak	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Struktur ekonomi	Seimbang	Seimbang	Berorientasi wisatawan	Didominasi wisatawan	Bergantung wisatawan	Tidak seimbang dan cukup
Kebergantungan terhadap perantara impor	Tidak ada	Tidak ada	Rendah	Tinggi sekali	Tinggi	Tinggi
Inflasi	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Rendah
SOSIAL						
Tipe wisatawan	Allocentric	Allocentric	Allocentric	Midcentric	Psychocentric	Psychocentric
Hubungan antara wisatawan dan penduduk lokal	Euphoria	Euphoria	Apathy	Irritating	Antoginism	Final
Migrasi ke daerah tujuan wisata	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Rendah
Kriminalitas di tujuan wisata	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
Struktur keluarga	Tradisional	Tradisional	Terpengaruh	Modern	Modern	Modern
LINGKUNGAN						
Lingkungan dan lansekap	Murni	Murni	Bertambah baik	Tidak dihormati	Polusi	Rusak
Konservasi dan warisan budaya	Murni	Murni	Bertambah baik	Tidak dihormati	Turun	Rusak
Gangguan terhadap ekologi	Murni	Murni	Bertambah baik	Tidak dihormati	Turun	Rusak
Polusi terkait kegiatan pariwisata	Bisa diabaikan	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
Polusi air	Bisa diabaikan	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
Kemacetan dan lalu lintas	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Rendah
Erosi	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi

Gambar 3.2. Prediksi Siklus Hidup Kawasan Wisata (Tourism Area Life Cycle/TALC)
 Prediksi untuk setiap tahap dari siklus hidup kawasan wisata, mengenai karakteristik tujuan, strategi pemasaran, dan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan (Buhalis, 2000).

3.4.4 Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata

Proses hirarki analitik (*analytic hierarchy process AHP*) merupakan model yang dikembangkan oleh Saaty pada tahun 1970 dan banyak digunakan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan yang terdiri atas kriteria majemuk. Kemampuan model tersebut untuk menunjukkan peringkat keseluruhan dalam suatu kumpulan alternatif keputusannya, membuatnya cukup bisa diandalkan dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan. Hal yang sama bisa didapati saat menyusun sebuah strategi pengembangan kawasan pariwisata yang didasarkan pada kriteria majemuk pada model siklus hidup kawasan pariwisata.

A. Penyusunan Hirarki

Model AHP dilakukan untuk mencari prioritas dari alternatif-alternatif strategi dalam pengembangan kawasan pariwisata dalam setiap tahapan yang didapati pada analisis siklus hidup. Salah satu tahapan dalam AHP adalah dekomposisi hirarki permasalahan. Dalam hal ini, penyusunan hirarki yang akan digunakan dalam AHP didasarkan pada beberapa faktor yang digunakan dalam mengidentifikasi siklus hidup sebuah kawasan pariwisata dalam model Buttlar dan menggabungkannya dengan analisis pohon masalah.

Model AHP yang digunakan merupakan pengembangan model perencanaan atau *backward process* (Saaty, 1988), dimana dalam model standar umumnya dibagi menjadi 5 level, yaitu:

- Level 1: Tujuan (masa depan yang akan dituju)
- Level 2: skenario atau target yang diinginkan
- Level 3: hambatan pencapaian target
- Level 4: pelaku
- Level 5: kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mencapai target.

Dalam AHP yang disusun, digunakan 5 kriteria utama yang menentukan tahapan dalam siklus hidup yaitu: (1). Kriteria destinasi (2). Aspek Pemasaran. (3). Dampak Ekonomi (4). Dampak Sosial (5). Dampak Lingkungan. Hal ini sesuai model prediksi Siklus Hidup Kawasan Pariwisata yang diusulkan Buhalis

(2000). Kriteria ini dianggap sebagai skenario atau target yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

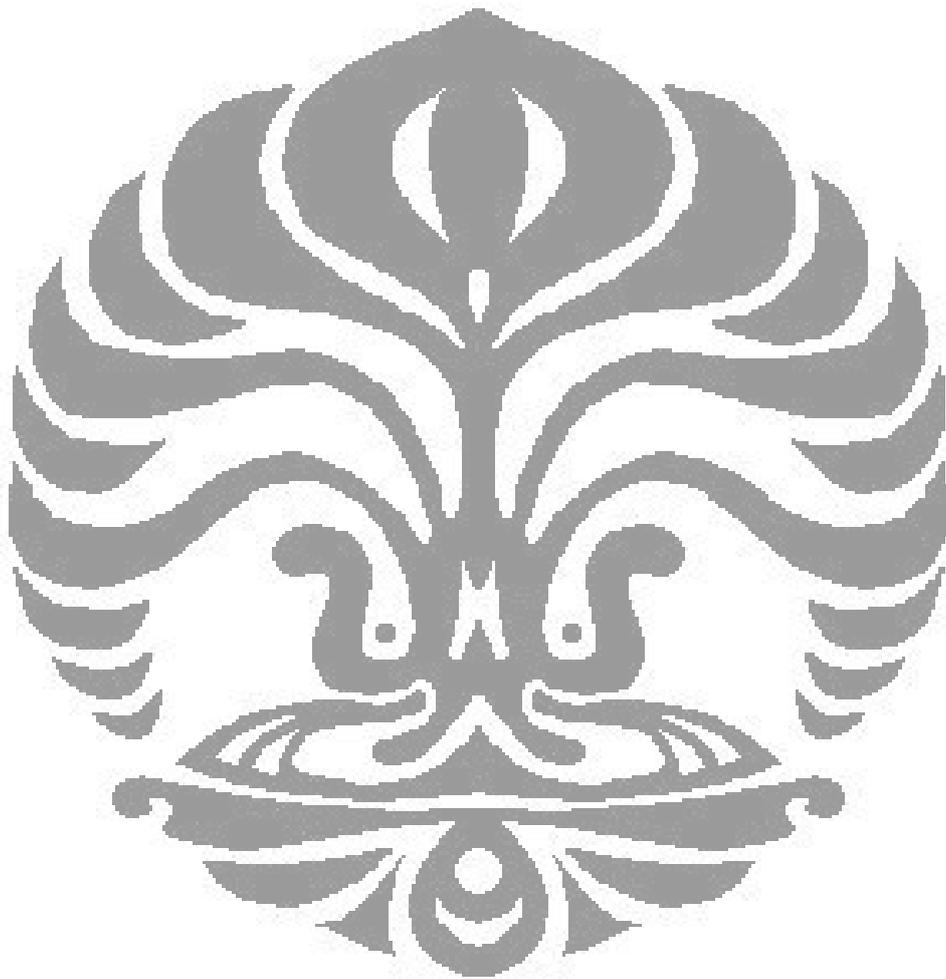
Masing-masing skenario pada dasarnya memiliki hambatan yang spesifik. Dalam hal ini, hambatan-hambatan ini direpresentasikan sebagai beberapa faktor yang mempengaruhi kelima kriteria tersebut disusun berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan suatu kawasan berdasarkan model siklus hidup kawasan pariwisata. Hirarki yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.3. Mengingat pembagian hambatan yang spesifik untuk setiap skenario dalam model ini terdapat hubungan yang tidak sempurna antara level 2 dan level 3 dari model perencanaan yang disusun, sehingga pada dasarnya model akhir yang disusun terkategori sebagai model perencanaan (*backward process*) tidak sempurna.

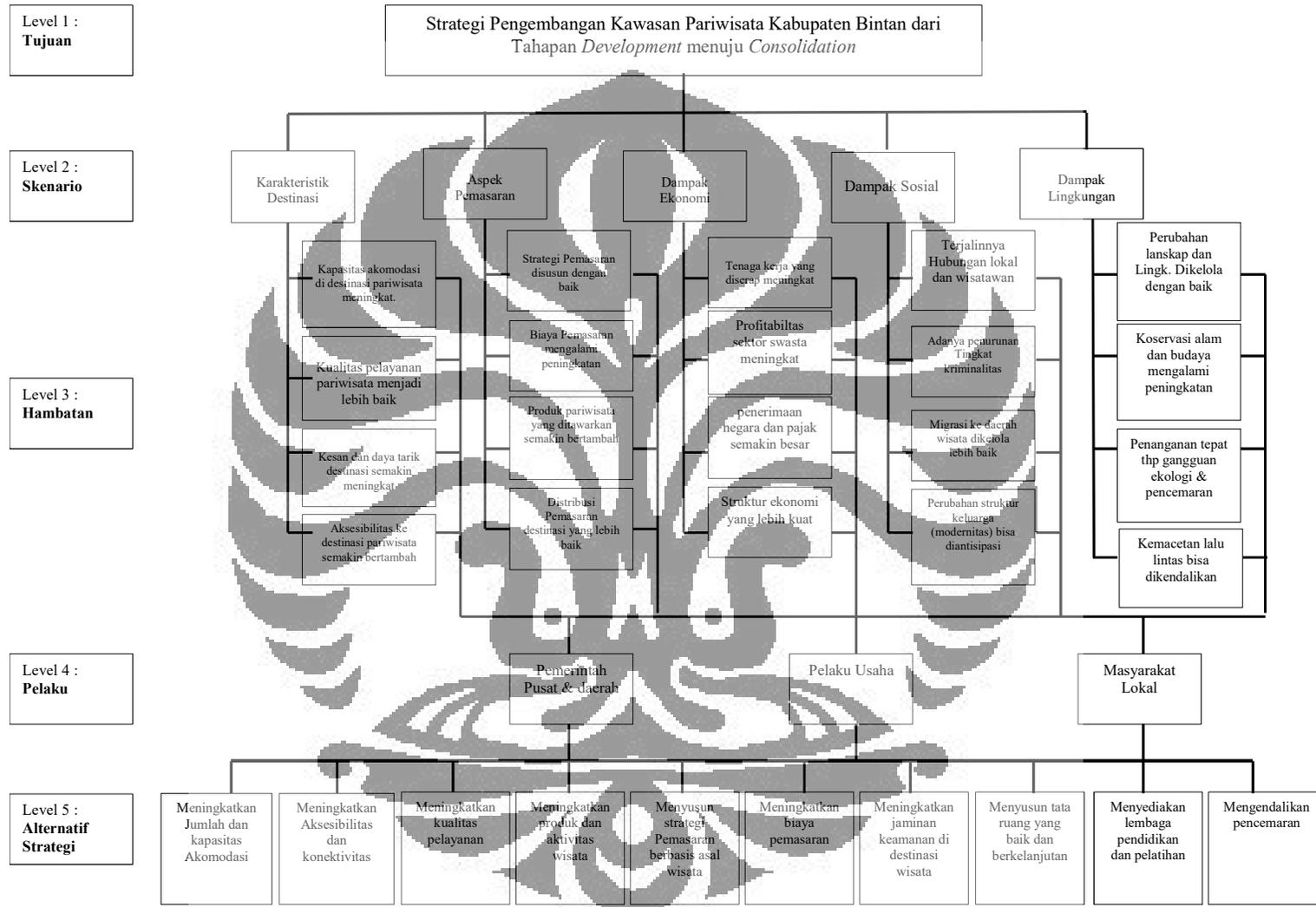
Dengan mengacu pada hirarki tersebut, selanjutnya disusun pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah kuisisioner yang akan diisi oleh responden. Responden yang pada penelitian ini merupakan individu yang diposisikan sebagai *expert* yang merupakan pihak berpengalaman pada bidang pariwisata dan mengerti benar permasalahan yang diajukan. Profil dan pertanyaan kuisisioner dapat dilihat pada bagian lampiran.

B. Evaluasi Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Kab. Bintan

Setelah dekomposisi, maka pada tahap selanjutnya yang dilakukan adalah pengisian persepsi dan prioritas. Pada penelitian ini, responden yang dipilih adalah 4 orang *experts* dengan profil responden sebagaimana terlihat pada lampiran.

Data hasil kuisisioner selanjutnya diolah dalam bentuk matriks yang disediakan piranti lunak *Expert Choice seri 11*, untuk kemudian dilakukan pemrosesan data sehingga diperoleh hasil berupa prioritas, sintesa dan sensitivitas dengan nilai konsistensinya masing-masing.





Gambar 3.3. Penyusunan Hirarki AHP Berdasarkan Siklus Hidup Kawasan Pariwisata (TALC)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk pelaksanaan penelitian Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bintan berdasarkan Model Siklus Hidup Kawasan Pariwisata (*Tourism Are Life Cycle*) ini diperlukan beberapa jenis data sekunder yang bersumber dari berbagai lembaga/institusi yang terkait dan berwenang, antara lain seperti yang terinci dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

No.	Jenis Data	Sumber Data
1.	PDRB Harga Berlaku dan Konstan Kab. Bintan Tahun 2010-2014	BPS Kab. Bintan
2.	PDRB Harga Berlaku dan Konstan Beberapa Provinsi Tahun 2010-2014	BPS Pusat
3.	PDB Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2010-2014	BPS Pusat
4.	Statistik Sektor Pariwisata Tahun 2010-2014	BPS Pusat
5.	Bintan Dalam Angka Tahun 2010-2014	BPS Kab. Bintan
6.	Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2010-2014	BPS Provinsi Kepulauan Riau
7.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	Kementerian Pariwisata
8.	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2022	Dinas Pariwisata Provinsi Kep. Riau
9.	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kab. Bintan Tahun 2015-2015	Dinas Pariwisata dan Budaya Kab. Bintan
10.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bintan Tahun 2011-2031	Bappeda Kab. Bintan

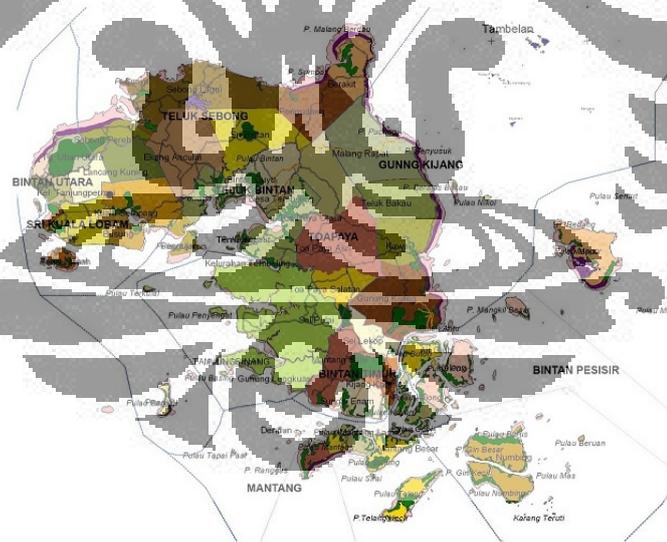
BAB 4

PROFIL DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Profil Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan—dulunya dikenal sebagai Kabupaten Kepulauan Riau—merupakan kabupaten yang secara geografis terdiri atas banyak sekali pulau-pulau kecil. Kabupaten Bintan terletak antara 0°6'17" Lintang Utara – 1° 34'52" Lintang Utara dan 1° 04'12'47" Bujur Timur di sebelah barat – 108° 2'27" Bujur Timur di sebelah Timur. Sejak tahun 2007, kabupaten ini mempunyai 10 kecamatan dan 51 desa. Secara administrasi kewilayahan, Kabupaten Bintan berbatasan dengan daerah-daerah lain sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Anambas
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- c) Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
- d) Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Bintan
Sumber : bintan.go.id, 2016

4.2 Profil Pariwisata Kabupaten Bintan

Sektor pariwisata merupakan sektor ekonomi utama Kabupaten Bintan. Keindahan alam, berupa gugusan pulau yang dikelilingi oleh sumber daya kelautan yang beragam menjadikan daerah Kabupaten Bintan sebagai daerah yang berpotensi menjadi destinasi wisata, baik lokal maupun mancanegara. Perkembangan sektor pariwisata ini menjadi sumber penggerak bagi tumbuhnya sektor-sektor yang lainnya, khususnya sektor jasa perhotelan dan usaha akomodasi lainnya. Saat ini sektor perhotelan di Kabupaten Bintan sudah berkembang, dimana hampir di semua kecamatan di Kabupaten ini memiliki fasilitas hotel baik yang berbintang maupun non bintang.

Tabel 4.1 Akomodasi Hotel di Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2014

Kecamatan	Hotel Berbintang	Hotel Non Bintang	TOTAL
Teluk Bintan		1	1
Bintan Utara		5	5
Teluk Sebong	9	1	10
Seri Kuala Lobam			
Bintan Timur		3	3
Gunung Kijang	3	12	15
Mantang			
Bintan Pesisir			
Toapaya		2	2
Tambelan			
TOTAL	12	24	36

Potensi pariwisata Kabupaten Bintan juga bisa terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang rata-rata mencapai 367 ribu orang dalam setiap tahunnya semenjak tahun 2010. Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan ini umumnya didominasi oleh wisatawan asing, dan hanya sebagian kecil yang termasuk ke dalam wisatawan lokal.

Secara umum menurut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 menjelaskan bahwa jenis pemanfaatan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Beberapa kawasan pariwisata yang ada saat ini tersebar di Kecamatan Teluk Sebong, yaitu Kawasan Wisata Terpadu Lagoi dan Kecamatan Gunung Kijang, yaitu Kawasan Wisata Pantai Trikora.

Tabel 4.2 Potensi Wisata di Kabupaten Bintan Sampai Tahun 2008

Kec. Teluk Seborg	Kawasan terpadu wisata Lagoi	Resort
	Desa Wisata Seborg Perih	Budaya
	Pantai Sakera	Pantai
	Kampung Sri Bintan	Ekowisata
	Makam Datok Panaon	Sejarah
	Tour Mangrove Sei Kecil	Alam
Kec. Teluk Bintan	Gunung Bintan	Alam
	Hutan Mangrove	Sungai
	Makam Panjang Pengujan	Sejarah
	Makam Bukit Batu	Sejarah
	Tembeling	Danau dan Agrowisata
Kec. Gunung Kijang	Pantai Trikora	Bahari
	Perkampungan Nelayan Kawal	Alam
	Tanjung Pesona	Tirta
	Bukit Kerang	Sejarah
	Bintan Agro Resort KM.36	Bahari
Kec. Bintan Timur	Gunung Lengkuas	Alam
	Taman Rekreasi Kota	Bahari
Kec. Tambelan	Makam Sultan Muhayat Syah	Sejarah
	Habitat Penyu	Budidaya
	Teluk Abik	Bahari
	Taman Laut	Bahari
	Pulau Bungin	Alam
Bintan Pesisir	Pulau Mapur	Bahari
	Pulau Nikoi	Bahari
	Pulau Mangkil	Bahari
Toapaya	Perkebunan Buah Naga	Agrowisata
	Perkebunan Nenas	Agrowisata
Bintan Utara	Pantai Sakera	Bahari
	Pantai Sungai Lepah	Bahari
	Makam Hang Nadim	Sejarah

Sumber : RPJMD Kabupaten Bintan 2011-2015

Secara potensi pariwisata, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 menyebutkan potensi pariwisata di Kabupaten Bintan terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan minat khusus yang tersebar di berbagai kecamatan (Tabel 4.2). Secara keseluruhan obyek wisata di Kabupaten Bintan berjumlah 19 obyek wisata baik yang sudah maupun yang sedang dikembangkan. Meskipun demikian, masih banyak lagi potensi pariwisata di Kabupaten Bintan yang belum mendapatkan penanganan dan sentuhan dari investor sehingga secara ekonomi dan sosial belum memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun bagi daerah.

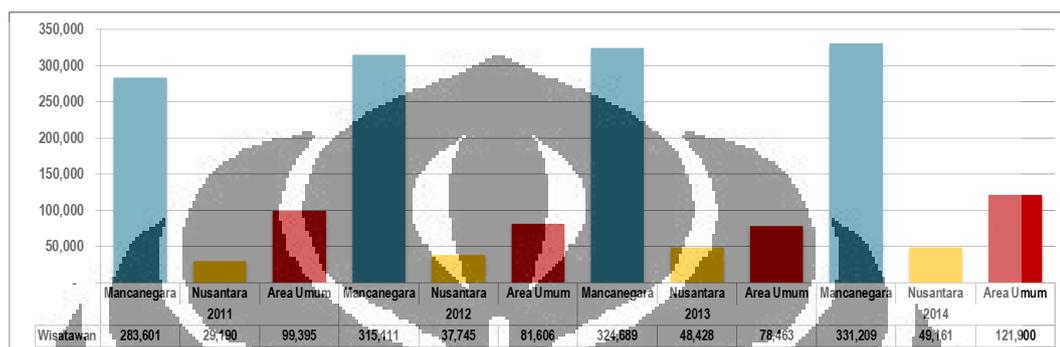
**Tabel 4.3 Jenis dan Daya Tarik Objek Wisata di Kabupaten
Bintan 2003-2007**

Objek Wisata	Lokasi Wisata	Jenis Wisata	Daya Tarik	Kegiatan Wisata	Keterangan
Tanjung Berakit	Pantai	Alam	Keindahan alam	Menikmati keindahan alam	
Kota lama Tanjung Uban	Kota	City tour	Peninggalan sejarah	Menikmati keindahan kota	Fasilitas terbatas
Makam Hang Nadim	Makam	Sejarah/ budaya	Peninggalan sejarah	Ziarah	Belum ada fasilitas, jalan tanah
Pulau Beralas Bakau dan Pulau Beralas Pasir	Pulau dan Pantai	Alam	Kehidupan masyarakat	Menikmati keindahan alam	Dalam rencana
Perkebunan Nanas	Perkebunan	Agrowisata	Keindahan alam	Kunjungan dan hiking	Dalam rencana
Pantai Tambelan	Pantai dan Taman Laut	Alam	Keindahan alam dan penangkaran penyu	Menikmati keindahan alam	Fasilitas terbatas
Makam Sultan Muhyatsyah	Makam	Budaya	Peninggalan sejarah	Ziarah dan kegiatan keagamaan	Fasilitas terbatas
Pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Bintan	Pantai	Alam	Keindahan alam	Menikmati keindahan alam	Fasilitas terbatas
Danau Wisata	Sekitar danau	Alam	Rekreasi	Olahraga air	Dalam rencana
Makam Panjang	Makam	Budaya	Peninggalan sejarah	Ziarah dan keagamaan	Fasilitas terbatas dan jalan tanah
Makam Datuk Panaon	Makam	Budaya	Peninggalan sejarah	Ziarah dan keagamaan	Fasilitas terbatas dan jalan tanah
Makam Bukit Batu	Makam	Budaya	Peninggalan sejarah	Ziarah dan keagamaan	Fasilitas terbatas dan jalan tanah

Sumber : RPJMD Kabupaten Bintan 2011-2015

Tren kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Bintan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami jumlah peningkatan. Wisatawan yang datang menuju Kabupaten Bintan lebih didominasi oleh wisatawan asing, yakni hampir 90 persen dari total wisatawan yang datang menuju Kabupaten

Bintan. Umumnya wisatawan asing yang berwisata di Kabupaten Bintan antara lain dari Singapura, Tiongkok, Jerman, Inggris, Malaysia, Australia. Sampai dengan tahun 2014 jumlah wisatawan Kabupaten Bintan mencapai 380.370 wisatawan yang terdiri dari 331.209 wisatawan asing dan 49.161 wisatawan nusantara.

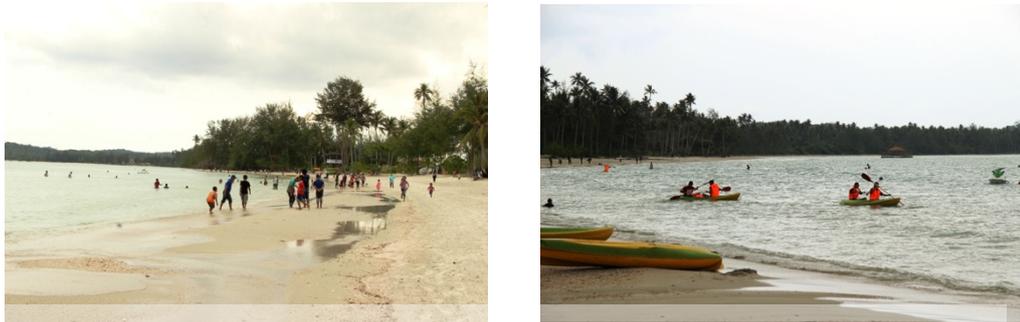


Gambar 4.2 Jumlah Kunjungan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, 2015

4.2.1 Pariwisata Terpadu Lagoi

Kawasan wisata terpadu di Teluk Sebong, Desa Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kawasan itu memiliki sejumlah fasilitas, antara lain terminal ferry internasional, terminal marina, terminal pesawat terbang laut, tempat kunjungan kapal pesiar, pelayanan imigrasi terpadu, sarana wisata air, pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan villa. Menurut Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan menyebutkan bahwa dilahan seluas 23.000 hektar ini terdapat 7 hotel bertaraf internasional, 2 resort dan 3 lapangan golf bertaraf internasional dengan 36 hole. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata penyumbang 60,70% Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan atau sekitar 81 miliar rupiah.



Gambar 4.3 Aktivitas Wisatawan di Area Objek Wisata Lagoi Bay

Sumber: Hasil Pengolahan, 2016

Akses langsung menuju Singapura dari kawasan wisata Lagoi adalah ke pelabuhan Bandara Bentan Telani (BBT) dari lagoi Singapura dapat ditempuh lebih kurang 40 menit saja dan setiap hari ada 5-7 kali kapal ferry yang melayani Singapura – Lagoi. (Bintan) pulang pergi dan jika weekend, frekuensi pelayaran yang dilayari bisa mencapai 10 kali/hari.



Gambar 4.4 Akses Utama Pariwisata Bintan Terhadap Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

4.2.2 Destinasi Wisata Trikora

Destinasi wisata Trikora merupakan destinasi wisata pantai. Berbeda dengan pariwisata terpadu Lagoi yang bersifat eksklusif. Destinasi wisata pantai Trikora merupakan salah satu wisata alternative di Kabupaten Bintan yang dapat dikatakan lebih murah dan dapat mudah diakses oleh wisatawan. Kondisi pantai

Trikora memiliki ombak yang tidak membahayakan bagi wisatawan. Keasrian dan kebersihan pantai Trikora juga sangat terjaga. Secara umum sarana dan prasarana di pantai Trikora sudah tersedia dengan baik, seperti akses jalan, toilet, warung-warung, dan lain-lain.



Gambar 4.5 Kondisi Pantai Trikora Kabupaten Bintan

Sumber: Hasil Pengolahan, 2016

Pantai Trikora merupakan destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal dalam negeri karena terbuka untuk umum dan lebih murah. Pantai Trikora terletak di Desa Malang Rapat Kecamatan gunung Kijang, sekitar 45 kilometer arah timur Kota Tanjungpinang. Pantai Trikora memiliki panjang sekitar 25 kilometer dan berpasir putih, udaranya sejuk karena ditumbuhi pohon bakau dan kelapa. Terdapat beberapa warung kecil menjual minuman dan makanan (*seafood*) di sepanjang pantai.

4.3 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian

Seiring dengan meningkatnya Produk Domestik Regional (PDRB) Kabupaten Bintan sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2010 sektor yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Bintan yakni sektor industri pengolahan lebih dari 30 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2014 kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Bintan mencapai 32,57 persen atau sebesar Rp. 466.964.721,05 juta dari total PDRB Kabupaten Bintan sebesar Rp.14.337.265 juta.

Selain sektor pengolahan industri yang memberikan kontribusi yang signifikan, juga sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Bintan. Namun demikian sampai dengan

tahun terakhir sektor ini mengalami penurunan kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Bintan seiring dengan adanya kebijakan penutupan beberapa kegiatan pertambangan dan penggalian di Kabupaten Bintan. Pada tahun 2012 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Bintan pada tahun 2012 sebesar 14,16 persen dari total PDRB Kabupaten Bintan, turun menjadi 13,28 persen pada tahun 2013 dan sebesar 13,82 persen pada tahun 2014. Seiring dengan getolnya pemerintah Kabupaten Bintan dalam memajukan sektor pariwisatanya memberikan dampak yang signifikan terhadap sumbangan sektor pariwisata bagi perekonomian Kabupaten Bintan sejak tahun 2010. Dalam format sektoral menurut BPS tahun 2010, sektor pariwisata meliputi lapangan usaha yang mencakup lapangan usaha (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (H) Transportasi dan pergudangan, (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan (R, S, T, U) jasa lainnya.

Jika melihat sumbangan sektor pariwisata pada perekonomian Kabupaten Bintan selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan kontribusinya. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pariwisata mencapai 12,30 persen, meningkat menjadi 12,72 persen pada tahun 2011. Sampai dengan tahun 2012 total kontribusi sektor pariwisata Kabupaten Bintan mencapai 12,92 persen atau sebesar Rp.1.462.692,32 juta dari total PDRB Kabupaten Bintan sebesar Rp. 11.321.148,00 juta. Kemudian pada tahun 2013 total kontribusi sektor pariwisatanya meningkat menjadi 13,34 persen (Rp.1.655.201,05 juta) dari total PDRB sebesar Rp.12.407.804,00 juta. Sampai dengan tahun 2014 kontribusi sektor pariwisata sebesar 15,19 persen lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp.2.177.830,55 dengan total PDRB Kabupaten Bintan sebesar Rp.14.337.265,00 juta.

4.4 Pertumbuhan Sektor Pariwisata Kabupaten Bintan

Selama lima tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, rata-rata laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bintan mencapai 5,82 persen setiap tahunnya. Tren laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bintan selama lima tahun tersebut menunjukkan peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bintan sebesar 5,61

persen, mengalami penurunan laju pertumbuhan perekonomian sampai dengan tahun 2013 yakni pada tahun 2012 sebesar 5,44 persen dan pada tahun 2013 sebesar 5,08 persen. Namun demikian pada tahun 2014 secara signifikan mengalami peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bintan mencapai 7,13 persen.

**Tabel 4.4 Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014
(Dalam Persen)**

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.06	5.01	5.02	5.2	5.02
B	Pertambangan dan Penggalian	13.43	14.02	14.16	13.28	13.82
C	Industri Pengolahan	31.08	31.52	32.66	33.1	32.57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.12	0.12	0.12	0.09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
F	Konstruksi	11.84	12.46	12.5	13.22	13.41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.86	7.29	7.29	7.28	7.72
H	Transportasi dan Pergudangan	1.67	1.61	1.62	1.74	1.83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.68	3.66	3.84	4.15	5.47
J	Informasi dan Komunikasi	1.19	1.13	1.1	1.08	1.02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.33	1.32	1.27	1.32	1.25
L	Real Estate	0.93	0.93	0.92	0.93	0.91
M,N	Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.82	1.79	1.85	2.03	2.02
P	Jasa Pendidikan	1.56	1.49	1.58	1.61	1.56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.77	0.76	0.75	0.78	0.76
R, S, T, U	Jasa lainnya	0.18	0.16	0.17	0.17	0.17
Total		100	100	100	100	100
Sektor Pariwisata		12.39	12.72	12.92	13.34	15.19

Sumber: Hasil Pengolahan, 2016

Pada tahun 2014 sektor perekonomian yang memiliki nilai pertumbuhan di atas dua digit antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (10,74 persen), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,62 persen), dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,92 persen).

Meskipun sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2011 memiliki angka pertumbuhan sebesar 11,7 persen namun dalam perkembangannya memiliki pola penurunan angka pertumbuhannya. Seiring dengan kebijakan penutupan beberapa kegiatan pertambangan dan penggalian yang menyebabkan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan angka pertumbuhan. Sampai dengan tahun 2014 angka pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Bintan hanya mencapai 7,13 persen, bahkan pada tahun 2013 angka pertumbuhannya hanya mencapai 4,45 persen.

Tabel 4.5 Pertumbuhan Sektor Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2011-2014 (Dalam Persen)

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.52	4.76	5.5	10.74
B	Pertambangan dan Penggalian	11.7	6.51	4.45	7.13
C	Industri Pengolahan	6.02	7.29	5.02	7.8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.12	5.6	4.79	5.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.75	6.51	6.59	6.03
F	Konstruksi	4.23	5.38	9.11	9.74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.63	7.51	7.42	10.62
H	Transportasi dan Pergudangan	5.6	5.91	8.72	9.03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.56	6.96	9.29	11.92
J	Informasi dan Komunikasi	7.41	6.38	4.52	5.87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.35	5.71	7.84	3.14
L	Real Estate	6.7	4.75	5.58	6.39
M,N	Jasa Perusahaan	11.11	10	0	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.7	5.7	6.51	7.92
P	Jasa Pendidikan	4.32	7.43	4.94	6.27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.8	5.88	5.92	6.86
R, S, T, U	Jasa lainnya	1.35	4.06	3.65	12.71
	Total	5.61	5.44	5.08	7.13
	Sektor Pariwisata	7.25	7.09	8.1	10.83

Sumber: Hasil Pengolahan, 2016

4.5 Analisa *Location Quotient* (LQ) Sektor Pariwisata Kabupaten Bintan

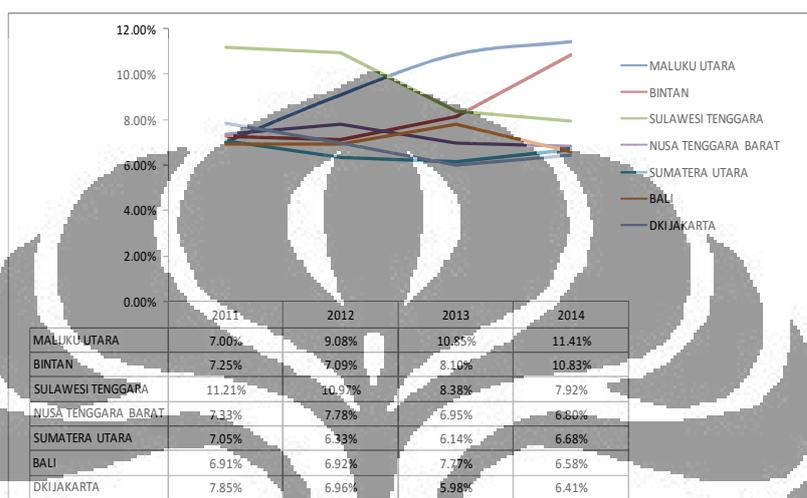
Analisis *location quotient* (LQ) ini yakni untuk mengetahui sektor basis atau sektor non basis pada sektor pariwisata di Kabupaten Bintan. Sektor basis adalah sektor-sektor yang mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar di daerah sendiri, bahkan dapat mengekspor barang dan jasanya ke luar daerah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor yang hanya mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar daerahnya sendiri, bahkan harus mengimpor dari luar daerah yang bersangkutan.

Jika Kabupaten Bintan dibandingkan dengan daerah lainnya yang terpilih (memiliki daya tarik wisata) maka Kabupaten Bintan dan Provinsi Maluku Utara memiliki pola pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata yang mirip. Antara Kabupaten Bintan dan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir memiliki pola peningkatan nilai tambah pada sektor pariwisata yang tinggi. Sedangkan daerah lainnya memiliki kecenderungan pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata yang relatif stagnan bila dibandingkan dengan Kabupaten Bintan dan Provinsi Maluku Utara.

Antara Kabupaten Bintan dan Provinsi Maluku Utara memiliki pola peningkatan pertumbuhan nilai tambah pada sektor pariwisata. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, rata-rata pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata Kabupaten Bintan sebesar 8,32 persen per tahun sedikit lebih rendah dari pada angka pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata Provinsi Maluku Utara sebesar 9,77 persen per tahun. Namun demikian bila dilihat secara cermat, pola peningkatan pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata Provinsi Maluku Utara mengalami perlambatan pertumbuhan sejak tahun 2013. Berbeda dengan Kabupaten Bintan pada tahun 2013 mengalami akselerasi pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata.

Pola pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan pola perlambatan atau penurunan pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata. Pada tahun 2011 angka pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata mencapai 11,21 persen, menurun menjadi 10,97 persen pada tahun 2012, kemudian mengalami

perlambatan sebesar 8,38 persen pada tahun 2013, dan akhirnya sebesar 7,92 persen pada tahun 2014. Hal yang sama juga terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana pada tahun 2011 angka pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata mencapai 7,33 persen menjadi 6,80 persen pada tahun 2014. Hal senada juga dialami oleh Provinsi Sumatera Utara, Bali, dan DKI Jakarta.



Gambar 4.6 Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Pariwisata di Beberapa Wilayah Tahun 2011-2014

Sumber: Hasil Pengolahan, 2016

Jika dilihat berdasarkan PDRB ADHB maka Kabupaten Bintan terhadap Provinsi Kepulauan Riau memiliki spesialisasi khusus pada sektor pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai indeks Krugman yang bernilai lebih dari satu dari tahun 2010-2014. Jika dilihat berdasarkan PDRB ADHK2010 maka Kabupaten Bintan tidak memiliki spesialisasi khusus pada sektor pariwisata. Hal ini dapat dilihat pada nilai indeks Krugman yang kurang dari satu sejak tahun 2010-2014. Nilai indeks yang lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa struktur dan pola spesialisasi perekonomian Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau tidak jauh berbeda. Namun demikian indeks nilai Krugman dari tahun 2010-2014 menunjukkan pola peningkatan nilai indeks Krugman yang terus bertambah dimana Kabupaten Bintan memiliki potensi spesialisasi khusus pada sektor pariwisata terhadap Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 4.6 Analisa LQ Sektor Pariwisata Tahun 2010-2014 : Kabupaten
Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau**

LQ Pariwisata		Tahun	Nilai
Bintan terhadap Kepri	PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku	2010	1.04
		2011	1.07
		2012	1.10
		2013	1.15
		2014	1.17
	PDRB/PDB Atas Dasar Harga Konstan	2010	0.66
		2011	0.67
		2012	0.68
		2013	0.71
		2014	0.73
Bintan terhadap Nasional	PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku	2010	0.69
		2011	0.70
		2012	0.70
		2013	0.70
		2014	0.75
	PDRB/PDB Atas Dasar Harga Konstan	2010	0.69
		2011	0.68
		2012	0.68
		2013	0.69
		2014	0.70
Kepri terhadap Nasional	PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku	2010	0.55
		2011	0.55
		2012	0.55
		2013	0.53
		2014	0.57
	PDRB/PDB Atas Dasar Harga Konstan	2010	0.89
		2011	0.86
		2012	0.86
		2013	0.85
		2014	0.84

Sumber: Hasil Pengolahan, 2016

Hal yang sama juga terjadi pada analisa LQ antara Kabupaten Bintan terhadap Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nasional. Dengan kata lain bahwa Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau sama-sama tidak memiliki spesialisasi khusus pada sektor pariwisata terhadap nasional. Namun demikian pola nilai indeks Krugman yang berbeda antara Kabupaten Bintan terhadap Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nasional. Indeks Nilai Krugman yang dimiliki Kabupaten Bintan terhadap Nasional kecenderungannya

terus bertambah naik sedangkan nilai indeks Krugman Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nasional kecenderungannya menurun.

Tabel 4.6 menunjukkan hasil perhitungan analisa spesialisasi regional dengan menggunakan Indeks Krugman, untuk Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 – 2014.

Tabel 4.7 Analisa LQ Sektor Pariwisata Tahun 2010-2014 untuk Provinsi Bali, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara)

LQ Pariwisata		Tahun	Nilai
LQ Pariwisata Bali terhadap Nasional	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-HB)	2010	1.67
		2011	1.72
		2012	1.77
		2013	1.79
	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB-HK)	2014	1.82
		2010	1.67
		2011	1.64
		2012	1.64
LQ Pariwisata DKI Jakarta terhadap Nasional	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-HB)	2013	1.65
		2014	1.64
		2010	1.26
		2011	1.28
	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB-HK)	2012	1.27
		2013	1.27
		2014	1.27
		2010	1.26
LQ Pariwisata Sumut terhadap Nasional	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-HB)	2011	1.25
		2012	1.25
		2013	1.25
		2014	1.24
	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB-HK)	2010	1.09
		2011	1.10
		2012	1.12
		2013	1.09
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB-HK)	2014	1.08	
	2010	1.09	
	2011	1.08	
	2012	1.09	
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB-HK)	2013	1.09	
	2014	1.09	

Sumber: Hasil Pengolahan, 2016

Dari hasil analisa untuk daerah lain sebagaimana terlihat pada Tabel 4.7 menunjukan bahwa indeks nilai Krugman dari Provinsi Bali, Sumatera Utara dan DKI Jakarta memiliki nilai indeks Krugman lebih dari satu. Dengan kata lain

ketiga daerah tersebut memiliki spesialisasi khusus pada sektor pariwisata terhadap nasional. Namun demikian nilai indeks Krugman dari ketiga daerah tersebut menunjukkan stagnasi nilai indeksnya.

4.6 Hasil Analisa *Shift-share* (SS) Sektor Pariwisata

Potensi pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata Kabupaten Bintan dapat dianalisis dengan menggunakan metode dekomposisi analisa *shift-share*, dimana pertumbuhan merupakan fungsi identitas dari *regional share* (R), *proportional shift* (Sp) dan *differential shift* (Sd). Dalam penelitian ini analisis *shift-share* digunakan sebagai salah satu model yang memiliki kelebihan dalam melihat pola pertumbuhan daerah dan besarnya angka pertumbuhan yang seharusnya dapat dicapai atau terjadi.

Analisa *shift-share* Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkannya terhadap perekonomian Nasional. Berikut ini, adalah metode dan hasil perhitungan analisa *shift-share* perekonomian Kabupaten Bintan dengan rentang waktu antara tahun 2010 dan 2014.

4.6.1 Analisa *Shift-Share* Sektor Pariwisata Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau

Peneliti menganalisa *shift-share* Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkan terhadap perekonomian Nasional. Berikut ini, adalah metode dan hasil perhitungan analisa *shift-share* sektor pariwisata Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau dengan rentang waktu antara tahun 2010 dan 2014.

Dari hasil analisa *shift-share* seperti yang terlihat pada Tabel 4.8 ditemukan bahwa pertumbuhan (G) Perekonomian Kabupaten Bintan sebesar 2.759,41. Apabila Perekonomian Kabupaten Bintan tumbuh seperti Nasional maka *regional share* (R) Kabupaten Bintan sebesar 2.220,17. Sedangkan selisih antara pertumbuhan aktual Kabupaten Bintan dengan pertumbuhan nasional sebesar 539,24 menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Bintan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan nasional.

Hal senada juga terjadi pada sektor pariwisata Kabupaten Bintan terhadap sektor pariwisata Nasional. Pertumbuhan (G) sektor pariwisata Kabupaten Bintan

sebesar 507,65. Apabila sektor pariwisata Kabupaten Bintan tumbuh seperti sektor pariwisata nasional maka *regional share* (R) Kabupaten Bintan sebesar 337,22. Sedangkan selisih antara pertumbuhan aktual sektor pariwisata Kabupaten Bintan dengan pertumbuhan sektor pariwisata nasional sebesar 170,43 menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Bintan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

Pertumbuhan (G) sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3.068,40. Apabila sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tumbuh seperti sektor pariwisata nasional maka *regional share* (R) Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2.759,52. Sedangkan selisih antara pertumbuhan aktual sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan sektor pariwisata nasional sebesar 308,88 menunjukkan bahwa sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

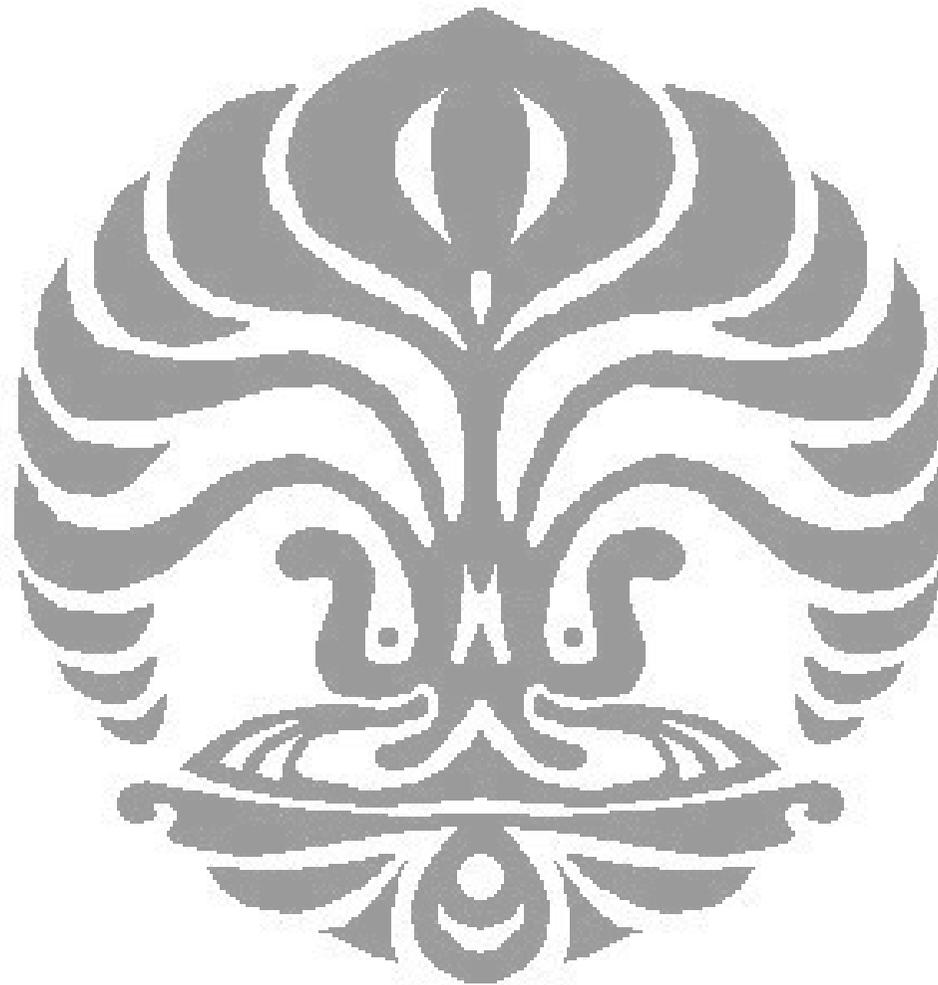
4.6.2 Analisa *Shift-Share* Sektor Pariwisata Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Sumatera Utara

Peneliti menganalisa *shift-share* Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan membandingkannya terhadap perekonomian Nasional. Berikut ini adalah metode dan hasil perhitungan analisa *shift-share* perekonomian beberapa provinsi terpilih dengan rentang waktu antara tahun 2010 dan 2014.

Pertumbuhan (G) sektor pariwisata Provinsi Bali sebesar 10.796,37. Apabila sektor pariwisata Provinsi Bali tumbuh seperti sektor pariwisata nasional maka *regional share* (R) Provinsi Bali sebesar 8.611,59. Sedangkan selisih antara pertumbuhan aktual sektor pariwisata Provinsi Bali dengan pertumbuhan sektor pariwisata nasional sebesar 2.184,78 menunjukkan bahwa sektor pariwisata Provinsi Bali tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

Tabel 4.8 Analisa Shift-Share Sektor Pariwisata Tahun 2010-2014 Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau

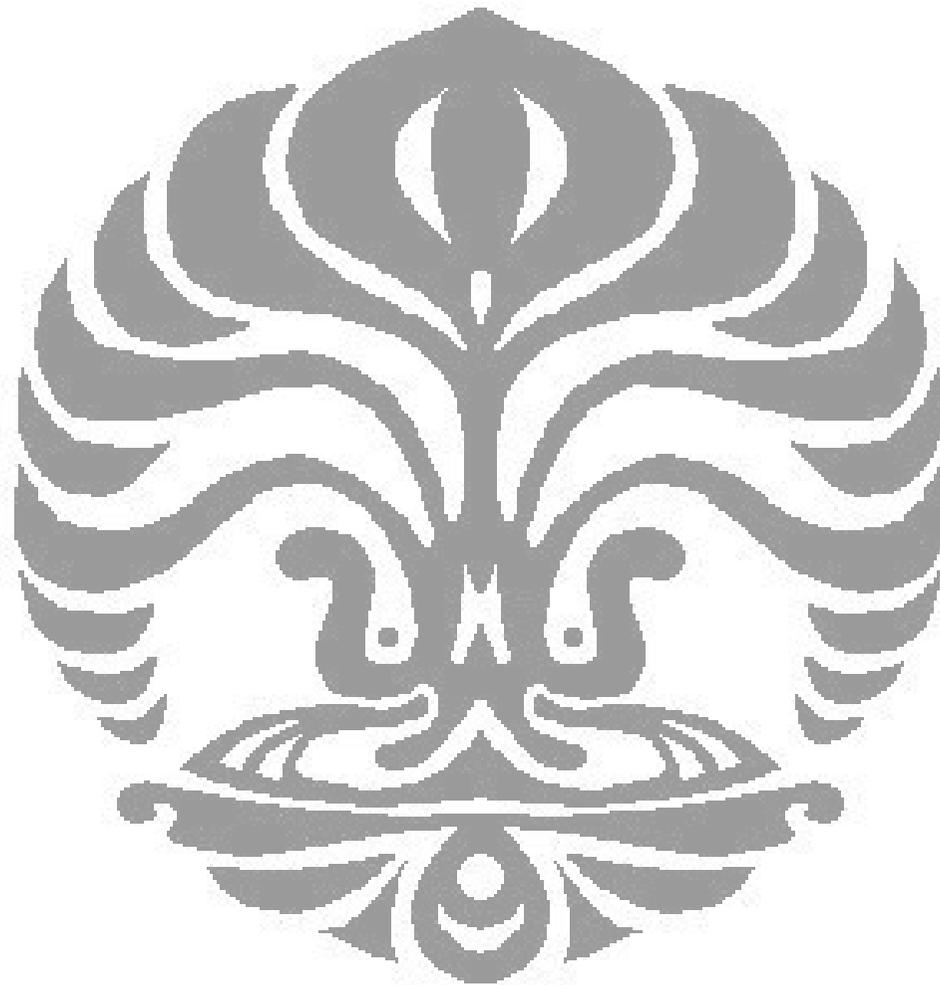
Lapangan Usaha	Perhitungan Analisa Shift-Share							
	Bintan terhadap Kepulauan Riau				Bintan terhadap Nasional			
	R	Sp	Sd	G	R	Sp	Sd	G
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	167.892	-84.260	77.178	160.810	137.762	-37.978	61.026	160.810
B Pertambangan dan Penggalian	445.579	257.498	-217.927	485.150	365.617	-205.397	324.930	485.150
C Industri Pengolahan	1030.916	-33.295	-23.061	974.560	845.912	-82.461	211.109	974.560
D Pengadaan Listrik dan Gas	3.637	2.625	-3.051	3.210	2.984	0.509	-0.283	3.210
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.649	-0.387	0.348	1.610	1.353	-0.357	0.614	1.610
F Konstruksi	392.710	-24.639	38.530	406.600	322.235	88.854	-4.489	406.600
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	227.688	-13.146	66.058	280.600	186.828	18.149	75.623	280.600
H Transportasi dan Pergudangan	55.514	-13.498	17.113	59.430	45.552	15.081	-1.203	59.430
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	121.918	51.299	9.943	163.160	100.039	15.045	48.076	163.160
J Informasi dan Komunikasi	39.586	23.771	-28.957	34.400	32.482	32.728	-30.810	34.400
K Jasa Keuangan dan Asuransi	44.142	59.000	-68.522	34.620	36.220	12.243	-13.844	34.620
L Real Estate	30.788	7.389	-12.328	25.850	25.263	4.456	-3.869	25.850
M,N Jasa Perusahaan	0.027	0.000	-0.008	0.020	0.022	0.013	-0.015	0.020
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	60.423	10.244	-11.807	58.860	49.580	-21.528	30.808	58.860
P Jasa Pendidikan	51.817	8.757	-18.044	42.530	42.518	10.136	-10.124	42.530
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25.593	5.772	-7.825	23.540	21.001	10.531	-7.992	23.540
R, S, T, U Jasa lainnya	51.849	-0.236	-1.153	4.460	4.799	1.478	-1.818	4.460
Total PDRB/ PDB (dalam milyar rupiah)	2705.728813	237.194182	-183.512951	2759.41	2220.168972	-138.4979905	677.739018	2759.41
	Growth (G)	:		2759.410	Growth (G)	:		2759.410
	Regional Share (R)	:		2705.729	Regional Share (R)	:		2220.169
	Shift (S)	:		-53.681	Shift (S)	:		539.241



Tabel 4.9 Analisa Shift-Share Sektor Pariwisata Tahun 2010-2014 Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Sumatera Utara

Lapangan Usaha	Perhitungan Analisa Shift-Share											
	Bali terhadap Nasional				DKI Jakarta terhadap Nasional				Sumut terhadap Nasional			
	R	Sp	Sd	G	R	Sp	Sd	G	R	Sp	Sd	G
A	4018.509	-1107.824	-843.771	2066.914	318.536	-87.814	-151.761	78.961	21365.447	-5890.037	3233.060	18708.470
B	283.150	-159.068	288.109	412.190	725.139	-407.369	-244.728	73.041	833.116	-468.029	1787.943	2153.030
C	1638.830	-159.755	195.378	1674.452	38118.449	-3715.835	-8936.945	25465.669	17614.760	-1717.109	-3396.511	12501.140
D	47.969	8.183	10.069	66.221	821.176	140.091	-506.305	454.963	125.150	21.350	-96.030	50.470
E	59.754	-15.770	-2.375	41.609	137.095	56.181	-16.896	84.018	79.046	-20.861	21.696	79.880
F	2077.835	572.946	469.568	3120.349	37636.161	10377.866	-11146.575	36867.452	9651.502	2661.324	447.644	12760.470
G	2035.867	197.770	300.529	2534.166	45151.281	4386.118	-1534.276	48003.124	14122.532	1371.901	1767.407	17261.840
H	1731.905	573.366	-242.407	2062.864	7455.660	2468.279	1993.139	11917.079	3521.299	1165.765	318.426	5005.490
I	4475.546	673.981	666.177	5814.803	13449.339	2022.657	-336.526	15135.469	1732.176	260.503	295.980	2288.660
J	1468.204	1479.316	-973.369	1974.151	20219.315	20372.344	7010.691	47602.350	1864.248	1878.357	-886.975	2855.630
K	919.647	310.857	319.755	1550.259	27643.917	9344.136	-6402.830	30585.223	2416.436	816.798	190.136	3423.370
L	1136.306	200.440	6.254	1343.000	18578.427	3277.160	-2856.494	18999.092	3199.900	564.449	553.391	4317.740
M,N	264.897	149.535	-161.559	252.873	18213.124	10281.400	-2466.269	26028.255	677.135	382.246	-146.372	913.010
O	1300.041	-564.492	1380.036	2115.583	13794.697	-5989.805	-1453.775	16351.117	2799.992	-1215.787	1038.804	2623.010
P	1118.927	266.747	423.145	1808.819	13794.722	3288.591	-5528.515	11554.997	1670.780	398.305	-281.716	1787.370
Q	464.465	232.920	108.106	805.491	4097.310	2054.723	-785.067	5366.966	624.379	313.114	365.357	1302.850
R, S, T, U	368.273	113.436	-97.169	384.540	8329.312	2565.602	3702.786	14597.701	377.294	116.214	38.112	531.620
Total PDRB/ PDB (dalam milyar rupiah)	23410.122	2771.688	1846.476	28028.286	268483.661	60341.961	-29660.144	299165.478	82675.192	638.506	5250.352	88564.050
				Growth (G)				299165.478	Growth (G)			88564.050
				Regional Share (R)				268483.661	Regional Share (R)			82675.192
				Shift (S)				30681.817	Shift (S)			5888.858

Sumber: Hasil Pengolahan, 2016



Pertumbuhan (G) sektor pariwisata Provinsi DKI Jakarta sebesar 86.953,37. Apabila sektor pariwisata Provinsi DKI Jakarta tumbuh seperti sektor pariwisata nasional maka *regional share* (R) Provinsi DKI Jakarta sebesar 74.385,59. Sedangkan selisih antara pertumbuhan aktual sektor pariwisata Provinsi DKI Jakarta dengan pertumbuhan sektor pariwisata nasional sebesar 15.267,78 menunjukkan bahwa sektor pariwisata Provinsi DKI Jakarta tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

Pertumbuhan (G) sektor pariwisata Provinsi Sumatera Utara sebesar 25.087,61. Apabila sektor pariwisata Provinsi Sumatera Utara tumbuh seperti sektor pariwisata nasional maka *regional share* (R) Provinsi Sumatera Utara sebesar 19.753,30. Sedangkan selisih antara pertumbuhan aktual sektor pariwisata Provinsi Sumatera Utara dengan pertumbuhan sektor pariwisata nasional sebesar 5.334,31 menunjukkan bahwa sektor pariwisata Provinsi Sumatera Utara tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

4.7 Hasil Analisa Regresi Sektor Pariwisata

Data untuk regresi berasal dari survey Pariwisata Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Survey tersebut menampilkan data-data: Pendapatan Domestik Regional Bruto Pariwisata (PDRBP), jumlah wisatawan lokal/asing, jumlah hotel bintang/non bintang, jumlah kamar hotel bintang/non bintang, jumlah tempat tidur hotel bintang/non bintang, rata-rata lama menginap wisatawan lokal/asing pada hotel bintang/non bintang. Sementara data jumlah pekerja yang bekerja di sektor pariwisata tidak tersedia, sehingga digunakan data *dummy* dengan memproksinya dari jumlah kamar hotel, dimana hotel berbintang umumnya mempunyai jumlah rasio pekerja: kamar = 2 : 1, sementara untuk non bintang mempunyai rasio pekerja: kamar = 0.5 : 1 (Santoso, 2014). Selanjutnya data dipanelkan berdasarkan provinsi sebanyak 34 provinsi dari tahun 2010 hingga 2014.

Definisi variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Definisi variabel operasional pada analisis regresi

Variabel Operasional	Definisi	Unit	Simbol	
PDRBP	Dihitung sebagai produk domestik bruto sektor pariwisata per provinsi per tahun	Rupiah	PDRBP	
Akomodasi	Jumlah hotel per provinsi	Jumlah	HB	Bintang
			HNB	NonBintang
Kamar	Jumlah kamar hotel per provinsi	Jumlah	RB	Bintang
			RNB	Non Bintang
Tempat Tidur	Jumlah tempat tidur hotel per provinsi	Jumlah	BEDB	Bintang
			BEDNB	Non Bintang
Lama menginap	Rata rata lama menginap wisatawan asing per provinsi per tahun	Hari	LMB	Bintang
			LMNB	Non Bintang
Lama menginap	Rata rata lama menginap wisatawan lokal per provinsi per tahun	Hari	LLB	Bintang
			LLNB	Non Bintang
Tingkat Hunian	Rata rata persentase kamar terisi per provinsi	Persentase	OCRB	Bintang
			OCRNB	Non Bintang
Wisatawan lokal	Jumlah wisatawan lokal yang berkunjung per provinsi per tahun	Jumlah	WLT	Total
Wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing yang berkunjung per provinsi per tahun	Jumlah	WMT	Total
Pekerja	Jumlah pekerja yang bekerja di sektor perhotelan per provinsi per tahun	Jumlah	PHB	Bintang
			PHNB	Non Bintang
			PT	Total

Dilihat dari statistika deskriptif bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan karakteristik dari variabel terutama dilihat dari karakteristik destinasi yaitu akomodasi hotel bintang dan non bintang, serta karekteristik wisatawan, yaitu mancanegara dan lokal.

Tabel 4.11 Statistik deskriptif variabel operasional pada analisis regresi

Variable	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
PDRBP	170	50000000	84000000	1350440	388000000
HB	170	48.48	57.86	0	253.00
RB	170	4694.45	7069.15	0	35504
BEDB	170	7161.92	10532.45	0	49959
HNB	170	423.29	458.81	20	1866
RNB	170	7371.42	7776.70	482	33151
BEDNB	170	11328.41	12143.02	562	53654
OCRB	170	48.42	9.30	0.00	80.81
OCRNB	170	36.69	11.03	18.77	75.86
LMB	170	2.84	1.14	0.00	7.26
LMNB	169	2.91	1.43	1.03	8.09
LLB	170	1.91	0.42	0.00	3.29
LLNB	170	1.78	0.50	1.07	4.00
WMT	170	256703.80	876571.10	1	6739593
WLT	170	1994373.00	2599749.00	48730.00	13400000.00
PHB	170	9388.91	14138.29	1	71008
PHNB	170	3685.71	3888.35	241	16576
PHT	170	13074.62	17014.87	610	75125

Dari sisi karakteristik destinasi, pariwisata di Indonesia masih di dominasi oleh Pariwisata di setiap daerah di dominasi oleh akomodasi non bintang, namun walaupun rata-rata akomodasi bintang relatif sedikit, namun dari sisi tenaga kerja yang bekerja di hotel bintang, jumlah yang bekerja di hotel bintang relatif lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dari akomodasi hotel berbintang relatif lebih tinggi. Hal ini juga sangat beralasan jika dilihat dari tingkat okupansi (*occupancy rate*) yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan hotel non bintang. Dan juga jika dilihat dari jumlah kamar dan jumlah tempat tidur yang hampir sama besar dari sisi kuantitas.

Sementara dari jenis kunjungan wisatawan, wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia, masih di dominasi oleh wisatawan lokal, begitu juga dengan lama menetap dari wisatawan, wisatawan lokal cenderung lebih lama menetap di destinasi wisata di bandingkan dengan wisatawan asing.

4.7.1 Estimasi dari sisi penawaran

Regresi linear dilakukan dengan menerapkan transformasi logaritmik terhadap beberapa variabel yang digunakan untuk mengestimasi efek variabel-variabel dari sisi penawaran pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Hasil estimasi baik dengan menggunakan regresi linear (OLS), FEM dan REM dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12 Hasil estimasi OLS, FEM dan REM dari sisi penawaran

Variabel	OLS	FEM	REM
(LOG) HB	0.69875888 (0.013) *	0.10870415 (0.014) *	0.11385525 (0.011) *
(LOG) RB	-4.753867 (0.000) ***	-0.21748653* (0.016)	-0.23064917 (0.011) *
(LOG) BEDB	4.0418886 (0.000) ***	0.03914206 0.625	0.04638733 0.569
OCRB	-0.00692871 0.113	0.00124705 (0.004) **	0.00123716 (0.004) *
(LOG) PHT	0.73378567 (0.02) *	0.61744474 (0.000) ***	0.62346578 (0.000) ***
_cons	5.4519528 (0.000) ***	5.3020726 (0.000) ***	5.2878143 (0.000) ***

Ket: * $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$

Dilihat dari hasil estimasi, untuk semua estimasi, baik pada OLS, FEM dan REM, Jumlah akomodasi hotel bintang, jumlah tempat tidur hotel bintang dan jumlah pekerja total di sektor perhotelan berdampak positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto sektor pariwisata. Pengujian Hausman sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa FEM memberikan estimasi lebih efisien dibandingkan REM.

Tabel 4.13 Hasil uji Hausman untuk FEM dan REM dari sisi penawaran

	(b)	(B)	(b-B)	
	FEM	REM	Difference	S.E.
(LOG) HB	0.109	0.113	-0.005	0.003
(LOG) RB	-0.22	-0.230	0.013	0.006
(LOG) BEDB	0.039	0.046	-0.007	0.003
OCRB	0.001	0.001	9.89E-06	0.000
(LOG) PHT	0.617	0.623	-0.006	0.009
chi2 (b-B)' [(V_b-V_B)^(-1)] (b-B) = 12.55				
Prob>chi2 = 0.028				

Secara umum persamaan regresi yang terbentuk dari estimasi menggunakan FEM dari sisi penawaran pariwisata adalah sebagai berikut:

Dari persamaan tersebut bisa dilihat bahwa hotel bintang (HB) berdampak positif dan signifikan terhadap nilai tambah pariwisata (PDRBP). Dengan menggunakan model *fixed effect*, efek hotel bintang adalah sebesar 0.109, artinya penambahan 1% penambahan hotel bintang (HB) akan meningkatkan nilai tambah (PDRBP) sebanyak 0.109 %. Penambahan jumlah kamar (RB) berdampak negatif namun signifikan terhadap peningkatan nilai tambah sektor pariwisata, dengan nilai sebesar -0.22 yang artinya penambahan 1% jumlah total kamar bintang akan menurunkan nilai tambah sebesar 0.22%. Hal ini senada dengan temuan Culiuc (2014) yang mengkaji hubungan makroekonomi pada sektor pariwisata untuk negara-negara OECD dengan menggunakan data tahun 1994-2009. Culiuc berpendapat bahwa pada dasarnya penambahan jumlah kamar senantiasa diiringi dengan promosi dan kedatangan tamu menjadi turun tatkala promosi tersebut berakhir. Sementara penambahan jumlah tempat tidur bintang (BEDB) memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan. Sementara jumlah pekerja total hotel (PHT) memiliki dampak positif dan signifikan yang cukup besar, yaitu 0.617. Artinya

penambahan 1% pekerja hotel akan meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata sebesar 0.617%. Variabel lainnya yang berdampak positif dan signifikan adalah laju okupansi hotel bintang (OCRB), yaitu sebesar 0.001. Artinya penambahan 1 unit (100%) OCRB akan meningkatkan nilai tambah sebesar 0.1%.

Jumlah kamar dan jumlah tempat tidur pada dasarnya merupakan dua ukuran yang menggambarkan kapasitas untuk hotel, yang umumnya digunakan sebagai proksi untuk modal fisik. Namun dalam keduanya mempunyai keterkaitan yang berbeda dalam analisis ekonomi pariwisata. Jumlah kamar umumnya dikaitkan dengan *revenue* yang didapatkan hotel, hal ini dengan mudah ditentukan dengan melihat pada tingkat okupansi (*occupancy rate*) dan harga sewa kamar (*room rate*). Beberapa penelitian umumnya menggunakan jumlah kamar hotel sebagai proksi untuk kapasitas akomodasi, WEF (*World Economic Forum*) sendiri menggunakan jumlah kamar hotel sebagai salah indikator tingkat infrastruktur jasa pariwisata pada penyusunan indeks kompetitif sektor wisata dan pariwisata suatu negara. Hal ini juga beralasan mengingat jumlah kamar umumnya akan menentukan tingkat investasi yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan akomodasi di destinasi pariwisata. Di sisi lain, jumlah tempat tidur umumnya dikaitkan dengan jumlah kedatangan wisatawan. Banyak penelitian yang justru melihat terdapat keterkaitan yang erat antara jumlah wisatawan dan jumlah belanja per wisatawan terhadap pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata, sehingga jumlah tempat tidur dianggap sebagai variabel yang lebih tepat dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu destinasi pariwisata. Berdasarkan pada hal tersebut, dalam model yang dibangun kita menyertakan dua ukuran yang berbeda dalam menggambarkan kapasitas hotel, dimana keduanya bisa jadi memberikan dampak yang berbeda pada nilai tambah sektor pariwisata.

Dengan mengacu pada hasil estimasi, bisa dilihat bahwa penambahan jumlah akomodasi berupa penambahan jumlah hotel bintang (HB) dan jumlah pekerja merupakan dua variabel yang berdampak cukup besar dan signifikan terhadap peningkatan produk domestik bruto sektor pariwisata. Hal ini bersesuaian dengan beberapa temuan yang mendapati bahwa peningkatan dari sisi produk

pariwisata, khususnya akomodasi akan meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata.

Tabel 4.14 Hasil estimasi OLS, FEM dan REM dari sisi permintaan

Variable	OLS	FEM	REM
(LOG) WMT	0.01736943 -0.661	0.01876397 (0.049) *	0.02421754 (0.057)
(LOG) WLT	0.96773021 (0.000) ***	0.06305411 (0.001) **	0.07990095 (0.001) ***
(LOG) LMNB	-0.01261185 (0.909)	0.02186641 0.204	0.01869965 (0.391)
(LOG) LLB	-0.4805002 (0.138)	0.12047244 (0.046) *	0.08039886 (0.31)
(LOG) PHB	-0.1753394 (0.002) **	0.06608687 (0.000) ***	0.05561695 (0.014) *
(LOG) PHNB	0.0386585 (0.632)	0.36592594 (0.000) ***	0.39403091 (0.000) ***
cons	2.0772549 (0.000) ***	5.3328245 (0.000) ***	5.1579289 (0.000) ***

4.7.2 Estimasi dari sisi permintaan

Pada kebanyakan studi empirik, permintaan pada umumnya didekati atau diukur dengan menggunakan 2 variabel yaitu kedatangan wisatawan dan jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh wisatawan (Song, et al, 2010). Akan tetapi, telah difahami bahwa pada dasarnya permintaan pariwisata dipengaruhi oleh banyak faktor dari berbagai sektor seperti, sektor tenaga kerja, sektor bisnis, sektor pendapatan, sektor budaya dan fiskal (Dritsakis & Athanasiadas, 2000).

Dalam penelitian ini, dari sisi permintaan, hasil estimasi regresi dengan menggunakan OLS menunjukkan bahwa jumlah kedatangan wisatawan lokal dan jumlah pekerja hotel non bintang saja yang berpengaruh positif dan signifikan sementara variabel lainnya menunjukkan pengaruh sebaliknya. Hal sebaliknya ditunjukkan dari hasil estimasi menggunakan FEM dan REM. Kedua estimasi ini menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata. Namun dari estimasi REM didapati bahwa jumlah wisatawan lokal dan jumlah pekerja hotel baik bintang maupun non bintang berpengaruh

signifikan sementara yang lainnya tidak signifikan. Sementara dari hasil estimasi FEM, hanya lama menetap pada hotel non bintang saja yang tidak berpengaruh secara signifikan.

Pengujian Hausman untuk estimasi, sebagaimana terlihat pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa estimasi FEM lebih efisien dibandingkan dengan REM.

Tabel 4.15 Hasil uji Hausman untuk FEM dan REM dari sisi penawaran

	(b) FEM	(B) CEM	(b-B) Difference	$\sqrt{\text{diag}(V_b - V_B)}$ S.E.
(LOG) WMT	0.018764	0.0173694	0.0013945	0.0091569
(LOG) WLT	0.0630541	0.9677302	-0.9046761	0.0171396
(LOG) LMNB	0.0218664	-0.0126119	0.0344783	0.0122506
(LOG) LLB	0.1204724	-0.4805002	0.6009726	0.0518691
(LOG) PHB	0.0660869	-0.1753394	0.2414263	0.0168654
(LOG) PHNB	0.3659259	0.0386585	0.3272674	0.0531252
chi2(6) = 4191.11				
Prob>chi2 = 0.0000				

Secara umum persamaan regresi yang terbentuk dari estimasi menggunakan FEM dari sisi permintaan pariwisata adalah sebagai berikut:

Dari persamaan tersebut, yaitu hasil regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effect* bisa dilihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara (WMT) dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan nilai tambah sektor pariwisata sebesar 0.018, artinya penambahan 1% jumlah wisatawan mancanegara akan meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata sebesar 0.018%. Variabel lainnya yang berdampak positif dan signifikan adalah jumlah wisatawan lokal (WLT) sebesar 0.063, lama menetap di hotel bintang sebesar 0.120, jumlah pekerja di hotel bintang (PHB) dengan nilai 0.066 dan variabel jumlah pekerja di hotel non bintang (PHNB) sebesar 0.366. Sementara itu, lama menginap di hotel non bintang berdampak positif namun tidak signifikan terhadap penambahan nilai tambah sektor pariwisata.

Secara umum, bisa dilihat bahwa hasil estimasi FEM untuk fungsi permintaan pariwisata di Indonesia menunjukkan bahwa baik jumlah wisatawan asing, lama menetap wisatawan asing pada hotel non bintang dan lama menetap wisatawan lokal pada hotel bintang serta jumlah pekerja pada hotel non bintang berpengaruh positif signifikan pada peningkatan nilai tambah sektor pariwisata. Dua variabel, yaitu lama menetap wisatawan lokal serta jumlah pekerja pada hotel non bintang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan domestik bruto. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Garcia-Sanzes, dkk (2013) yang menunjukkan bahwa salah satu karakteristik yang paling relevan dari wisata adalah lama tinggal, karena pentingnya dalam menentukan pendapatan dari pariwisata. Pendapatan dari pariwisata mungkin akan jatuh meskipun peningkatan kedatangan pengunjung, karena penurunan lama tinggal. Tze (2001) juga mendapati hubungan yang positif dan signifikan dari lama menetap dengan peningkatan nilai tambah sektor pariwisata untuk kasus pariwisata di Hongkong.

Dari hasil estimasi baik dari sisi permintaan maupun penawaran, umumnya kita bisa melihat adanya kesamaan dari sisi variabel yang berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto sektor pariwisata. Akomodasi hotel berbintang dan lama menetap, serta jumlah pekerja pada hotel tersebut umumnya memberikan kontribusi signifikan dan positif bagi peningkatan PDRBP. Hal ini senada dengan temuan yang menunjukkan bahwa pariwisata akan tumbuh tatkala diiringi dengan peningkatan kualitas dari karakteristik destinasi maupun dari sumber daya manusia yang menyediakan pelayanan bagi wisatawan, dimana peningkatan kualitas akomodasi dan pelayanan ini umumnya ditandai dengan munculnya fasilitas hotel bintang. Kehadiran akomodasi dan pelayanan ini juga pada umumnya senantiasa berkaitan dengan peningkatan jumlah belanja wisatawan. Selain itu, peningkatan kualitas ini akan memberikan peningkatan terhadap daya saing, yang dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan sektor pariwisata.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi Perkembangan Kawasan Pariwisata Kab. Bintan

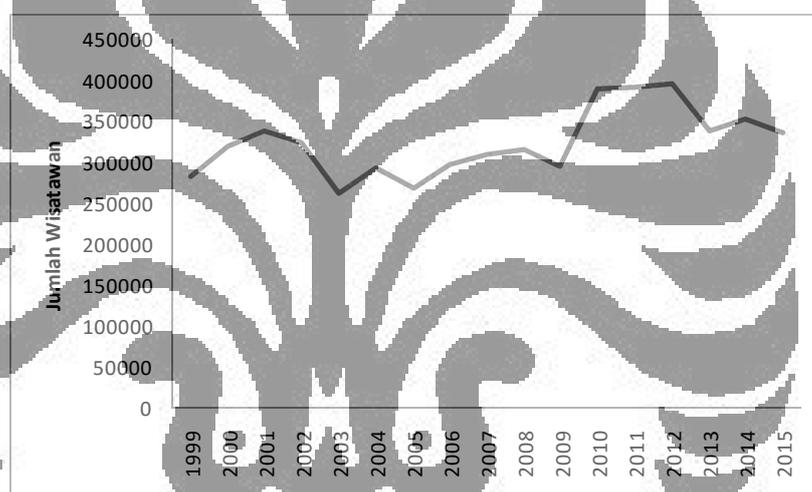
Kegunaan utama dari analisis siklus hidup destinasi adalah untuk memudahkan dalam memahami evolusi produk dan destinasi pariwisata, juga memberikan arahan dalam untuk mengambil keputusan strategis. Siklus hidup destinasi pariwisata pada dasarnya berbeda-beda, begitu juga dampak yang ditimbulkan pada setiap aspek kehidupan yang muncul dari setiap tahapan kehidupan destinasi tersebut. Dalam penyusunan strategi pengembangan kawasan pariwisata, identifikasi tahapan yang tengah dilalui sebuah destinasi pariwisata akan sangat diperlukan, hal ini dikarenakan setiap tahapan akan memerlukan tindakan perencanaan dan strategi pemasaran yang berbeda. Penyesuaian strategi pengembangan dan pemasaran ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan antara permintaan dan penawaran yang terjadi pada setiap tahap (Buhalis, 2000). Pada tahap awal perkembangan (*development*), permintaan umumnya melebihi pasokan sementara pada tahap kematangan hal ini bersifat terbalik.

Identifikasi setiap tahapan perkembangan merupakan analisis kualitatif yang menganalisis sejarah perkembangan suatu destinasi pariwisata. Analisis terhadap perubahan atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memprediksi siklus hidup suatu destinasi pariwisata (Getz, 1992; Buhalis, 2000). Oleh karenanya, dalam analisis tahapan yang terjadi pada destinasi pariwisata Kabupaten Bintan, perlu dikembangkan suatu analisis kualitatif, dengan melihat dampak-dampak yang terjadi pada setiap siklus kehidupan destinasi pariwisata, dengan menggunakan kerangka kerja yang diutarakan oleh Buhalis (2000), sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2. Kriteria dan faktor yang diamati perubahannya tersebut meliputi: karakteristik destinasi, pemasaran, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sumber data dan dasar perhitungan dari kerangka kerja di sini dapat dilihat kembali pada Tabel 3.1

5.1.1 Karakteristik Destinasi Pariwisata Kab. Bintan

A. Jumlah dan Laju Kunjungan

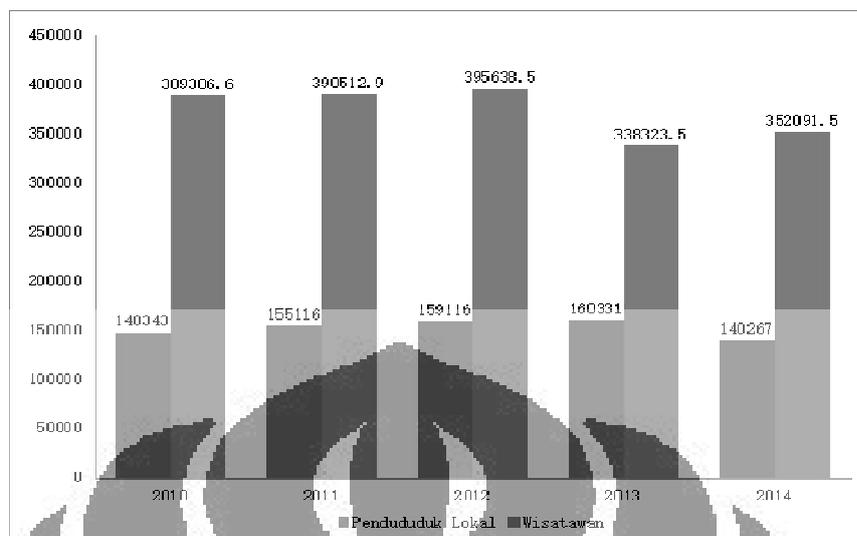
Jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Bintan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama sejak tahun 2010. Menurut Butler (1980), tingkat kunjungan dari daerah wisata terus meningkat terutama pada tahap perkembangan (*development*) dan *consolidation*. Dengan mengacu pada tren jumlah kedatangan pengunjung, dari sudut pandang model Butler, bisa dikatakan bahwa Kabupaten Bintan berada pada tahap *development*. Mengingat peluang tersebut, Kawasan pariwisata Kab. Bintan diharapkan terus tumbuh tanpa mendekati stagnasi atau penurunan panggung untuk waktu dekat.



Gambar 5.1. Tren Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kab. Bintan tahun 1999-2015

Sumber: BPS Kab. Bintan 2015 (data diolah)

Jumlah kunjungan yang tinggi dan laju pertumbuhan pariwisata yang cukup tinggi ini juga ditandai dengan rasio jumlah wisatawan yang datang yang melebihi jumlah penduduk Kabupaten Bintan itu sendiri. Jumlah wisatawan yang berkunjung rata-rata sebanyak 360 ribu sementara jumlah penduduk Bintan hanya berkisar 150 ribu orang. Jumlah pengunjung yang melibihi jumlah penduduk ini, bersesuaian dengan ciri-ciri destinasi wisata yang tengah memasuki tahapan *development* sebagaimana yang diungkapkan oleh Butler (1980) (Tabel 2.1)



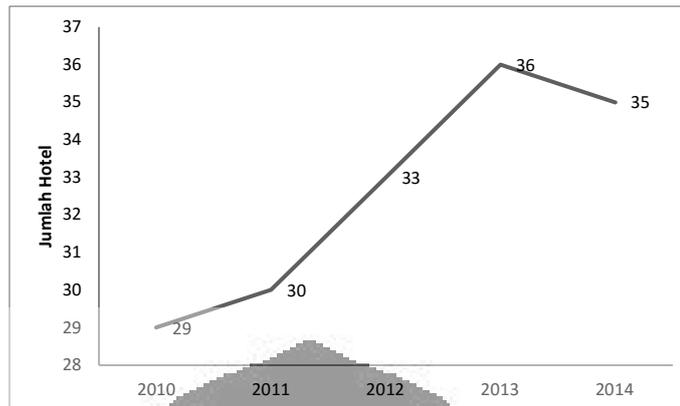
Gambar 5.2 Jumlah penduduk lokal dan wisatawan yang berkunjung ke Kab. Bintan dari tahun 2010 hingga 2014

B. Akomodasi dan Lama Tinggal Wisatawan

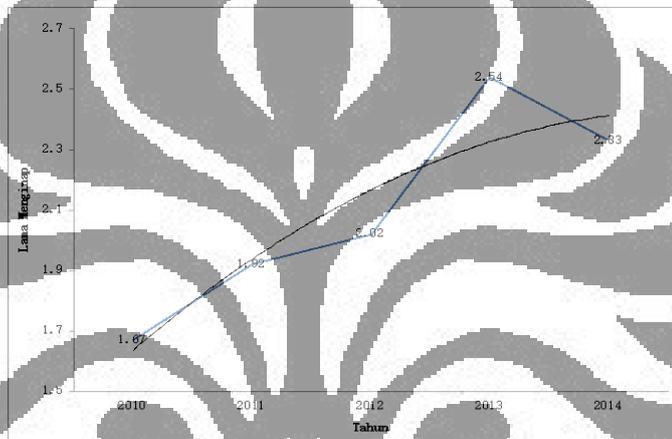
Industri pariwisata pada dasarnya memainkan peranan penting dalam ekonomi Kabupaten Bintan. Penyediaan akomodasi yang cukup masif dan upaya-upaya pemenuhan fasilitas lainnya tengah berkembang saat ini. Jumlah hotel dan penginapan pada tahun 2010 ada sekitar 29 hotel dan meningkat sebanyak 36 hotel pada tahun 2013.

Tren peningkatan jumlah akomodasi hotel ini sendiri diiringi juga dengan tren peningkatan lama menginap wisatawan khususnya wisatawan asing. Tahun 2010 rata-rata menginap wisatawan sebesar 1,67 hari sementara tahun 2013 rata-rata menginap meningkat menjadi 2,54 hari. Tahun 2014 rata-rata lama menginap wisatawan tetap tinggi yaitu 2,33 hari walaupun nilai ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Meski demikian secara tren, rata-rata lama menginap wisatawan, khususnya wisatawan asing di kabupaten Bintan cenderung meningkat.

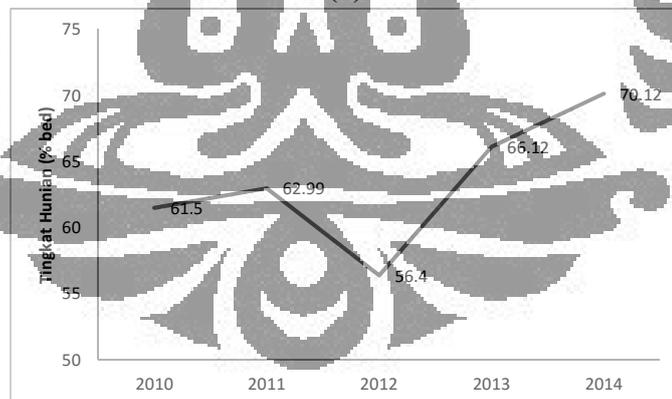
Akan tetapi, peningkatan akomodasi ini sendiri masih terkendala dengan penyediaan infrastruktur masih rendah hal ini dapat dilihat dari minimnya sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Kab. Bintan seperti transportasi dan travel yang bisa menjual potensi-potensi yang ada di Kab. Bintan.



(a)



(b)



(c)

Gambar 5.3 Tren peningkatan akomodasi dan lama menginap wisatawan.

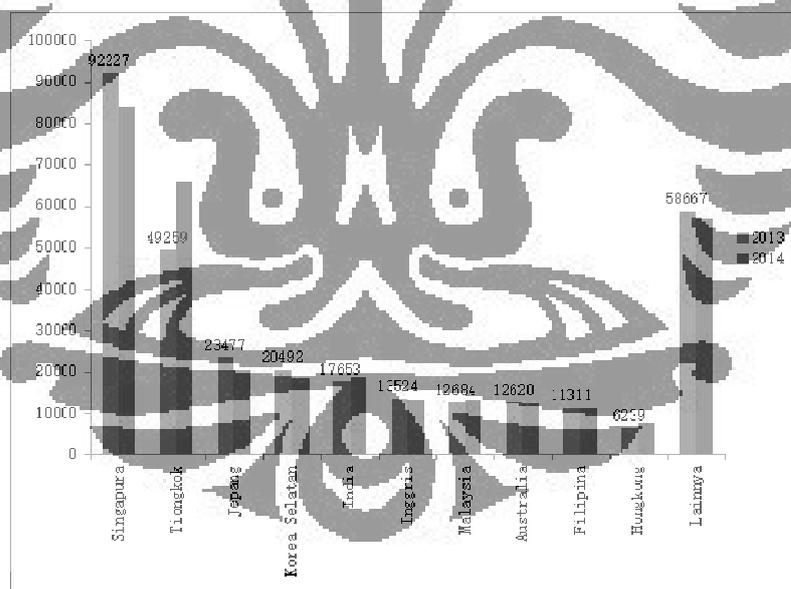
(a) Jumlah akomodasi hotel di Kabupaten Bintan tahun 2010-2014 (b). Rata-rata lama menginap wisatawan asing di Kabupaten Bintan dari tahun 2010-2014. (c) Tingkat hunian hotel (*occupancy rate*) hotel di Kab. Bintan dari tahun 2010-2014.

Sumber: BPS, 2015

Terlepas dari masih kurangnya infrastruktur dan minimnya fasilitas penunjang lainnya, dengan memperhatikan pada tren peningkatan jumlah akomodasi dan lama menginap wisatawan tersebut, bisa dilihat bahwa Kabupaten Bintan saat ini tengah berada pada tahap *development* pada model siklus hidup Butler.

C. Jenis Pengunjung

Seperti yang diungkapkan oleh Dinas budpar Kabupaten Bintan, bahwa selama 2014, di Kabupaten Bintan tercatat persentase tamu asing jauh lebih tinggi dibanding tamu dalam negeri. Pada akhir tahun perbandingannya mencapai 90 : 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan mancanegara lebih besar untuk menginap di Bintan dibanding wisatawan domestik. Kondisi ini disebabkan akses bagi wisatawan luar negeri ternyata lebih mudah, yaitu dari pelabuhan Lagoi dengan berbagai fasilitas kemudahan *entry country*, sedangkan wisatawan domestik hanya bisa mengakses kawasan wisata ini melalui jalur darat dengan waktu tempuh yang cukup lama.



Gambar 5.4. Daerah Asal Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan tahun 2013 dan 2014

Dilihat dari asal daerah wisatawan asing, Singapura merupakan daerah asal wisatawan tertinggi, diikuti dengan Tiongkok dan Jepang diurutan selanjutnya. Hal ini cukup beralasan mengingat kemudahan akses dan juga kedekatan secara geografis antara Singapura dan Kab. Bintan. Selain itu

kemudahan bagi negara-negara ASEAN untuk memasuki suatu negara tanpa memerlukan ijin visa, menjadikan tingginya kunjungan wisatawan asal Singapura ke kabupaten Bintan. Akan tetapi, jika dibandingkan antara tahun 2013 dan 2014 kunjungan wisatawan asing yang bukan berasal dari negara ASEAN mengalami peningkatan terutama wisatawan yang berasal dari Tiongkok.

Dari jenis wisatawan yang berkunjung, yang didominasi oleh wisatawan yang bukan hanya sekadar berkunjung dan berpetualang, melainkan telah menjadi inovator dan pelanggan yang berupaya menikmati daya tarik pariwisata yang ditawarkan oleh Kabupaten Bintan.

Secara keseluruhan, dari paparan di atas, kita bisa melihat bahwa dari sisi kriteria destinasi wisata, kabupaten Bintan saat ini memiliki karakteristik sebagai mana terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Karakteristik Destinasi Wisata Wisata Kab. Bintan

Komponen Karakteristik	Karakteristik	Identifikasi Stage
Destinasi		
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Banyak	Tahap <i>Development</i>
Kecepatan pertumbuhan wisatawan	Tinggi	
Kapasitas akomodasi	Sedang	
Tingkat okupansi	Tinggi	
Jenis pengunjung	Innovator	
Kesan dan daya tarik	Tinggi	
Perlakuan terhadap turis	Pelanggan	

Dengan melihat pada model konseptual Buhalis (2000), kita bisa menyimpulkan bahwa dari kriteria Karakteristik destinasi wisata, Kabupaten Bintan berada pada tahap *development* dalam model TALC Butler.

5.1.2 Karakteristik Pemasaran Pariwisata Kab. Bintan dalam Model TALC

Kegunaan lainnya dari pemahaman akan tahapan dalam siklus hidup kawasan wisata kab. Bintan adalah untuk menentukan strategi pemasaran. Bauran pemasaran perlu dibedakan dalam setiap tahapan untuk mengakomodasi kebutuhan destinasi wisata pada setiap tahap dari siklus hidup mereka (Buhalis, 2000; Park, 2006)

Pemasaran sendiri sudah dilakukan oleh pemerintah Kab. Bintan khususnya pihak Dinas Pariwisata Kab. Bintan. Pemasaran ini cukup masif dilakukan terutama semenjak tahun 2012, baik berupa pengadaan event, iklan maupun *dirrect selling*. Penciptaan daya tarik baru bahkan masif dilakukan dengan menggunakan kerjasama dengan pihak swasta yaitu Metasport merupakan *event organizer* terbesar di Asia pada tahun 2012. Kerjasama tersebut melahirkan berbagai *event* olahraga, seperti Tour de Bintan, Metaman, Bintan Triathlon, dan lain sebagainya, yang diharapkan menjadi daya tarik baru bagi pariwisata Kabupaten Bintan selain Lagon resort yang telah lebih dulu dikenal di Kabupaten Bintan (Ghifari, 2016).

Peningkatan anggaran pemasaran juga dilakukan dalam upaya meningkatkan promosi potensi kekayaan alam serta keindahan pulau Bintan kekenah Internasional. Hal ini ditandai dengan pembangunan gedung Bintan Expo Center di pusat Ibukota Provinsi Kepri di Tanjungpinang⁷.

Pengaturan dan Kegiatan Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan melakukan kegiatan promosi yang sudah berjalan cukup baik, yaitu dengan melakukan penetrasi pasar dan memberikan informasi keluar daerah tentang pariwisata di Bintan.

Tabel 5.2 Kriteria Pemasaran Pariwisata Kab. Bintan pada Model TALC

Komponen Pemasaran Pariwisata	Karakteristik	Identifikasi Stage TALC
Target pemasaran	Mengajak	Tahap <i>Development</i>
Fokus strategi pemasaran	Penetrasi	
Biaya pemasaran	Besar	
Produk	Meningkat	
Promosi	Mengiklankan	
Distribusi	Perdagangan perjalanan	

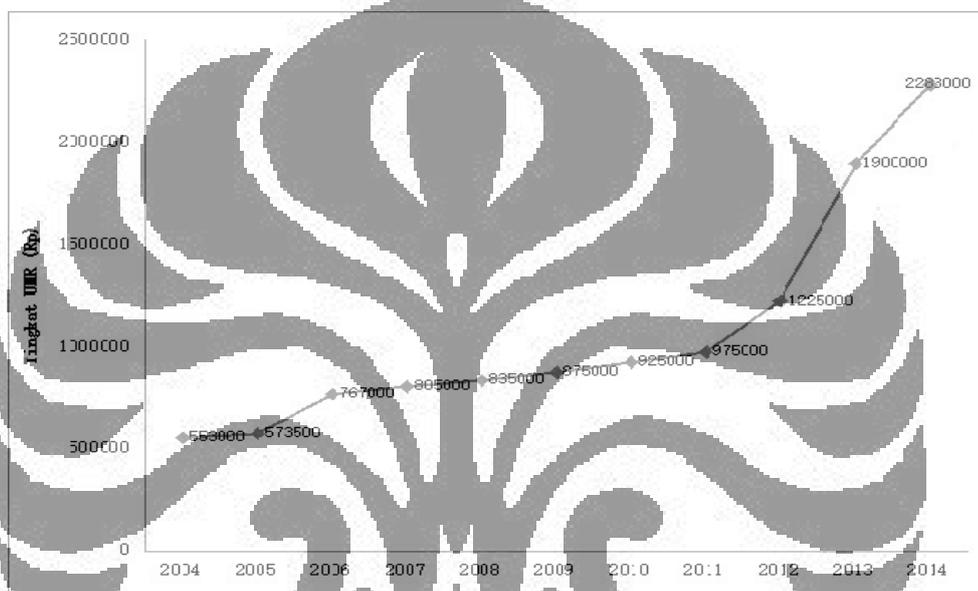
Dari paparan ini, bisa dilihat bahwa dari aspek pemasaran, Pariwisata Kabupaten Bintan memiliki karakteristik sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2.

⁷<http://bintankab.go.id/master/promosi-bintan-dikonsep-ditengah-ibukota> (tanggal akses: 29 September 2016)

Identifikasi kriteria pemasaran pariwisata kab. Bintan ini bersesuaian dengan tahapan *development* pada model TALC sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

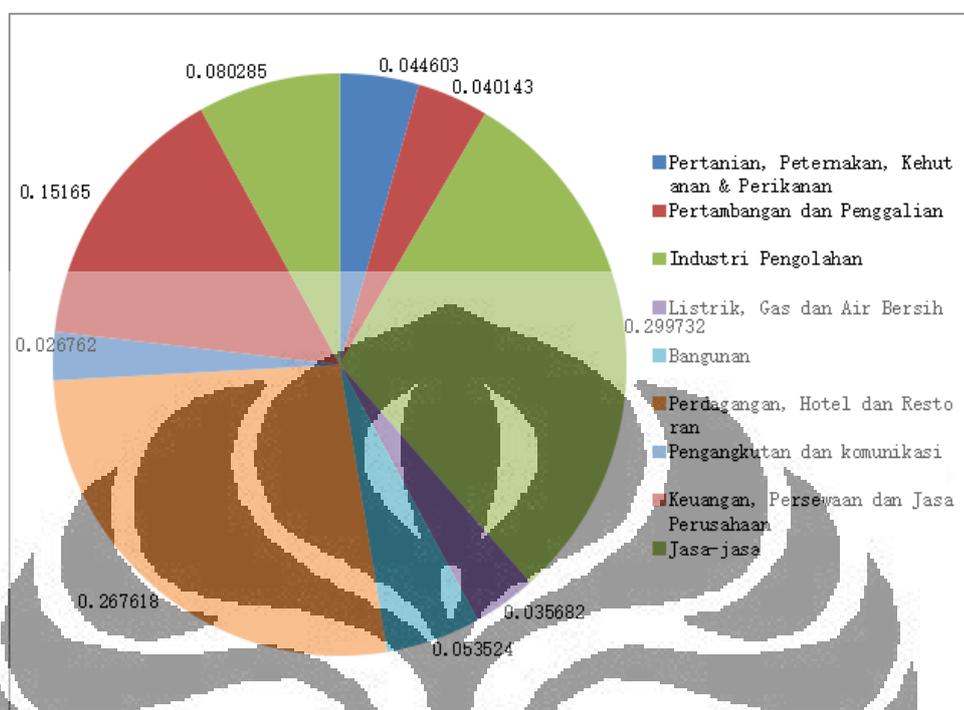
5.1.3 Karakteristik Ekonomi Kab. Bintan dalam Model TALC

Seperti yang bisa dilihat pada analisis deskriptif sebelumnya dengan menggunakan LQ dan shiftshare, sektor pariwisata merupakan tumpuan dalam tumbuh kembangnya perekonomian Kab. Bintan.



Gambar 5.5. Grafik Tingkat Upah Minimum regional (UMR) Kab. Bintan Tahun 2004-2014

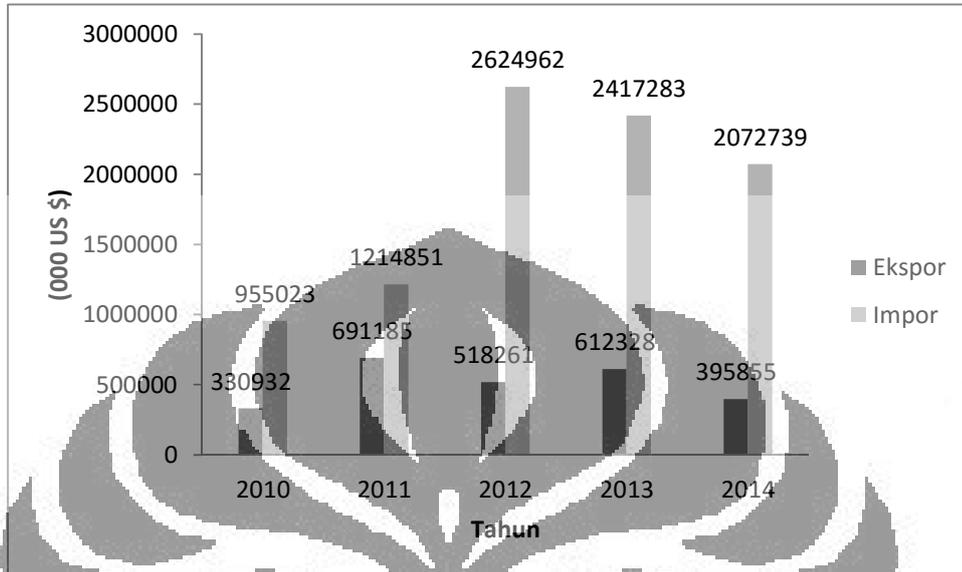
Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5, sektor pariwisata di Kabupaten Bintan yang memiliki pola peningkatan angka pertumbuhan yang terus mengalami peningkatan. Rata-rata angka pertumbuhan perekonomian pada sektor pariwisata selama lima tahun terakhir memiliki angka yang lebih besar dari pada angka rata-rata pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bintan pada umumnya, yakni sebesar 8,32 persen per tahun. Angka pertumbuhan sektor pariwisata Kabupaten Bintan pada tahun 2011 sebesar 7,25 persen, mengalami perlambatan angka pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 7,09 persen. Namun demikian pada tahun 2013 laju pertumbuhan perekonomian sektor pariwisata mengalami peningkatan sebesar 8,10 persen. Dan sampai pada tahun 2014 laju pertumbuhan perekonomian sektor pariwisata Kabupaten Bintan memiliki angka 10,83 persen.



Gambar 5.6 Proporsi Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bintan pada berbagai sektor tahun 2014

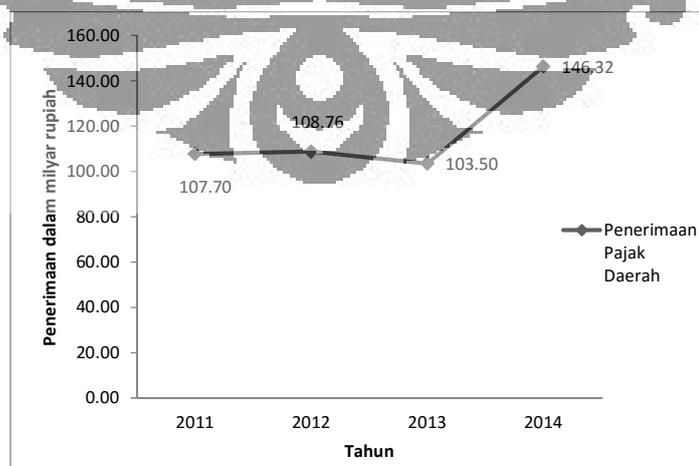
Perkembangan sektor pariwisata ini, pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan pendapatan masyarakat pada umumnya. Hal ini bisa terlihat dari peningkatan jumlah upah minimum regional (UMR) Kab. Bintan yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2010 hingga tahun 2014 (Gambar 5.5). Perkembangan ini juga bisa dilihat dari tingginya komposisi penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata, khususnya perdagangan hotel dan restoran (Gambar 5.6). Selain itu, sektor perdagangan Kab. Bintan juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama dari sisi impor. Tingginya impor tersebut cukup beralasan mengingat Kab. Bintan sejak tahun 2007 merupakan kawasan yang termasuk ke dalam Zona Perdagangan Bebas – berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan – sehingga memudahkan terjadinya perdagangan lintas negara (Suhartono, 2016). Perdagangan lintas negara ini juga didorong oleh peningkatan permintaan kebutuhan rumah tangga akibatnya pertumbuhan sektor pariwisata – yang umumnya dilakukan dengan

melakukan impor dari negara-negara seperti Singapura atau Malaysia (Ariwibowo, 2009).



Gambar 5.7 Pertumbuhan Ekspor dan Impor Kab. Bintan tahun 2010-2014

Dari sisi penerimaan negara, pendapatan dari pajak sektor pariwisata mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Bintan sangat berpotensi meningkatkan penerimaan negara terutama dari Pajak Hotel, Restoran, dan Pajak Hiburan (Hadli, 2016). Peningkatan jumlah wisatawan umumnya berkorelasi dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak.



Gambar 5.8 Peningkatan Penerimaan Kab. Bintan dari Pajak Daerah Tahun 2011-2014 (Hadli, 2016)

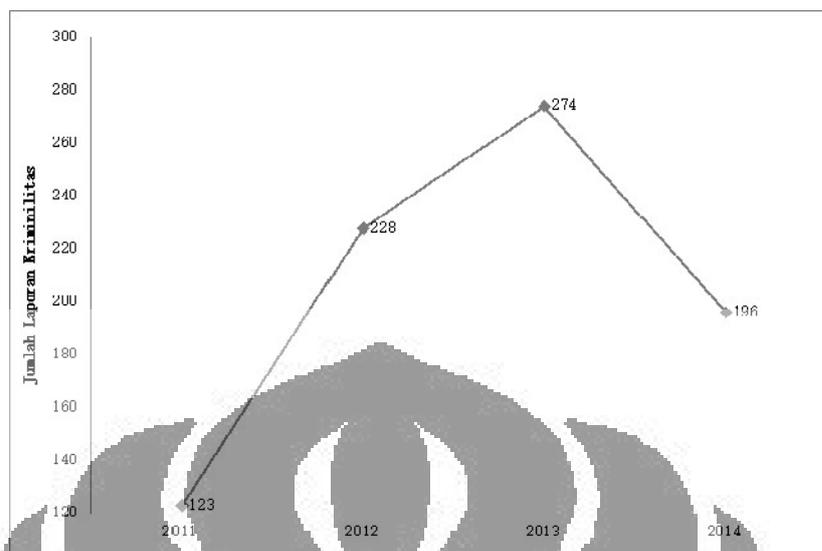
Dilihat dari kriteria dampak pariwisata Kab. Bintan terhadap ekonomi, dengan mengacu pada karakteristik yang dikonsepsikan oleh Buhalis (2000), maka secara umum ringkasan karakteristik tahapan perkembangan kawasan pariwisata berdasarkan kriteria dampak ekonomi Kab. Bintan dapat dilihat pada tabel 5.3. Dengan mengacu pada identifikasi kriteria kawasan pariwisata dari sudut pandang TALC sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1, bisa ditunjukkan bahwa tahapan siklus hidup kab. Bintan ini bersesuaian dengan tahapan *development*.

Tabel 5.3 Kriteria Ekonomi Kab. Bintan pada Model TALC

Komponen Kriteria Ekonomi	Karakteristik	Identifikasi Stage TALC
<i>Tenaga kerja</i>	Tinggi	Tahap <i>Development</i>
<i>Pertukaran mata uang asing</i>	Sangat Tinggi	
<i>Profitabilitas sektor swasta</i>	Meningkat	
<i>Tingkat pendapatan penduduk setempat</i>	Sangat Tinggi	
<i>Penerimaan negara dan pajak</i>	Sangat Tinggi	
<i>Struktur ekonomi</i>	Berorientasi wisatawan	
<i>Impor</i>	Sangat Tinggi	

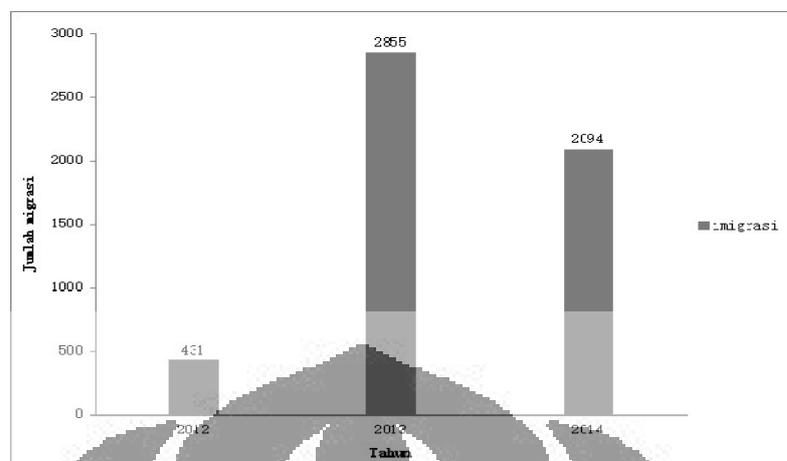
5.1.4 Karakteristik Sosial Kab. Bintan berdasarkan Model TALC

Tumbuhnya sektor pariwisata senantiasa diiringi dengan perubahan kondisi sosial masyarakatnya. Hal ini juga yang bisa diamati dalam setiap tahapan perkembangan destinasi wisata. Hal pertama yang perlu mendapatkan perhatian adalah meningkatnya angka kriminalitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kasus-kasus kejahatan yang terjadi dilokasi obyek wisata, yakni transaksi seks bebas, persaingan antar pedagang, jual beli minuman keras, dan disusul dengan hubungan antar warga dan pengunjung yang tidak sehat (Sulilawati,dkk, 2012). Hubungan ini juga bisa diakibatkan oleh perlakuan ekonomi yang tidak adil antara masyarakat lokal dengan pengunjung (Evita, dkk, 2012). Peningkatan tingkat kriminalitas juga terjadi di Kabupaten Bintan. Dari tahun 2011 hingga tahun 2014 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari terjadinya tindak kriminalitas di daerah ini (Gambar 5.9)



Gambar 5.9 Peningkatan Laporan Kriminalitas Kab. Bintan tahun 2011-2014

Kriminalitas ini juga umumnya terjadi karena adanya gesekan kebudayaan. Fenomena ini menjadi salah satu dampak lain yang bisa dilihat pada perkembangan siklus hidup destinasi wisata. Hal ini dikarenakan pariwisata melibatkan pergerakan individu-individu yang berada di daerah yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang umumnya memunculkan pergesekan budaya yang disebabkan karena perbedaan budaya, suku, gaya hidup, bahasa, keyakinan dan tingkat kesejahteraan antar keduanya. Selain itu, perkembangan kawasan wisata yang cenderung eksklusif di Kab. Bintan ditambah dengan migrasi pendatang dari luar Kab. Bintan yang cenderung mengalami peningkatan (Gambar 5.10), seringkali menimbulkan pergeseran sosial budaya masyarakat setempat, dimana masyarakat lokal di Kab. Bintan tersingkirkan karena kualitas SDM lokal tidak mampu bersaing dengan pendatang yang memiliki *skill* yang lebih tinggi (Putranti, dkk, 2002).



Gambar 5.10 Jumlah Migrasi ke Kab. Bintan tahun 2012-2014

Sumber: BPS, 2015 (data diolah)

Dilihat dari karakteristik dampak sosial yang dicirikan pada paparan di atas, kita bisa melihat bahwa karakteristik dampak sosial pada perkembangan destinasi pariwisata Kab. Bintan ini bersesuaian dengan ciri tahap development pada model TALC Butler sebagaimana dikonsepsikan oleh Buhalis (2000).

Tabel 5.4. Kriteria Sosial Kab. Bintan berdasarkan Model TALC

Komponen Sosial	Karakteristik	Identifikasi Stage TALC
<i>Tipe wisatawan</i>	Allocentric	Tahap Development
<i>Hubungan antara wisatawan dan penduduk lokal</i>	Apathy	
<i>Migrasi ke daerah tujuan wisata</i>	Tinggi	
<i>Kriminalitas di tujuan wisata</i>	Tinggi	
<i>Struktur keluarga</i>	Terpengaruh	

5.1.5 Karakteristik Lingkungan Hidup Kab. Bintan berdasarkan Model TALC

Salah satu dampak dari perkembangan tahapan siklus hidup destinasi pariwisata adalah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Di Kab. Bintan, pemanfaatan wilayah pesisir sebagai destinasi wisata dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan ekosistem laut, terutama terumbu karang. Hal ini cukup beralasan mengingat kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 240 pulau-pulau kecil dan memiliki ekosistem terumbu karang seluas 17.394,83 ha. Namun demikian, sejauh ini

kerusakan lingkungan di Kab. Bintan belum begitu signifikan. Hal ini dikarenakan sifat hunian yang eksklusif yang senantiasa dijaga sebagai daya tarik wisata Kab. Bintan. Oleh karenanya walaupun telah terjadi perubahan fisik lingkungan, namun perubahan yang terjadi justru dampak positif terhadap fisik lingkungan berupa peningkatan kualitas lingkungan serta dapat menghalangi terjadinya degradasi lingkungan akibat penambangan pasir laut (Putranti, dkk, 2002).

Tabel 5.5. Kriteria Lingkungan Kab. Bintan berdasarkan Model TALC

Komponen Lingkungan	Karakteristik	Identifikasi Stage TALC
<i>Lingkungan dan lansekap</i>	<i>Bertambah baik</i>	Tahap <i>Development</i>
<i>Konservasi dan warisan budaya</i>	<i>Bertambah baik</i>	
<i>Gangguan terhadap ekologi</i>	<i>Bertambah baik</i>	
<i>Polusi terkait kegiatan pariwisata</i>	<i>Rendah</i>	

Dengan mengacu pada model siklus hidup TALC dan karakteristik lingkungan hidup dalam model konseptual Buhalis, kita bisa melihat bahwa tahapan siklus hidup destinasi pariwisata Kab. Bintan dapat kita identifikasi berada pada tahapan *development* (Tabel 5.5).

Dari sini, dengan mengacu pada indikator-indikator pada tabel 3.3 sebagaimana yang diuraikan oleh Buhalis (2000), identifikasi tahapan siklus hidup kawasan Pariwisata Kab Bintan dapat ditunjukkan pada tabel 5.6, dimana secara keseluruhan, untuk kelima kriteria yang digunakan untuk memprediksi tahapan perkembangan Pariwisata Kab. Bintan dari sudut pandang model TALC Butler, kita bisa menyimpulkan bahwa Perkembangan siklus hidup destinasi wisata Kab. Bintan saat ini tengah berada pada tahap *Development*.

Tabel 5.6 Hasil Identifikasi Tahapan Siklus Hidup Kawasann Pariwisata Kab. Bintan berdasarkan Model TALC

Kriteria Situasi	Tahapan Siklus Hidup					
	<i>Exploration</i>	<i>Involvement</i>	<i>Development</i>	<i>Consolidation</i>	<i>Stagnation</i>	<i>Decline</i>
KARAKTERISTIK DESTINASI WISATA						
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Sedikit	Sedang	Banyak	Banyak Sekali	Banyak	Sedikit
Kecepatan Pertumbuhan Wisatawan	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah
Kapasitas Akomodasi	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Tingkat Okupansi	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Tingkat Harga Pelayanan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Jenis Pengunjung	Drifter	Drifter	Innovator	Innovator	Follower	Cheap Mass Market
Kesan dan Daya Tarik	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah
Perlakuan Terhadap Turis	Tamu	Tamu	Pelanggan	Pelanggan	Pelanggan	Orang Asing
PEMASARAN						
Target Pemasaran	Awereness	Menginformasikan	Mengajak	Mengajak	Mengajak	Pasar Baru/Loyalitas
Fokus Strategi Pemasaran	Eksplorasi	Ekspansi	Penetrasi	Penetrasi	Mempertahankan	Memperkenalkan Kembali
Biaya Pemasaran	Meningkat	Meningkat	Besar	Besar	Turun	Konsolidasi
Produk	Dasar	Dasar	Meningkat	Baik	Turun	Mulai Hilang
Promosi	Memperkenalkan	Memperkenalkan	Mengiklankan	Pasar Perjalanan	Pasar Perjalanan	Pasar Perjalanan
Harga	Tinggi	Tinggi	Semakin Rendah	Semakin Rendah	Rendah	Dibawah Harga Pasar
Distribusi	Indipenden	Indipenden	Perdagangan Perjalanan	Perdagangan Perjalanan	Perdagangan Perjalanan	Perdagangan Perjalanan
DAMPAK EKONOMI						
Tenaga Kerja	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah
Pertukaran Mata Uang Asing	Belum ada	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah
Profitabilitas Sektor Wisata	Negatif	Sangat Rendah	Meningkat	Sangat Tinggi	Tinggi	Turun
Tingkat Pendapatan Penduduk Lokal	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Penerimaan Negara dan Pajak	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Struktur Ekonomi	Seimbang	Seimbang	Berorientasi Wisata	Didominasi Wisata	Bergantung Wisata	Tidak Seimbang
Kebergantungan terhadap Perantara	Tidak ada	Tidak Ada	Rendah	Tinggi Sekali	Tinggi	Rendah
Impor	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah
Inflasi	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah
DAMPAK SOSIAL						
Tipe Wisatawan	Allocentric	Allocentric	Allocentric	Mid-Centric	Psychocentric	Psychocentric
Hubungan antara Wisatawan dan Penduduk Lokal	Euphoria	Euphoria	Apathy	Irritating	Antoginism	Final
Migrasi ke Destinasi Wisata	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah
Kriminalitas di Destinasi Wisata	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Struktur Keluarga	Tradisional	Tradisional	Perpindahan	Modern	Modern	Modern
DAMPAK LINGKUNGAN						
Lingkungan dan Lanskap	Murni	Murni	Bertambah baik	Tidak Dihargai	Polusi	Rusak
Konservasi dan Warisan Budaya	Murni	Murni	Bertambah baik	Tidak Dihargai	Turun	Rusak
Gangguan terhadap Ekologi	Bisa diabaikan	Rendah	Bertambah baik	Tidak Dihargai	Turun	Rusak
Polusi terkait Kegiatan Pariwisata	Bisa diabaikan	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Polusi Air	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kemacetan Lalu Lintas	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah
Erosi	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

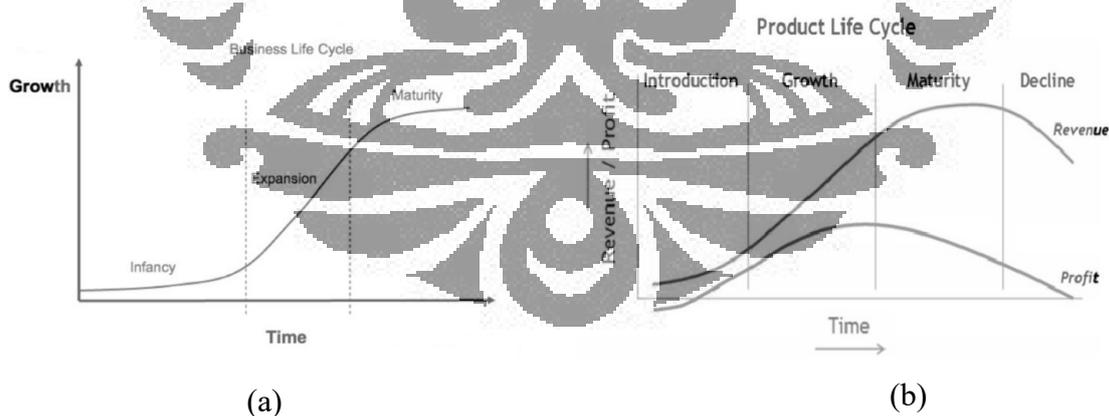
5.2 Model Ekonomi dalam Kerangka Siklus Hidup Kawasan Pariwisata

Saat ini model TALC sendiri telah banyak menarik perhatian para ekonom, terutama dengan melihat kemiripannya dengan teori pertumbuhan dalam ekonomi. Seperti yang ditemukan oleh Lozano, *et al* (2008) dengan menggunakan kalkulasi numerik untuk melihat pola pertumbuhan pariwisata menunjukkan bahwa Model TALC berkaitan erat dengan model pertumbuhan ekonomi, karena evolusi destinasi pada dasarnya dibatasi oleh penurunan daya dukung lingkungan dan ketersediaan barang publik, yang cenderung menuju pada stagnasi (Kristjandottir, 2016). Aguilo *et al* (2005) berusaha untuk memperkirakan siklus kawasan wisata (1980) untuk Kepulauan Balearic. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lundtorpa dan Wanhill (2001) yang membuat penjelasan mengenai model siklus hidup dengan menunjukkan bahwa perkembangan siklus hidup destinasi wisata pada dasarnya ditentukan oleh permintaan (*demand driven*) dari wisatawan, dan bukan pasokan terkait dengan resor. Dimana dalam teori permintaan, apa yang mempengaruhi pertumbuhan adalah jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh wisatawan, dimana hal ini terkait erat dengan pendapatan dan harga dari produk pariwisata). Hal lainnya yang sering dikaitkan dengan jumlah anggaran wisatawan di destinasi pariwisata adalah pengeluaran pemasaran atau promosi penyedia produk pariwisata/ layanan (baik di tingkat tujuan dan tingkat perusahaan).

Model ekonomi yang menjelaskan mengenai pertumbuhan kedatangan wisata Butler pada dasarnya masih sangat jarang. Hal ini terkait dengan masih didapatinya perdebatan mengenai model yang cukup tepat dalam menjelaskan dan meramalkan permintaan pariwisata. Beberapa studi saat ini telah dikembangkan terutama untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu ekonomi utama dari permintaan pariwisata, menghitung elastisitas permintaan, dan mengevaluasi kinerja peramalan model permintaan. Hal tersebut masih menjadi tugas penelitian utama dalam studi permintaan pariwisata saat ini.

Dalam kebanyakan model ekonomi pariwisata, pariwisata senantiasa terkait erat dengan model perdagangan (*trade model*), dimana variabel makroekonomi yang digunakan sebagai determinan bisa dipandang dari sisi permintaan dan pasokan (*supply-demand side*). Hal ini juga yang didapati oleh Culiuc, yang

mengkaji bagaimana pengaruh makroekonomi penentu pariwisata dari sisi pasokan dan permintaan. Ia melihat bahwa respon dari pariwisata dan perdagangan antar negara menunjukkan karakteristik yang sama, baik untuk data negara-negara OECD maupun dunia. Perbedaan yang cukup penting didapati antara pariwisata dan perdagangan barang terletak pada sisi elastisitasnya, dimana elastisitas kedatangan wisatawan terhadap pendapatan wisatawan di daerah asalnya lebih rendah dibandingkan dengan perdagangan barang terhadap pendapatan importirnya. Hal lainnya yang ditemukan Culiuc dalam makalahnya adalah pengaruh yang berbeda dari variabel makroekonomi yang bersifat non-tradisional seperti penerbangan murah atau penerbangan langsung dan jumlah kamar. Penerbangan langsung umumnya memang terkait erat dengan peningkatan aliran masuk wisatawan, namun hal ini akan terjadi tatkala terjadinya peningkatan aliran pariwisata bilateral. Selain itu, untuk destinasi pariwisata yang kecil akan mempunyai respon yang sangat besar terkait dengan penambahan atau pengurangan penerbangan langsung atau murah tersebut. Hal ini sendiri tidak terjadi untuk kasus penambahan atau pengurangan fasilitas jasa lainnya seperti jumlah kamar hotel.



Gambar 5.11 Perbandingan Kurva S pada TALC dengan berbagai pola pada model ekonomi. (a). Model Siklus Hidup Bisnis (b). Model Siklus Hidup Produk.

Saat ini hubungan antara model pariwisata dengan perdagangan ini juga yang kemudian mendasari analisis ekonomi dari jumlah kedatangan wisatawan

yang dilakukan oleh Kristjánsdóttir (2016). Dalam model Buttler, jumlah kedatangan wisatawan merupakan indikator utama untuk melihat perkembangan siklus hidup suatu kawasan pariwisata. Jumlah kedatangan wisata merupakan ukuran yang mendominasi pengukuran permintaan pariwisata selain jumlah anggaran yang dikeluarkan wisatawan dan jumlah waktu yang dihabiskan di daerah destinasi. Dalam kajian ekonomi, pola jumlah kedatangan wisatawan dalam model siklus hidup Buttler pada dasarnya mempunyai karakteristik yang sama dengan model-model yang sudah umum dipelajari di ekonomi lainnya seperti model siklus hidup bisnis dan siklus hidup produk (gambar 5.11). Kristjánsdóttir (2016) kemudian menggunakan berbagai indikator yang digunakan oleh WEF (World Economic Forum) dalam menyusun Indeks Wisata dan Pariwisata Global yang kemudian ia proksi menjadi beberapa faktor utama, seperti pemerintahan, bank, jalan beraspal, tenaga kerja terlatih, dan internet. Dari analisis yang dilakukannya secara keseluruhan bisa dilihat bahwa moda transportasi memainkan peran penting untuk memperkuat infrastruktur pariwisata internasional, dan karenanya kebijakan harus ditujukan untuk memudahkan aksesibilitas dan perkuatan dukungan jasa perjalanan lainnya yang tentunya harus dilengkapi dengan modal manusia yang terlatih dan manajemen sumber daya yang baik.

Dilihat dari indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Kompetitif Wisata dan Pariwisata Global (*Global Travel and Tourism Competitiveness Index/TTC*) yang disusun oleh WEF pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan indikator yang dilontarkan oleh Buhalis dalam menjelaskan siklus hidup suatu kawasan pariwisata. Indikator yang digunakan WEF lebih didasarkan pada survey opini dan juga data sekunder lainnya, sehingga mencakup banyak hal. Indikator ini dibagi menjadi beberapa pilar dan 4 subindeks meliputi:

A) Kemampuan Lingkungan, terdiri dari lima pilar:

1. Lingkungan Bisnis,
2. Keselamatan dan Keamanan,
3. Kesehatan dan Kebersihan,
4. Sumber Daya manusia dan Pasar Tenaga Kerja,

5. Kesiapan ICT;

B) Kebijakan Wisata dan Pariwisata terdiri atas empat pilar:

6. Pengutamaan *Travel & Tourism*,

7. Keterbukaan,

8. Harga yang bersaing,

9. Kelestarian lingkungan;

C) Infrastruktur, terdiri dari tiga pilar:

10. Infrastruktur Transportasi Udara,

11. Infrastruktur darat dan Pelabuhan,

12. Infrastruktur jasa pariwisata; dan

D) Sumber Daya Alam dan Budaya (2 pilar):

13. Sumber Daya Alam dan

14. Sumber Daya Budaya dan Wisata Bisnis.

Jika dilihat TTC sendiri lebih didasarkan pada membagi sistem pariwisata ke dalam beberapa komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan indikator yang digunakan Buhalis pada analisis Tahapan Butler dalam tesis ini. Buhalis lebih mendasarkan pada dampak yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata, terhadap sektor-sektor lainnya dalam masyarakat. Namun demikian, dari sisi kajian ekonomi, baik variabel atau indikator yang digunakan dalam tesis ini – yang didasarkan pada model Buhalis, maupun indikator yang digunakan dalam penyusunan TTC, masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, terutama dikaitkan dengan bagaimana hubungan antara indikator tersebut dengan ukuran perkembangan pariwisata, maupun guna melihat bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata secara keseluruhan.

5.3 Analisis Pohon Masalah dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Kab. Bintan

Dari model TALC diperoleh gambaran kualitatif bahwa perkembangan pariwisata Kab. Bintan saat ini berada pada tahap *Development*. Langkah selanjutnya adalah dengan mendefinisikan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh Kab. Bintan untuk mengembangkan pariwisata daerahnya dengan

mempertimbangkan berbagai kriteria perkembangan yang ada dalam model TALC.

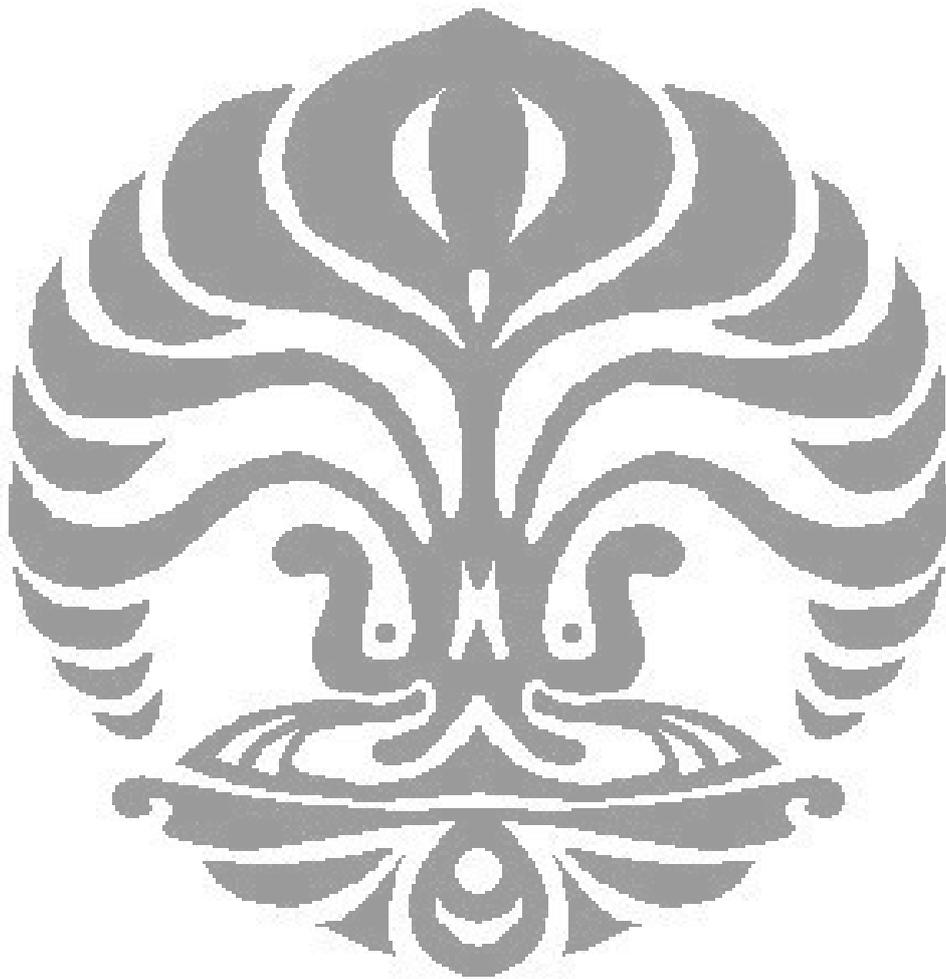
Dari deskripsi sebelumnya mengenai tahapan perkembangan wisata kab. Bintan dalam kerangka kerja TALC, bisa didapati bahwa permasalahan dan potensi perkembangan pariwisata Kab. Bintan bisa diidentifikasi dari 5 kriteria yaitu karakteristik destinasi, pemasaran, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Representasi permasalahan dan potensi ini dalam bentuk diagram pohon permasalahan dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada gambar 5.12.

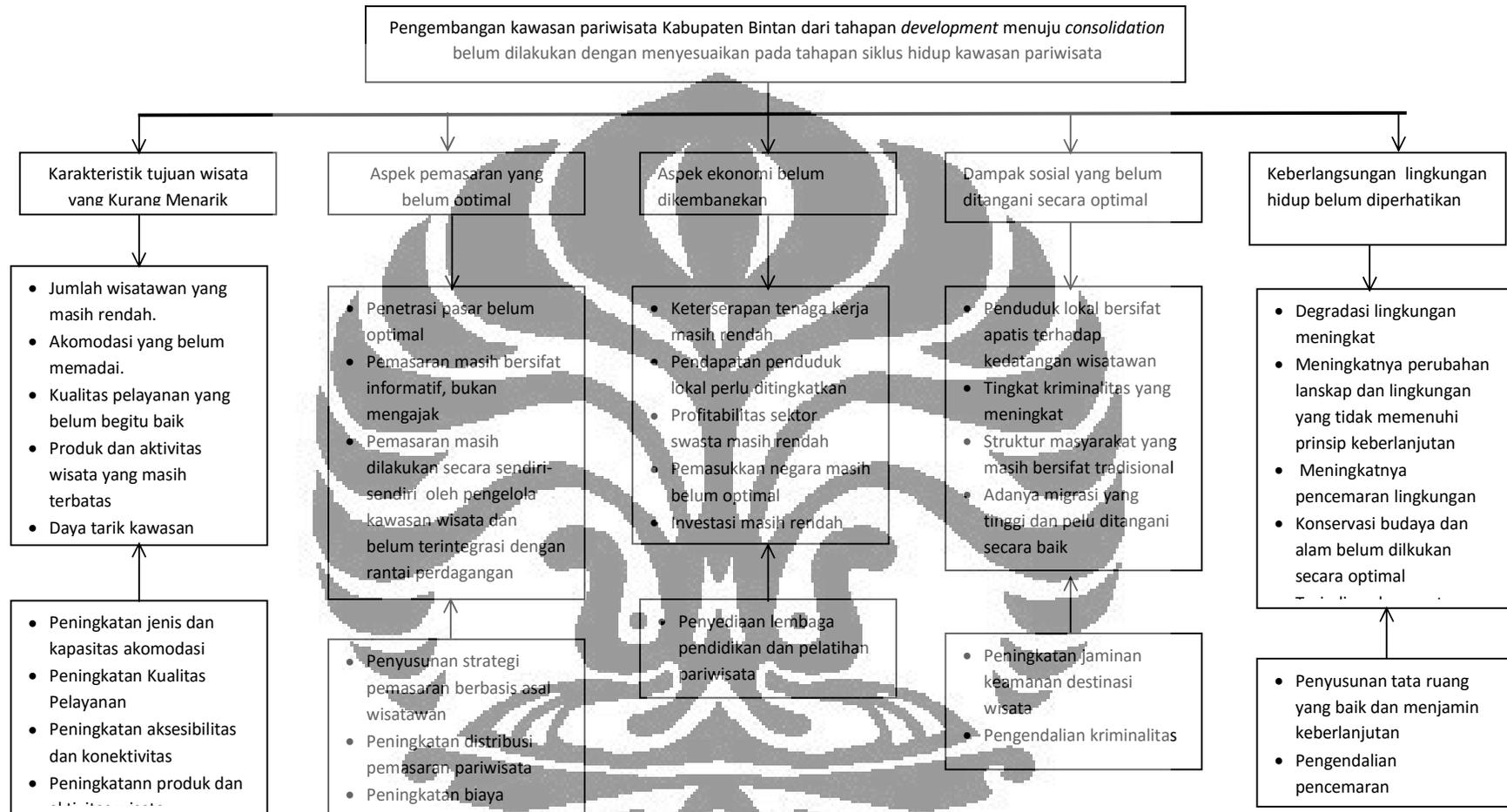
5.4 Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Kab. Bintan dari Tahap *Development Menuju Consolidation*

Model AHP dikembangkan dalam penyusunan strategi pengembangan pariwisata Kab. Bintan. Prioritas strategi ditentukan dengan melakukan survey pada pihak ahli yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata Kab. Bintan. Pengambil keputusan atau ahli dalam bidang pariwisata ini pada dasarnya sangat banyak. Namun dalam penelitian ini kita membagi ahli tersebut ke dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Unsur perumus kebijakan pariwisata (legislatif)
2. Unsur pelaksana kebijakan, dalam hal ini adalah pihak dinas pariwisata
3. Unsur praktisi pariwisata Kab. Bintan

Para ahli tersebut diminta untuk mengevaluasi serangkaian perbandingan berpasangan mengenai tujuan akhir dari analisis yaitu menentukan strategi yang tepat dalam mengembangkan pariwisata Bintan dari tahapan yang ada sekarang ke tahapan berikutnya. Pada bagian lampiran bisa dilihat instrumen survey yang digunakan dalam penelitian ini.





Gambar 5.12 Diagram Akar Masalah dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Bintan dari Tahap *Development* Menuju *Consolidation*

Rata-rata geometrik penilaian dari para ahli digunakan untuk menentukan prioritas keseluruhan dari masing-masing kriteria, faktor, aktor dan strategi paling penting yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pariwisata Kab. Bintan.

5.4.1 Faktor dan Pelaku dalam Pengembangan Pariwisata Kab. Bintan

Seperti telah disebutkan dalam paparan sebelumnya, bahwa tahapan perkembangan sebuah kawasan pariwisata dalam TALC bisa diidentifikasi dari 5 kriteria, yaitu karakteristik destinasi, pemasaran, aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari persepsi ahli yang dipilih dalam penelitian ini didapati bahwa kriteria ekonomi menjadi prioritas dalam mengembangkan strategi pengembangan pariwisata Kab. Bintan. Disusul kemudian kriteria sosial dan karakteristik destinasi, lingkungan dan pemasaran. Lebih jauh mengenai prioritas dari kriteria berdasarkan TALC dalam pengembangan pariwisata Kab. Bintan ini dapat dilihat pada tabel pada Tabel 5.7

Tabel 5.7 Pembobotan Kriteria pada Tahapan Siklus Hidup

Kriteria	Nilai	Rangking
Dampak Ekonomi	0.353105	1
Dampak Sosial	0.338018	2
Karakteristik	0.202421	3
Destinasi	0.065604	4
Dampak Lingkungan	0.040852	5
<i>Inconsistency</i>		0.09283

Lebih lanjut, dari berbagai faktor untuk setiap kriteria, berdasarkan penilaian para ahli, faktor-faktor yang mendapat prioritas utama untuk dikembangkan pada setiap kriteria meliputi: (1). Kualitas Pelayanan dari sisi karakteristik destinasi (2). Strategi pemasaran dari aspek pemasaran (3). Perbaikan struktur ekonomi masyarakat (dari aspek ekonomi) (4). Hubungan antara masyarakat lokal dan wisatawan dari aspek sosial serta (5) terjadinya perubahan lansekap dann lingkungan dari aspek lingkungan (dapat dilihat pada Tabel 5.8).

Tabel 5.8 Pembobotan faktor-faktor dalam perkembangan kawasan pariwisata berdasarkan TALC

Kriteria	Faktor	Nilai	Rangking
Karakteristik destinasi	Kualitas pelayanan pariwisata menjadi lebih baik	0.599266646	1
	Aksesibilitas ke destinasi pariwisata semakin bertambah	0.227500937	2
	Kesan dan daya tarik destinasi semakin meningkat	0.110531362	3
	Kapasitas Akomodasi di destinasi pariwisata mengalami peningkatan	0.062701054	4
	<i>Inconsistency</i>	0.06083	
Aspek Pemasaran	Strategi pemasaran disusun dengan baik	0.629104185	1
	Distribusi pemasaran destinasi yang lebih baik	0.226462051	2
	Produk pariwisata yang ditawarkan semakin bertambah	0.102074148	3
	Biaya pemasaran mengalami peningkatan	0.042359616	4
	<i>Inconsistency</i>	0.08133	
Aspek Ekonomi	Struktur ekonomi masyarakat semakin kuat	0.487448137	1
	Tenaga kerja yang diserap pariwisata meningkat	0.276243083	2
	Penerimaan negara dan pajak semakin besar	0.11815439	3
	Profitabilitas sektor swasta mengalami peningkatan	0.11815439	4
	<i>Inconsistency</i>	0.05787	
Aspek Sosial	Terjalannya hubungan harmonis antara lokal dan wisatawan	0.359560762	1
	Perubahan struktur keluarga (modernitas) dapat diantisipasi secara baik	0.344100712	2
	Migrasi ke daerah wisata dikelola lebih baik	0.184543329	3
	Tingkat kriminalitas dapat ditekan	0.111795197	4
	<i>Inconsistency</i>	0.08876	
Aspek Lingkungan	Perubahan lanskap dan lingkungan dikelola dengan baik	0.46151671	1
	Konservasi alam dan budaya mengalami peningkatan	0.392643667	2
	Penanganan yang lebih baik terhadap gangguan ekologi dan pencemaran	0.106090451	3
	Kemacetan lalu lintas dapat ditangani dan dikendalikan	0.039749172	4
	<i>Inconsistency</i>	0.08803	

Namun hal ini menjadi berbeda tatkala dikaitkan dengan peran yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata kab. Bintan. Sebagaimana dilihat pada tabel 5.9. Dari sisi karakteristik destinasi wisata masyarakat lokal umumnya lebih banyak berperan dalam peningkatan kesan dan daya tarik, sementara pelaku usaha sangat berperan dalam peningkatan pelayanan, sementara pemerintah umumnya lebih banyak berperan dalam hal-hal yang bersifat penyediaan infrastruktur seperti aksesibilitas dan konektivitas serta peningkatan akomodasi.

Tabel 5.9 Pembobotan faktor-faktor dalam perkembangan kawasan pariwisata berdasarkan TALC untuk setiap pelaku

Faktor Berdasarkan Model TALC	<i>Inconsistency</i>	Pelaku			
		Masyarakat Lokal	Pelaku Usaha	Pemerintah (Pusat & Daerah)	
Karakteristik Destinasi	Aksesibilitas ke destinasi pariwisata semakin bertambah	0.00675	0.669417	0.087946	0.242637
	Kapasitas Akomodasi di destinasi pariwisata mengalami peningkatan	0.05156	0.527836	0.139648	0.332516
	Kesan dan daya tarik destinasi semakin meningkat	0.0000	0.777778	0.111111	0.111111
	Kualitas pelayanan pariwisata menjadi lebih baik	0.06239	0.278955	0.649118	0.071927
Ekonomi	Penerimaan negara dan pajak semakin besar	0.07721	0.097497	0.514555	0.387947
	Penerimaan negara dan pajak semakin besar	0.0000	0.111111	0.777778	0.111111
	Struktur ekonomi masyarakat semakin kuat	0.01304	0.318917	0.221125	0.459958
	Tenaga kerja yang diserap pariwisata meningkat	0.01211	0.077816352	0.486922 2	0.43526146
Lingkungan	Penanganan yang lebih baik terhadap gangguan ekologi dan pencemaran	0.01304	0.062699	0.30431	0.632991

Tabel 5.9 (Sambungan)

	Kemacetan lalu lintas dapat ditangani dan dikendalikan	0.04189	0.050093	0.183307	0.7666
	Konservasi alam dan budaya mengalami peningkatan	0.02795	0.156182	0.185174	0.658644
	Perubahan lanskap dan lingkungan dikelola dengan baik	0.0000	0.066667	0.466667	0.466667
Pemasaran	Distribusi pemasaran destinasi yang lebih baik	0.04189	0.055402	0.741864	0.202733
	Biaya pemasaran mengalami peningkatan	0.05156	0.185174007	0.658644	0.15618181
	Produk pariwisata yang ditawarkan semakin bertambah	0.02795	0.155981	0.510224	0.333795
	Tidak adanya Strategi pemasaran disusun dengan baik	0.00675	0.059212	0.450703	0.490085
Sosial	Terjalannya hubungan harmonis antara lokal dan wisatawan	0.08247	0.36806	0.082131	0.549809
	Tingkat kriminalitas dapat ditekan	0.05156	0.178620449	0.112523	0.70885572
	Migrasi ke daerah wisata dikelola lebih baik	0.10130	0.15146	0.218443	0.630098
	Perubahan struktur keluarga (modernitas) dapat diantisipasi secara baik	0.01304	0.700711	0.097169	0.20212

Begitu juga dengan aspek-aspek lainnya, umumnya pemerintah, masyarakat lokal dan pelaku usaha memiliki peran yang berlainan. Hal ini pada dasarnya menunjukkan keseimbangan dalam pengembangan pariwisata di Kab. Bintan dimana pemerintah lebih banyak berperan penting dalam pengembangan pelayanan publik sementara pelaku usaha lebih menekankan pada profitabilitas dan pengembangan produk pariwisata. Sementara masyarakat lokal umumnya

lebih berperan dalam hal-hal yang lebih mendasar seperti daya tarik dan penerimaan yang baik terhadap wisatawan.

5.4.2 Prioritas Strategi Pengembangan Pariwisata Kab. Bintan

Secara keseluruhan prioritas pengembangan strategi pengembangan pariwisata Kab. Bintan menurut persepsi para ahli dapat disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 5.10 Prioritas strategi pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan berdasarkan pada model TALC

Strategi Pengembangan	Nilai	Ranking
Meningkatkan Jaminan Keamanan di destinasi wisata	0.264875	1
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	0.126638	2
Menyusun Tata Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	0.125487	3
Mengendalikan Pencemaran	0.102804	4
Menyusun Strategi Pemasaran berbasis asal wisata	0.096921	5
Menyediakan Lemb. Pendidikan&Pelatihan	0.086974	6
Meningkatkan Produk dan Aktivitas Wisata	0.080764	7
Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas	0.080363	8
Meningkatkan Biaya Pemasaran	0.018323	9
Meningkatkan Jumlah dan Jenis Akomodasi	0.016852	10
<i>Inconsistency</i>	0.016728	

Jaminan keamanan, kualitas pelayanan dan tata ruang yang baik, menjadi 3 (tiga) besar dalam skala prioritas strategi dalam pengembangan pariwisata Kab. Bintan. Jaminan keamanan pada dasarnya merupakan isu utama yang seringkali dikaitkan dengan isu global terkait tumbuhnya ketidak-amanan yang ditimbulkan oleh globalisasi terorisme dan intervensi militer, serta serangan yang ditargetkan pada wisatawan asing di bagian-bagian tertentu dari dunia yang cenderung meningkatnya kekhawatiran risiko dan keamanan dan mengganggu hak untuk bepergian (*travel right*) (Bianchi, 2006). Isu keamanan ini menjadi prioritas

pengembangan, bahkan ketika dikaitkan dengan peran dari pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan.

Isu keamanan merupakan isu sentral dalam pariwisata. Bisa dikatakan bahwa keamanan merupakan sebuah pra kondisi yang memungkinkan sektor pariwisata bisa tumbuh. Hal ini terkait dengan kepedulian wisatawan terhadap keselamatan dirinya saat bepergian (Hitchcock, 2001), sehingga pariwisata pada dasarnya bisa berkembang pada kondisi aman. Beberapa fenomena berupa, teorisme, konflik dan ketidak stabilan politik merupakan ancaman global terhadap keamanan wisatawan, khususnya pasca perang Teluk pada tahun 1991 (Mansfeld & Fizam, 2006), disamping kriminilitas, bencana alam dan isu kesehatan.

Pariwisata Indonesia sendiri saat ini sangat rentan terhadap isu keselamatan dan keamanan. Sebagai contoh adalah bom Bali pada tahun 2002, sangat mempengaruhi bagaimana isu keamanan berdampak sangat besar terhadap pariwisata di pulau tersebut (Hichcock, 2001; Putera & Hichcock, 2006). Tak mengherankan jika untuk meningkatkan perkembangan destinasi wisata, peningkatan jaminan keamanan menjadi prioritas utama, dimana hal tersebut bisa dilakukan dengan menyusun strategi penanganan atau manajemen krisis merupakan salah satu cara yang bisa diambil terkait isu keamanan dan keselamatan wisatawan pada destinasi wisata. Pelibatan berbagai organisasi atau lembaga dalam penanganan krisis keamanan akan membangun citra yang baik, memulihkan kepercayaan konsumen, dan memulihkan tumbuh kembangnya pariwisata dari destinasi wisata (Sonmez, 1998, Timothy, 2006). Peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing ini juga yang kemudian menjadi salah satu poin penting dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 dalam PP No. 50/2001.

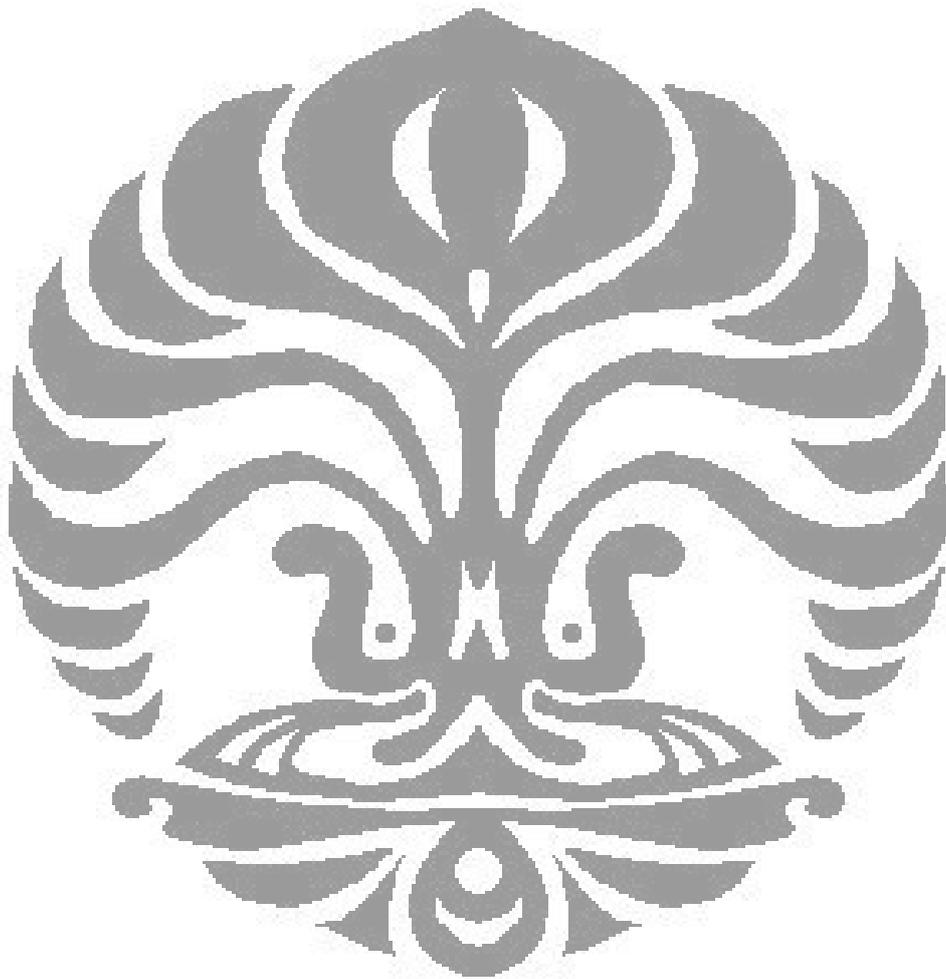
Prioritas strategi pengembangan lainnya berdasarkan persepsi para ahli dalam penelitian ini adalah peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini pada dasarnya sangat beralasan, karena umumnya kualitas kinerja pariwisata berkaitan erat dengan tingkat kepuasan konsumen yang berujung pada peningkatan loyalitas dan

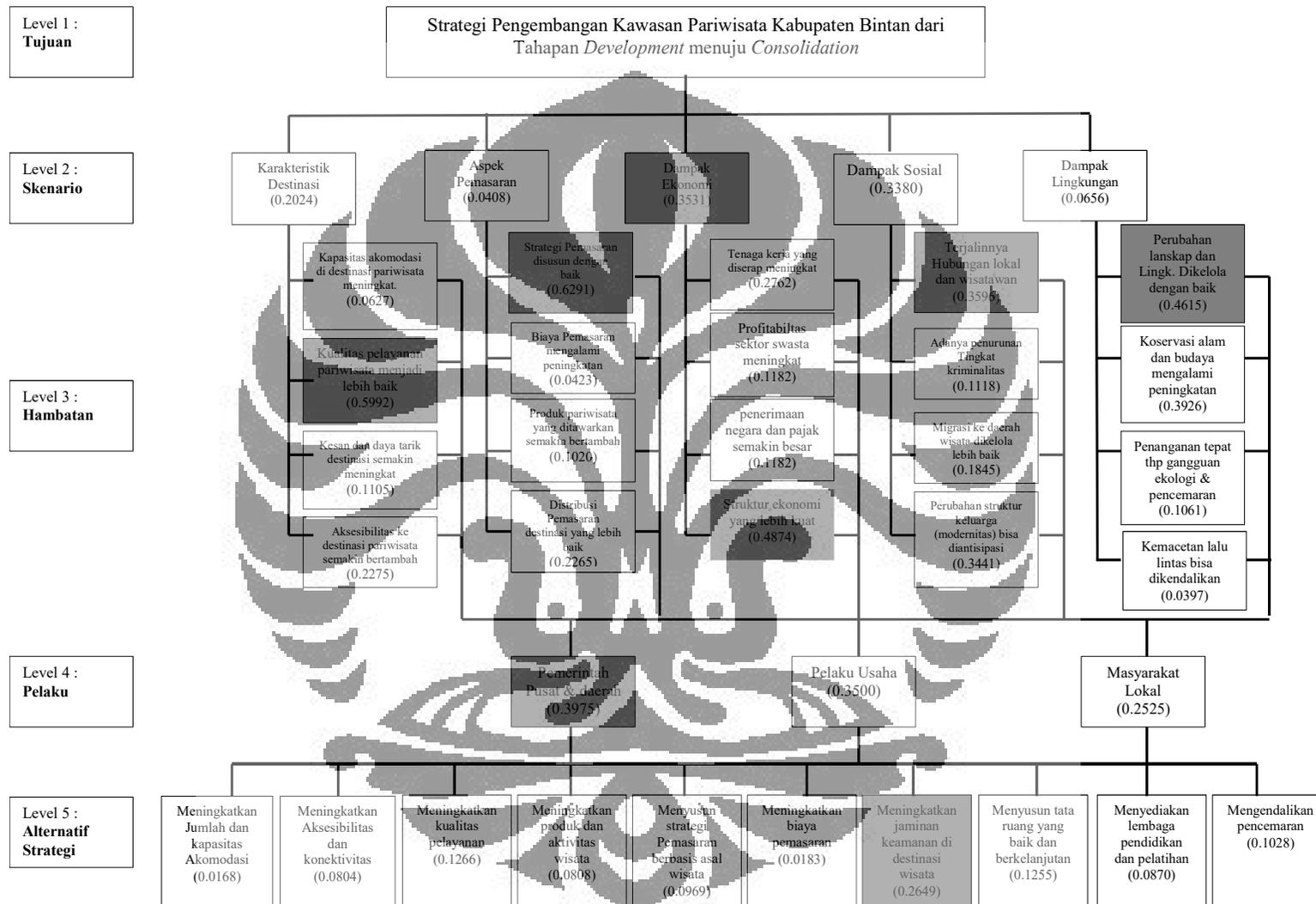
kunjungan masa depan, keinginan untuk belanja serta peningkatan reputasi destinasi wisata (Braker & Crompton, 2000).

Tabel 5.11 Prioritas strategi pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan berdasarkan pada model TALC untuk berbagai pelaku

Strategi Pengembangan	Pemerintah		Pelaku Usaha		Masyarakat Lokal	
	Nilai	Rangking	Nilai	Rangking	Nilai	Rangking
Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas	0.042146	8	0.111527	4	0.104452	4
Meningkatkan Biaya Pemasaran	0.019352	9	0.018556	10	0.016439	10
Meningkatkan Jaminan Keamanan di destinasi wisata	0.199792	2	0.292571	1	0.335073	1
Meningkatkan Jumlah dan Jenis Akomodasi	0.011430	10	0.019237	9	0.022613	9
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	0.093619	5	0.134311	3	0.169585	2
Mengendalikan Pencemaran	0.112320	4	0.063729	6	0.132808	3
Menyediakan Lemb. Pendidikan & Pelatihan	0.152928	3	0.039286	7	0.038393	8
Meningkatkan Produk dan Aktivitas Wisata	0.081793	6	0.090548	5	0.067903	5
Menyusun Strategi Pemasaran berbasis asal wisata	0.058607	7	0.193387	2	0.046086	7
Menyusun Tata Ruang yang Baik dan berkelanjutan	0.228012	1	0.036849	8	0.066647	6
<i>Inconsistency</i>	0.09679		0.09296		0.09631	

Dari paparan di atas, hasil analisis AHP untuk strategi pengembangan kawasan pariwisata kabupaten Bintan dari tahapan *development* menuju tahapan *consolidation* dapat dituangkan ke dalam bagan sebagaimana terlihat pada gambar 5.13.





Gambar 5.13 Hasil Analisis AHP Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Bintan dari Tahap *Development* Menuju *Consolidation*

BAB 6 KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Dengan mengacu pada hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa kawasan Pariwisata Kab. Bintan merupakan kawasan pariwisata yang sangat potensial. Perkembangan ekonomi Kab. Bintan sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata hal ini bisa dilihat dari analisa *shift share* dimana pertumbuhan (G) Perekonomian Kabupaten Bintan sebesar 2.759,41. Apabila Perekonomian Kabupaten Bintan tumbuh seperti Nasional maka *regional share* (R) Kabupaten Bintan sebesar 2.220,17. Sedangkan selisih antara pertumbuhan aktual Kabupaten Bintan dengan pertumbuhan nasional sebesar 539,24 menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Bintan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Hal senada juga bisa dilihat pada analisa LQ dimana indeks nilai Krugman dari tahun 2010-2014 menunjukkan pola peningkatan nilai indeks Krugman yang terus bertambah, dimana Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi spesialisasi khusus pada sektor pariwisata dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau secara umum.

Pertumbuhan sektor pariwisata Kab. Bintan ini, seperti halnya destinasi pariwisata lainnya di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi bisa dipandang dari sudut pandang permintaan dan penawaran. Dari sisi penawaran, berdasarkan estimasi FEM, jumlah akomodasi hotel bintang, dan jumlah pekerja total di sektor perhotelan berdampak positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto sektor pariwisata. Sementara, hasil estimasi FEM untuk fungsi permintaan pariwisata di Indonesia menunjukkan bahwa baik jumlah wisatawan asing, lama menetap wisatawan asing pada hotel non bintang dan lama menetap wisatawan lokal pada hotel bintang serta jumlah pekerja pada hotel non bintang berpengaruh positif signifikan pada peningkatan produk domestik bruto sektor pariwisata. Lama menetap wisatawan lokal serta jumlah pekerja pada hotel non bintang memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan produk domestik bruto sektor pariwisata.

Dari sudut pandang Model Siklus Hidup Kawasan Pariwisata Butler, saat ini pariwisata kab. Bintang tengah memasuki tahapan *development*. Hal ini didapati dari identifikasi tahapan siklus hidup kawasan wisata Kab. Bintang dengan menggunakan kerangka kerja konseptual yang diutarakan oleh Buhalis (2000), dimana identifikasi tahapan ditentukan dari karakteristik 5 kriteria yaitu: karakteristik destinasi, pemasaran, ekonomi, sosial dan lingkungan, tahapan perkembangan kawasan Pariwisata Kab. Bintang saat ini. Hasil identifikasi yang didapati sebagai tahapan *development* untuk kawasan Pariwisata Kab. Bintang juga bersesuai dengan komponen-komponen pada tahapan *development* yang diutarakan oleh Butler (1980), dimana:

- Tingginya jumlah wisatawan yang bisa melebihi populasi masyarakat lokal pada puncak kunjungan
- Terciptanya pasar yang diciptakan oleh pemasaran yang intensif
- Pelibatan dan kontrol masyarakat lokal yang menurun secara cepat
- Pelibatan lembaga luar yang menyediakan daya tarik pariwisata sekunder
- Daya tarik alam dan budaya berkembang baik dan dipasarkan
- Masyarakat lokal mulai mencoba melakukan perubahan fisik lingkungan yang belum tentu disetujui pihak berwenang.

Dengan berdasarkan pada tahapan perkembangan yang tengah dilalui oleh kawasan Pariwisata Kab. Bintang, serta dilihat dari persepsi ahli yang didapati pada analisis AHP, urutan prioritas strategi pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintang dari tahapan *development* menuju tahapan *consolidation*, didapati sebagai berikut:

1. Peningkatan Jaminan Keamanan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan
3. Penyediaan Tata Ruang yang Baik
4. Adanya Pengendalian Pencemaran
5. Penyusunan Strategi Pemasaran
6. Penyediaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya

7. Peningkatan kuantitas produk dan aktivitas pariwisata
8. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata
9. Peningkatan biaya pemasaran
10. Peningkatan jumlah dan jenis akomodasi pariwisata

6.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pada analisa siklus hidup kawasan wisata, pariwisata Kab. Bintang saat ini tengah berada pada tahapan *development*. Seperti yang diungkapkan oleh Butler (1980) dan juga Breakey (2005, terdapat 2 tahapan transisi yang sangat penting ketika mengaplikasikan model Siklus Hidup Butler dalam proses perencanaan dan manajemen pariwisata, yang pertama tahap keterlibatan (*involvement*) yang merupakan tahapan yang menjadi tahapan awal setelah proses eksplorasi menuju tahapan pengembangan (*development*), yang kedua adalah tahapan konsolidasi yang terjadi antara tahapan pengembangan (*development*) menuju tahapan stagnasi. Kedua tahapan ini dianggap akan sangat menentukan bagaimana perbedaan laju perkembangan setiap destinasi wisata dalam melewati setiap siklusnya.

Dengan melihat pada potensi pariwisata Kab. Bintang dan posisi strategisnya sebagai kawasan yang berada pada lintas batas antar negara, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menunjang akselerasi tahapan perkembangan pariwisatanya menuju tahapan kemapanan (*consolidation*). Seperti yang diutarakan oleh Getz (1992) setiap tahapan pada dasarnya sangat terkait dengan batas kapasitas dari destinasi wisata dan memerlukan respon kebijakan yang berbeda. Untuk tahapan *development* menuju *consolidation* prioritas kebijakan adalah manajemen perubahan, guna mencegah terjadinya penurunan. Perubahan kawasan Kab, Bintang pada dasarnya yang menjadi karakteristik kawasan yang tengah berkembang, bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan berupa permasalahan sosial, ekonomi dan juga lingkungan jika tidak ditangani secara serius.

Sementara pada tahap *consolidation*, umumnya perkembangan perkembangan fasilitas melambat dan pengembangan pada dasarnya diprioritaskan pada faktor-faktor eksternal, ekspansi transportasi regional untuk

wisatawan lokal, promosi dan iklan untuk wisatawan mancanegara, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membuat perkembangan kawasan pariwisata tetap berkelanjutan tanpa mengarah pada stagnasi (Zhong, dkk, 2008).

Jika dilihat dari hasil analisis persepsi para ahli, manajemen perubahan dalam pengembangan pariwisata Kab. Bintan pada melingkupi komponen-komponen yang ada dalam siklus hidup suatu destinasi wisata serta selaras dengan kebijakan dan strategi pembangunan wisata nasional, meliputi:

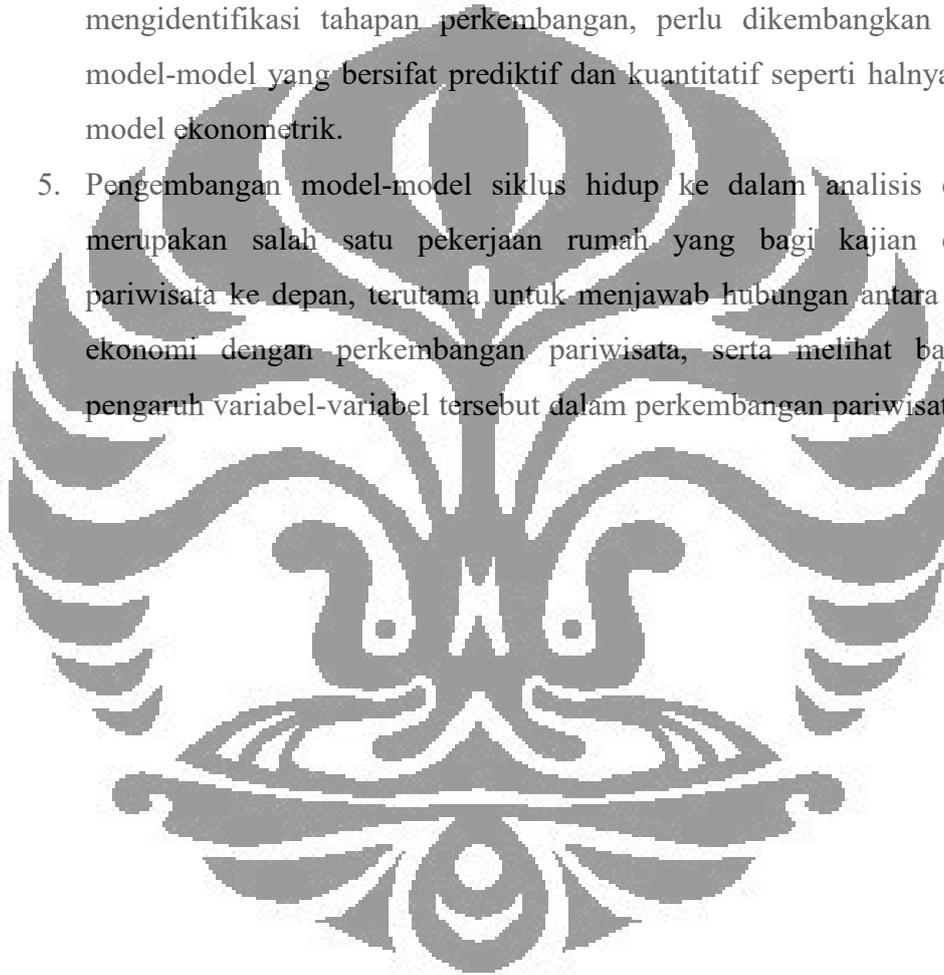
Tabel 6.1 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata Kab. Bintan

Aspek dalam perkembangan	Rekomendasi Kebijakan
Dampak Sosial	Peningkatan jaminan keamanan, dan pelibatan lebih intensi dari lembaga terkait seperti Kepolisian, BNPT, Kemenhan dan Kemenhumham pada destinasi wisata Kab. Bintan
Karakteristik Destinasi	Peningkatan kualitas pelayanan, yang pada dasarnya bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas/ jenjang keterampilan SDM dan peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata di Kab. Bintan
Dampak terhadap lingkungan	Penataan ruang yang baik yang bisa diselenggarakan melalui penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, penyusunan site plan, maupun rancangan detail (<i>detail design</i>) kawasan destinasi wisata di Kab. Bintan
Ekonomi dan pemasaran	Penyusunan strategi pemasaran melalui manajemen promosi daerah dan destinasi wisata di Kab. Bintan.

6.3 Saran Penelitian

Untuk penelitian mengenai siklus hidup kawasan pariwisata dan strategi pengembangan berdasarkan pada model TALC perlu dikembangkan lebih lanjut dengan:

1. Melibatkan kawasan lain sebagai perbandingan.
2. Penggunaan data longitudinal sehingga bisa mengidentifikasi tahapan siklus hidup suatu kawasan dengan lebih tepat.
3. Survey yang melibatkan lebih banyak ahli agar bisa didapati prioritas pengembangan kawasan pariwisata secara lebih tepat.
4. Dari sisi model, variabel yang digunakan dalam model TALC dalam mengidentifikasi tahapan perkembangan, perlu dikembangkan menjadi model-model yang bersifat prediktif dan kuantitatif seperti halnya model-model ekonometrik.
5. Pengembangan model-model siklus hidup ke dalam analisis ekonomi merupakan salah satu pekerjaan rumah yang bagi kajian ekonomi pariwisata ke depan, terutama untuk menjawab hubungan antara variabel ekonomi dengan perkembangan pariwisata, serta melihat bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut dalam perkembangan pariwisatanya.



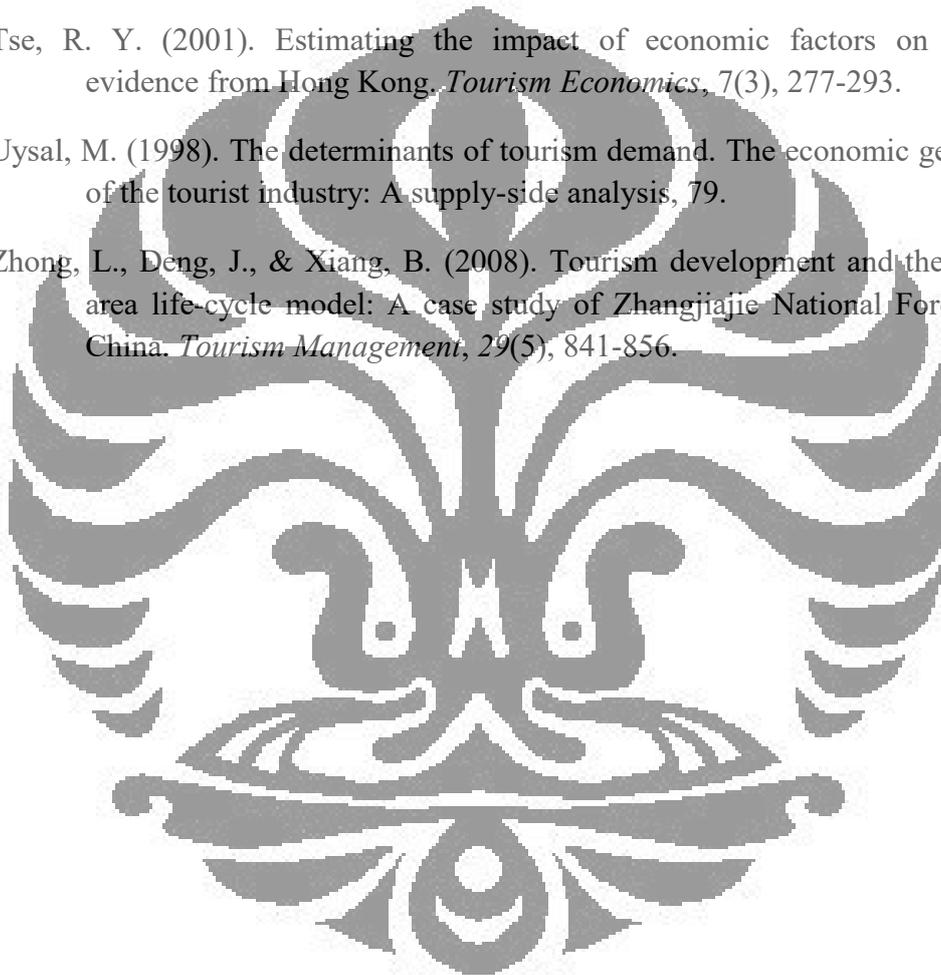
DAFTAR PUSTAKA

- Aguilo, E., Alegre, J., & Sard, M. (2005). The persistence of the sun and sand tourism model. *Tourism Management*, 26(2), 219–231.
- Andayani, S., Anwar, M. R., & Antariksa, A. (2012). Pengembangan Kawasan Wisata Balekambang Kabupaten Malang. *Rekayasa Sipil*, 6(2), 168-178.
- Aribowo, S. (2009). Kebijakan Pembangunan “Sijori” dan Dampaknya terhadap Kebudayaan”. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 11(1), 65-82.
- Bianchi, R. (2006). Tourism and the globalisation of fear: Analysing the politics of risk and (in) security in global travel. *Tourism and Hospitality Research*, 7(1), 64-74.
- Breakey, Noreen Maree (2005). Tourism destination development beyond Butler (PhD thesis). *School of Natural and Rural Systems Management, University of Queensland, Australia.*
- Buhalis, Dimitrios (2000). “Marketing the Competitive Destination of the Future”, *Tourism Management*. 21 (1), 97-116
- Butler, Richard W (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources. *The Canadian Geographer/Le Géographe canadien*, 24(1), 5-12.
- Culiuc, A. (2014). Determinants of international tourism. IMF Working Paper. IMF.
- Dritsakis, N., & Athanasiadis, S. (2000). An econometric model of tourist demand: The case of Greece. *Journal of Hospitality & Leisure Marketing*, 7(2), 39-49.
- Evita, R., Sirtha, I. N., & Sunarta, I. N. (2012). Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 2(1).
- García-Sánchez, A., Fernández-Rubio, E., & Collado, M. D. (2013). Daily expenses of foreign tourists, length of stay and activities: evidence from Spain. *Tourism Economics*, 19(3), 613-630
- Getz, Donald (1992). Tourism planning and destination life cycle. *Annals of tourism research*, 19(4), 752-770.

- Ghifari, M. H. (2016). Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. *Prosiding Manajemen Komunikasi*, 2(1): 151:15
- Gołembski, G., Nawrot, Ł., Olszewski, M., & Zmysłony, P. (2010). Investment decisions in the early stages of the tourism area life cycle. *Turizam: znanstveno-stručni časopis*, 58(4), 361-377.
- Hadli, L. R. (2016). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014 (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Hampton, M. P. (1998). Backpacker tourism and economic development. *Annals of Tourism Research*, 25(3), 639-660.
- Hitchcock, M. (2001). Tourism and total crisis in Indonesia: the case of Bali. *Asia Pacific Business Review*, 8(2), 101-120.
- Hussin, Noor Zatullffah (2014). Tracing the Malaysia Tourism Lifecycle and Strategy Assessment from the First Malaysia Plan to Ninth Malaysia Plan. *International Journal of Business and Social Science*, 5(3).
- Ioannides, D., & Debbage, K. G. (1998). The economic geography of the tourist industry: A supply-side analysis. Psychology Press.
- Judisseno, R. K. (2015). Destination Strategies in Tourist Development in Indonesia, 1945-2014: Problems of Bali Centredness (Doctoral dissertation, Victoria University).
- Kristjánsdóttir, Helga (2016) Can the Butler's Tourist Area Cycle of Evolution Be Applied to Find the Maximum Tourism Level? A Comparison of Norway and Iceland to Other OECD Countries. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 16(1), 61-75
- Kusluvan, S., Kusluvan, Z., Ilhan, I., & Buyruk, L. (2010). The human dimension a review of human resources management issues in the tourism and hospitality industry. *Cornell Hospitality Quarterly*, 51(2), 171-214.
- Liu, W., Vogt, C. A., Lupi, F., He, G., Ouyang, Z., & Liu, J. (2016). Evolution of tourism in a flagship protected area of China. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(2), 203-226.
- Lozano, J., Gomez, C. M., & Rey-Maqueira, J. (2008). The TALC hypothesis and economic growth theory. *Tourism Economics*, 14(4), 727-749

- Lumbanraja, Viktor. (2012). Tourism area life cycle in lake Toba. *Indonesian Journal of Geography*, 44(2).
- Lundtorpa, S., & Wanhill, S. (2001). The resort lifecycle theory – Generating processes and estimation. *Annals of Tourism Research*, 28(4), 947–964.
- Marchante, A. J., Ortega, B., & Pagán, R. (2006). Determinants of skills shortages and hard-to-fill vacancies in the hospitality sector. *Tourism Management*, 27(5), 791-802.
- Mansfeld, Y., & Pizam, A. (Eds.). (2006). *Tourism, security and safety*. Routledge.
- Park, Hyung-Kwan (2006). *A Study on tourist area life cycle and marketing strategy* (Doctoral dissertation).
- Putra, I. Nyoman Darma, and Michael Hitchcock. "The Bali bombs and the tourism development cycle." *Progress in Development Studies* 6.2 (2006): 157-166.
- Putranti, H. A., Wahyono, H., & Pradoto, W. (2002). *Dampak Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Lagoi Oleh Investor Asing Terhadap Masyarakat Setempat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau*. Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro.
- Saaty, Thomas L. (1990). How to make a decision: the analytic hierarchy process. *European journal of operational research*, 48(1), 9-26.
- Shida Irwana Omar Abdul Ghapar Othman Badaruddin Mohamed , (2014),"The tourism life cycle: an overview of Langkawi Island, Malaysia", *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, Vol. 8 Iss 3, 272 – 289
- Song, H., Li, G., Witt, S.F., Fei, B. (2010). Tourism demand modelling and forecasting: how should demand be measured?. *Tourism Economics*, 16 (1), 63–81
- Song, H., Dwyer, L., ZhengCao, G.L. (2012). Tourism Economics Research: A Review and Assesment. *Annals of Tourism Research*, 39 (3): 1653–1682.
- Sönmez, S. F. (1998). Tourism, terrorism, and political instability. *Annals of Tourism Research*, 25(2), 416-456.
- Suhartono, S. (2016). “Peran Pemerintah dan Kebijakan Perdagangan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau” *Kajian*, 16(3), 545-569.

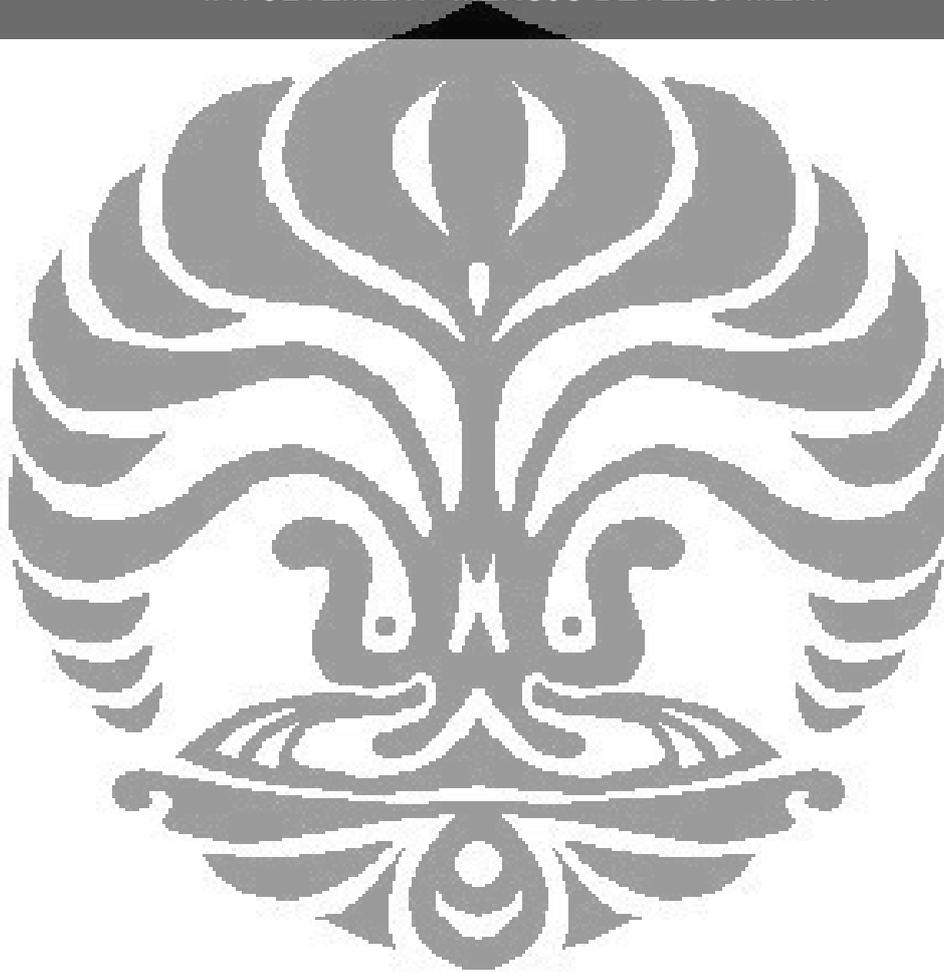
- Susilawati, S., Sudani, H., & Alex, A. C. (2012). Dampak Pembangunan Kepariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Objek Wisata Pantai Panjang Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu) (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB).
- Timothy, D. J. (2006). Safety and security issues in tourism. *Tourism Management Dynamics*, 19-27.
- Tse, R. Y. (2001). Estimating the impact of economic factors on tourism: evidence from Hong Kong. *Tourism Economics*, 7(3), 277-293.
- Uysal, M. (1998). The determinants of tourism demand. The economic geography of the tourist industry: A supply-side analysis, 79.
- Zhong, L., Deng, J., & Xiang, B. (2008). Tourism development and the tourism area life-cycle model: A case study of Zhangjiajie National Forest Park, China. *Tourism Management*, 29(5), 841-856.



Kuisisioner AHP

KUISISIONER AHP

**STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KAB. BINTAN TAHAP
INVOLVEMENT MENUJU DEVELOPMENT**





Magister Perencanaan Kebijakan Publik

Fakultas Ekonomi

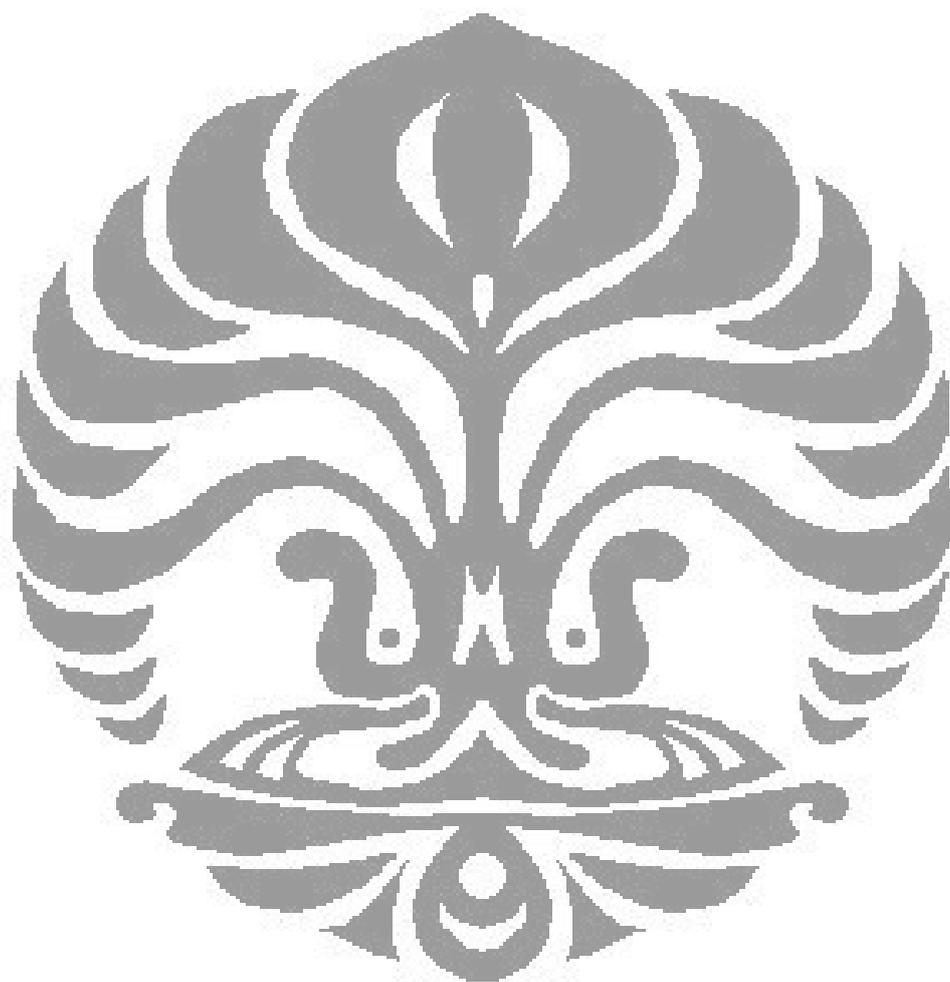
Universitas Indonesia

2016



DATA RESPONDEN

<p><i>NAMA RESPONDEN</i></p>	<p>:</p>	
<p><i>NAMA LEMBAGA</i></p>	<p>:</p>	
<p><i>JABATAN</i></p>	<p>:</p>	
<p><i>ALAMAT LEMBAGA</i></p>	<p>:</p>	
<p><i>NOMOR TELEPON/HP</i></p>	<p>:</p>	
<p><i>ALAMAT E-MAIL</i></p>	<p>:</p>	



PENJELASANKUESIONER

1. Tujuan dari pengambilan data/informasi melalui kuisisioner ini adalah untuk mendapatkan masukan pendapat/pemikiran dari para nara sumber serta pihak-pihak terkait mengenai strategi pengembangan pariwisata Kab. Bintan dari tahapan *involvement* menuju tahapan *development*.
2. Pengambilan data ini dilakukan terhadap narasumber yang terkait dengan strategi pengembangan pariwisata Kab. Bintan.
3. Penggalian data dan informasi hanya digunakan untuk tujuan penelitian dan penulis menjamin kerahasiaan data/informasi yang diberikan serta tidak akan membawa implikasi apapun bagi responden.



PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Dalam kuisisioner ini, responden diharapkan memberikan penilaian berbagai faktor dan komponen yang terbagi ke dalam beberapa level, meliputi level kriteria pengembangan, faktor dari masing-masing kriteria, pelaku yang relevan, serta alternatif kebijakan yang tepat dalam pengembangan pariwisata pulau Bintan. Penilaian tersebut dinyatakan dalam skala numerik 1 s.d 9.
2. Angka-angka tersebut menunjukkan suatu perbandingan dari dua elemen pernyataan dengan skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai perbandingan tingkat intensitas kepentingan suatu elemen terhadap elemen yang lain dengan kriteria sebagai berikut:

Intensitas Kepentingan	Keterangan/definisi	Penjelasan
1	Sama pentingnya (equal importance)	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Sedikit lebih penting (moderate importance)	Pengalaman dan penilaian sedikit lebih mendukung satu elemen
5	Lebih penting (essential/strong)	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen
7	Jelas lebih penting (very strong importance)	Satu elemen yang kuat didukung dan dominan
9	Mutlak sangat penting	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi
2,4,6,8	Nilai nilai di antara dua nilai pertimbangan	Nilai ini diberikan bila ada dua komponen di antara dua pilihan

3. Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen, berlaku aksioma *reciprocal*, artinya jika elemen *i* (kolom 1) diberi nilai 5 kali lebih penting di banding dengan elemen *j*, maka elemen *j* harus sama dengan $1/5$ kali lebih penting dibanding elemen *i*. Jika elemen pada Kolom 1 (sebelah kiri) lebih penting dari pada elemen Kolom 2 (sebelah kanan) maka nilai perbandingan ini diisikan pada Kolom 1 dan jika sebaliknya diisikan pada Kolom 2.

CONTOH PENGISIAN

Berikan tanda silang (X) persepsi atau penilaian bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan berpedoman pada petunjuk pengisian angket kuesioner.

1. Dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata pula Bintan sebagai kawasan lintas batas, menurut pendapat Bapak/Ibu, faktor-faktor apa saja yang termasuk kriteria karakteristik destinasi wisata yang perlu diperhatikan? (bandingkan elemen-elemen sasaran pada kolom 1 dengan elemen-elemen sasaran pada baris yang sama di kolom 2).

KRITERIA &FAKTOR-FAKTOR DALAM PENENTUAN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISITA KAB.BINTAN

1. Dalam pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan, terdapat beberapa hambatan yang terbagi menjadi beberapa kriteria menurut model Siklus Hidup Model Kawasan Wisata, menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, kriteria manakah yang perlu diprioritaskan untuk dikembangkan?

(bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan jenis kriteria permasalahan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Karakteristik Destinasi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Pemasaran	
Karakteristik Destinasi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dampak Ekonomi	
Karakteristik Destinasi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dampak Sosial	
Karakteristik Destinasi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dampak Lingkungan	
Aspek Pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dampak Ekonomi	
Aspek Pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dampak Sosial	
Aspek Pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dampak Lingkungan	
Dampak Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dampak Sosial	
Dampak Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dampak Lingkungan	
Dampak Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Dampak Lingkungan	

2. Dari sisi kriteria karakteristik destinasi wisata, terdapat beberapa faktor utama yang dianggap mempengaruhi pengembangan kawasan pariwisata berdasarkan kriteria tersebut, menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, faktor-faktor karakteristik tujuan wisata manakah yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan?

(bandingkan faktor yang termasuk ke dalam kriteria karakteristik tujuan wisata pada kolom 1 dengan faktor pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																				KOLOM 2
Kapasitas Akomodasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kualitas Pelayanan		
Kapasitas Akomodasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesan dan daya tarik		
Kapasitas Akomodasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aksesibilitas dan konektivitas		
Kualitas Pelayanan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesan dan daya tarik		
Kualitas Pelayanan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aksesibilitas dan konektivitas		
Kesan dan daya tarik	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aksesibilitas dan konektivitas		

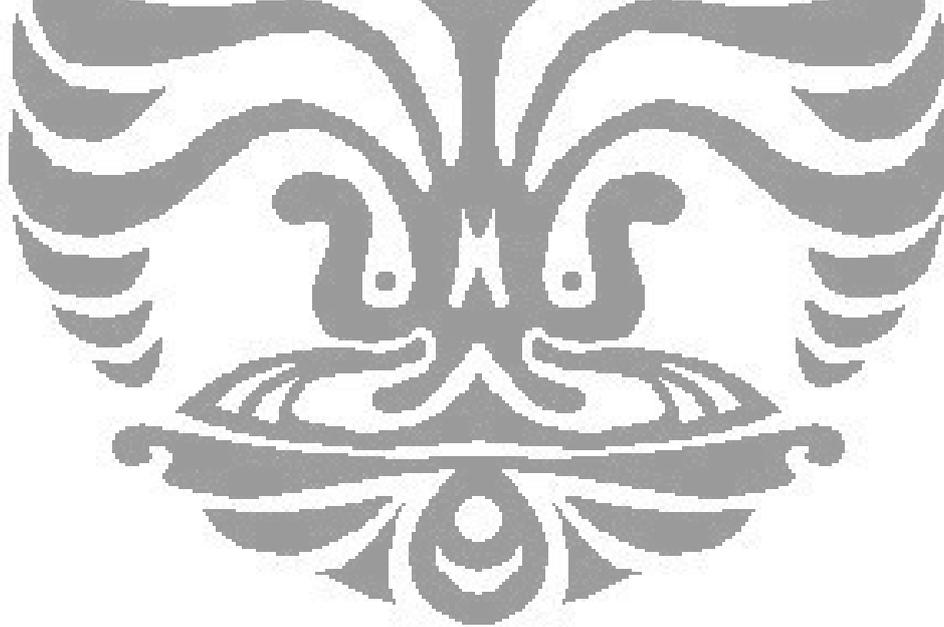
3. Dari sisi aspek pemasaran, terdapat beberapa faktor utama yang dianggap mempengaruhi pengembangan kawasan pariwisata, menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, faktor-faktor dari aspek pemasaran manakah yang lebih penting untuk dikembangkan?
 (bandingkan prioritas pengembangan untuk kriteria faktor pemasaran pada kolom 1 dengan faktor pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																				KOLOM 2
Strategi pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Biaya Pemasaran		
Strategi pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Produk yang ditawarkan		
Strategi pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Distribusi Pemasaran		
Biaya Pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Produk yang ditawarkan		
Biaya Pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Distribusi Pemasaran		
Produk yang ditawarkan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Distribusi Pemasaran		

4. Dampak perkembangan sektor pariwisata terhadap ekonomi merupakan salah satu kriteria utama yang diperhatikan dalam upaya pengembangan kawasan pariwisata. Beberapa faktor di bawah merupakan faktor-faktor yang digunakan dalam mengidentifikasi kemajuan ekonomi suatu kawasan pariwisata. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, faktor-

faktor yang terkait dengan dampak ekonomi mana yang harusnya menjadi fokus perhatian dalam pengembangan kawasan pariwisata?
 (bandingkan prioritas pengembangan untuk kriteria faktor ekonomi pada kolom 1 dengan faktor ekonomi pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																				KOLOM 2
Tenaga Kerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Profitabilitas sektor swasta		
Tenaga Kerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penerimaan Negara dan pajak		
Tenaga Kerja	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Struktur ekonomi		
Profitabilitas sektor swasta	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penerimaan Negara dan pajak		
Profitabilitas sektor swasta	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Struktur ekonomi		
Penerimaan Negara dan pajak	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Struktur ekonomi		



5. Pengembangan kawasan wisata senantiasa mempengaruhi dinamika sosial masyarakat setempat. Beberapa faktor di bawah merupakan dampak sosial yang bisa muncul dalam perkembangan suatu kawasan wisata. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, faktor-faktor sosial mana yang harusnya menjadi fokus penanganan dalam upaya pengembangan kawasan pariwisata?

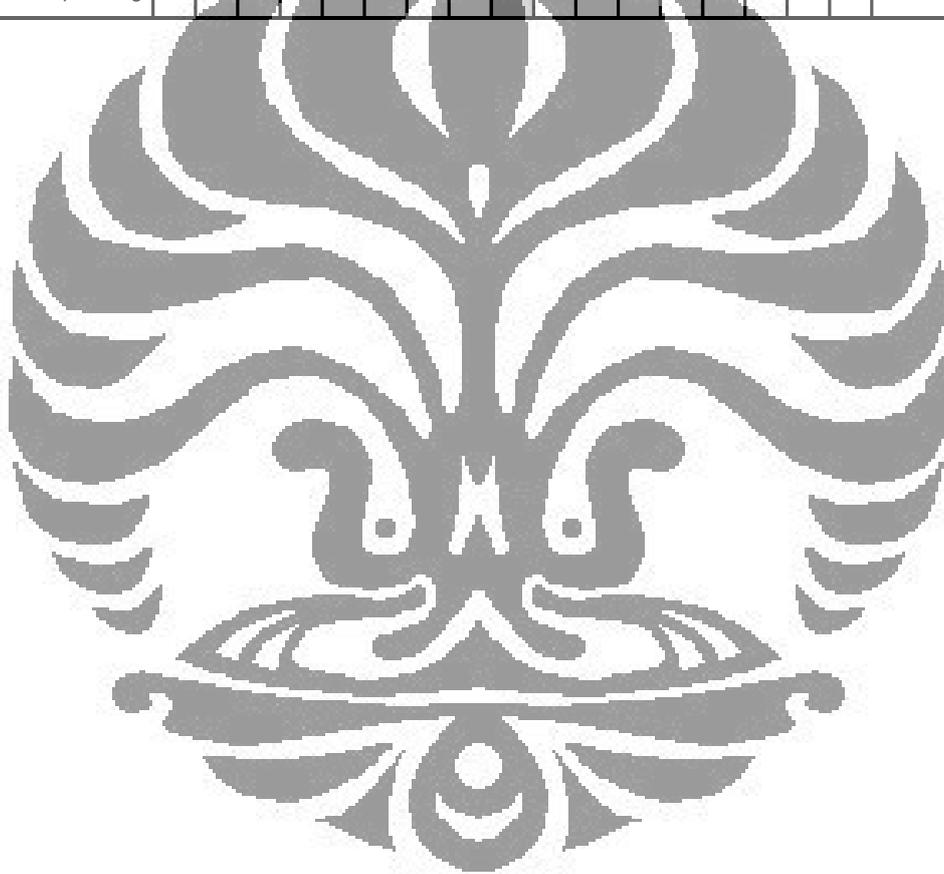
(bandingkan prioritas pengembangan untuk faktor sosial pada kolom 1 dengan faktor sosial pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																				KOLOM 2
Hubungan masy. Lokal dan wisatawan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	9	9		Kriminalitas	
Hubungan masy. Lokal dan wisatawan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	9	9		Migrasi ke destinasi wisata	
Hubungan masy. Lokal dan wisatawan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	9	9		Struktur keluarga (modernitas)	
Kriminalitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	9	9		Migrasi ke destinasi wisata	
Kriminalitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	9	9		Struktur keluarga (modernitas)	
Migrasi ke destinasi wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	9	9		Struktur keluarga (modernitas)	

6. Isu lingkungan merupakan salah satu isu penting dalam upaya pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, faktor-faktor lingkungan mana yang harusnya menjadi prioritas penanganan dalam pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan?

(bandingkan prioritas pengembangan untuk faktor-faktor lingkungan pada kolom 1 dengan faktor sosial pada baris yang sama di kolom 2)

Perubahan lingkungan dan lansekap	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Konservasi dan warisan budaya
Perubahan lingkungan dan lansekap	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Gangguan ekologi (polusi, erosi, dsb)
Perubahan lingkungan dan lansekap	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemacetan lalu lintas
Konservasi dan warisan budaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Gangguan terhadap ekologi
Konservasi dan warisan budaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemacetan lalu lintas
Gangguan terhadap ekologi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kemacetan lalu lintas



PELAKU/AKTOR DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA KAB. BINTAN

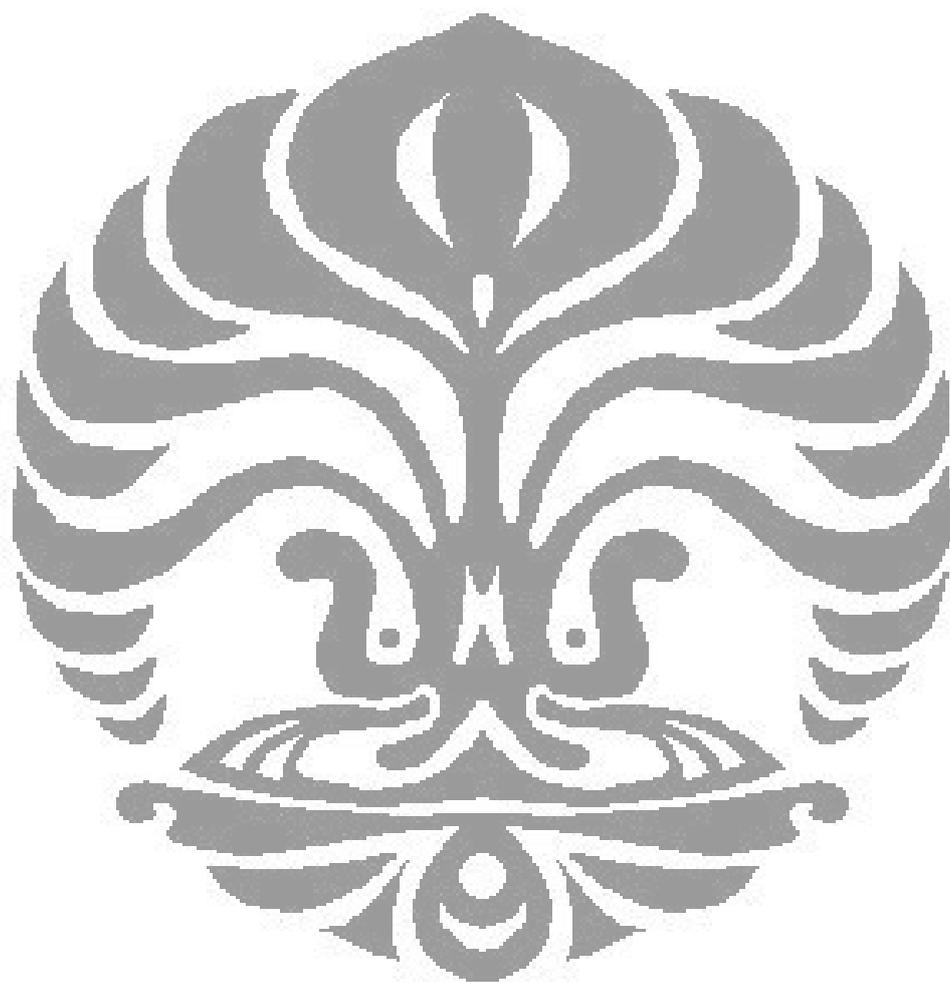
7. Dalam rangka pengembangan pariwisata Kab. Bintan, maka diperlukan identifikasi mengenai pelaku-pelaku yang berkepentingan dan bagaimana peran penting pelaku-pelaku tersebut dalam menangani berbagai faktor-faktor penghambat dalam berbagai kriteria perkembangan siklus hidup kawasan pariwisata pulau Bintan.

7.1 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan tersebut terkait faktor peningkatan kapasitas akomodasi pariwisata di kab. Bintan?
(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																				KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal		
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah		
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah		

7.2 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan tersebut terkait faktor peningkatan kualitas pelayanan pariwisata Kab. Bintan?
(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																				KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal		
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah		
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah		



7.3 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan tersebut terkait faktor peningkatan kesan dan daya tarik destinasi pariwisata Kab. Bintan? (bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																				KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.4 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan tersebut terkait faktor peningkatan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata kab. Bintan? (bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																				KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.5 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan tersebut terkait faktor penyusunan strategi pemasaran pariwisata Kab. Bintan?

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.6 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan tersebut terkait faktor peningkatan biaya pemasaran pariwisata Kab. Bintan?

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.7 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan tersebut terkait faktor peningkatan produk pariwisata di Kab. Bintan?

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.8 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan berikut terkait faktor *distribusi pemasaran pariwisata Kab. Bintan?*

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.9 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan berikut terkait faktor *penyerapan tenaga kerja di Kab. Bintan?*

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.10 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran penting pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan berikut terkait faktor peningkatan profitabilitas sektor swasta pada pariwisata Kab. Bintan?

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.11 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan berikut terkait faktor peningkatan penerimaan Negara dan pajak dari pariwisata Kab. Bintan?

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.12 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan berikut terkait faktor penguatan struktur ekonomi Kab Bintan?

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.13 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan berikut terkait faktor penangan konflik hubungan masyarakat lokal dan wisatawan?
 (bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.14 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab Bintan berikut terkait penanganan kriminalitas pada daerah wisata Kab.?
 (bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.15 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata pulau Bintan berikut terkait faktor penanganan peningkatan migrasi kab. Bintan?

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.16 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan berikut terkait faktor dinamika perubahan struktur keluarga (modernitas) pada daerah destinasi pariwisata Kab. Bintan?

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.17 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan berikut terkait faktor

penanganan perubahan lansekap dan lingkungan akibat pengembangan pariwisata di Kab. Bintan?

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																				KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal		
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah		
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah		

7.18 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan berikut terkait faktor peningkatan upaya konservasi alam dan warisan budaya Kab. Bintan?

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																				KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal		
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah		
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah		

7.19 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata Kab. Bintan berikut terkait faktor penanganan gangguan ekologi (polusi, erosi, dsb) di Kab. Bintan?

(bandingkan peran penting pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

7.20 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana peran pelaku-pelaku pengembangan pariwisata pulau Bintan berikut terkait faktor penganan dampak lalu lintas (kemacetan) pada pariwisata pulau Bintan? (bandingkan pelaku pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan pada kolom 1 dengan pelaku pengembangan kawasan pariwisata pulau Bintan pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																			KOLOM 2
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penduduk lokal	
Pelaku Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	
Penduk lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pemerintah Pusat dan Daerah	

ALTERNATIF STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA KAB. BINTAN BERDASARKAN PELAKU

8. Dalam rangka pengembangan pariwisata Kab. Bintan, maka diperlukan identifikasi alternatif strategi pengembangan berdasarkan pelaku-pelaku

yang berkepentingan dalam pengembangan kawasan pariwisata Kab. Bintan.

Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, seberapa penting alternatif strategi berikut bagi pelaku usaha pariwisata Kab. Bintan?

(bandingkan prioritas alternatif strategi pengembangan kawasan pariwisata bagi pelaku usaha pada kolom 1 dengan alternatif strategi pengembangan kawasan pariwisata bagi pelaku usaha pada baris yang sama di kolom 2)

KOLOM 1																					KOLOM 2
Penambahan jumlah dan Jenis akomodasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas			
Penambahan jumlah dan Jenis akomodasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kualitas pelayanan			
Penambahan jumlah dan Jenis akomodasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan produk dan aktivitas wisata			
Penambahan jumlah dan Jenis akomodasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan			
Penambahan jumlah dan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan biaya			

Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan biaya pemasaran
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan jaminan keamanan di destinasi wisata
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan tata ruang yang baik dan berkelanjutan
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penyediaan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengendalian pencemaran
Peningkatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan

Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan biaya pemasaran
Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan jaminan keamanan di destinasi wisata
Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan tata ruang yang baik dan berkelanjutan
Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penyediaan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata
Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengendalian pencemaran
Peningkatan biaya pemasaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan jaminan keamanan di destinasi

KOLOM 1		KOLOM 2
Penambahan jumlah dan Jenis akomodasi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas
Penambahan jumlah dan Jenis akomodasi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Peningkatan kualitas pelayanan
Penambahan jumlah dan Jenis akomodasi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Peningkatan produk dan aktivitas wisata
Penambahan jumlah dan Jenis akomodasi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan
Penambahan jumlah dan Jenis akomodasi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Peningkatan biaya pemasaran
Penambahan jumlah dan Jenis akomodasi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Peningkatan jaminan keamanan di destinasi wisata
Penambahan jumlah dan Jenis akomodasi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Peningkatan tata ruang yang baik dan berkelanjutan
Penambahan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Penyediaan

Peningkatan jaminan keamanan di destinasi wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengendalian pencemaran
Peningkatan tata ruang yang baik dan berkelanjutan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penyediaan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata
Peningkatan tata ruang yang baik dan berkelanjutan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengendalian pencemaran
Penyediaan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengendalian pencemaran

Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan produk dan aktivitas wisata
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan biaya pemasaran
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan jaminan keamanan di destinasi wisata
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan tata ruang yang baik dan berkelanjutan
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penyediaan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata
Peningkatan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengendalian

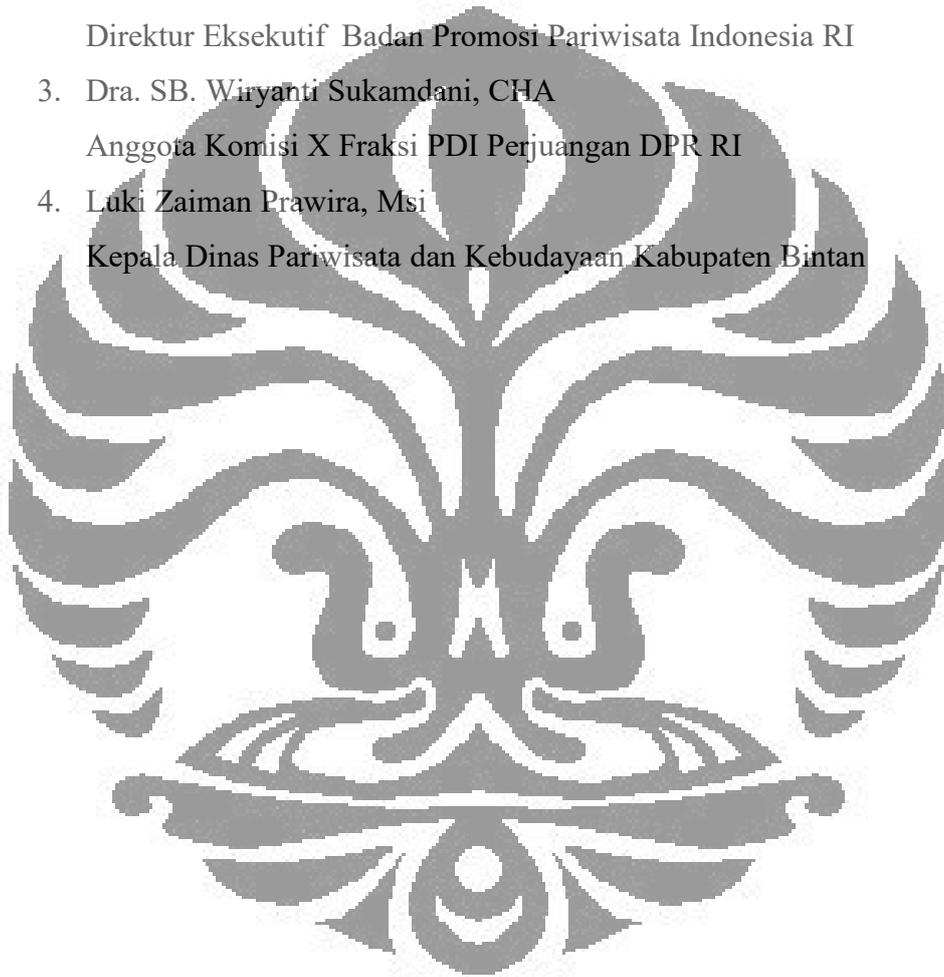
Peningkatan produk dan aktivitas wisata	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pengendalian pencemaran
Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Peningkatan biaya pemasaran
Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Peningkatan jaminan keamanan di destinasi wisata
Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Peningkatan tata ruang yang baik dan berkelanjutan
Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal wisatawan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Penyediaan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata
Penyusunan strategi pemasaran berbasis asal	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pengendalian pencemaran

Peningkatan jaminan keamanan di destinasi wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengendalian pencemaran
Peningkatan tata ruang yang baik dan berkelanjutan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penyediaan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata
Peningkatan tata ruang yang baik dan berkelanjutan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengendalian pencemaran
Penyediaan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengendalian pencemaran

Terima Kasih atas waktu yang diluangkan dan kerjasamanya!

Profil Responden

1. Dr. Sapta Nirwandar SE.Des
Honorary Advisor Kementerian Pariwisata RI
2. Drs. Fathul Bahri, Msi
Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Indonesia RI
3. Dra. SB. Wiryanti Sukamdani, CHA
Anggota Komisi X Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
4. Luki Zaiman Prawira, Msi
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan



Lampiran 3

Estimasi Data Panel dengan Stata

A. Estimasi Fungsi Penawaran Pariwisata Indonesia

1. OLS

Source	SS	df	MS	Number of obs = 169		
Model	21.9408531	5	4.38817062	Prob > F	=	0.0000
Residual	31.3628858	163	.192410343	R-squared	=	0.4116
-----				Adj R-squared	=	0.3936
Total	53.3037389	168	.31728416	Root MSE	=	.43865

(LOG) PDRBP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
(LOG) HB	.6987589	.2793179	2.50	0.013	.1472109	1.250307
(LOG) RB	-4.753868	.9630487	-4.94	0.000	-6.655528	-2.852208
(LOG) BEDB	4.041889	.9958557	4.06	0.000	2.075448	6.00833
OCRB	-.0069287	.0043439	-1.60	0.113	-.0155062	.0016488
(LOG) PHT	.7337857	.3124147	2.35	0.020	.1168839	1.350687
_cons	5.451953	.6067089	8.99	0.000	4.25393	6.649975

2. Fixed Effect Model

Fixed-effects (within) regression	Number of obs	=	169
Group variable: KODE	Number of groups	=	34
R-sq: within = 0.7304	Obs per group: min	=	4
between = 0.2954	avg	=	5.0
overall = 0.2913	max	=	5
	F(5,130)	=	70.43
corr(u _i , X _b) = 0.1071	Prob > F	=	0.0000

(LOG) PDRBP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
(LOG) HB	.1087041	.0436792	2.49	0.014	.0222901	.1951182
(LOG) RB	-.2174865	.0891278	-2.44	0.016	-.3938153	-.0411578
(LOG) BEDB	.0391421	.0797851	0.49	0.625	-.1187033	.1969874
OCRB	.001247	.0004223	2.95	0.004	.0004116	.0020825
(LOG) PHT	.6174447	.0550722	11.21	0.000	.508491	.7263985
_cons	5.302073	.1466872	36.15	0.000	5.011869	5.592276

```

sigma_u | .48189458
sigma_e | .02605672
rho | .99708481 (fraction of variance due to u_i)

```

F test that all u_i=0: F(33, 130) = 1395.85 Prob > F = 0.0000

3. Random Effect Model

```

Random-effects GLS regression           Number of obs   =       169
Group variable:  KODE                   Number of groups =        34
R-sq:  within = 0.7303                   Obs per group:  min =         4
        between = 0.2962                                     avg =         5.0
        overall  = 0.2921                                     max =         5
corr(u_i, X) = 0 (assumed)               Prob > chi2     =       0.0000

```

(LOG) PDRBP	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
(LOG) HB	.1138553	.0445669	2.55	0.011	.0265057 .2012048
(LOG) RB	-.2306492	.0908938	-2.54	0.011	-.4087977 -.0525007
(LOG) BEDB	.0463873	.0815466	0.57	0.569	-.1134411 .2062157
OCRE	.0012372	.0004316	2.87	0.004	.0003913 .002083
(LOG) PHT	.6234658	.0556134	11.21	0.000	.5144654 .7324661
_cons	5.287814	.1663171	31.79	0.000	4.961839 5.61379

```

sigma_u | .4343527
sigma_e | .02605672
rho | .99641413 (fraction of variance due to u_i)

```

4. Hasil Estimasi

Variable	cem3	fem3	rem3
(LOG) HB	.69875888*	.10870415*	.11385525*
(LOG) RB	-4.7538679***	-.21748653*	-.23064917*
(LOG) BEDB	4.0418886***	.03914206	.04638733

OCRB		- .00692871	.00124705**	.00123716**
(LOG) PHT		.73378567*	.61744474***	.62346578***
_cons		5.4519528***	5.3020726***	5.2878143***

N		169	169	169
r2		.4116194	.73037395	
r2_a		.39357092	.65156019	

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

5. Uji Hausman

	(b) FEM	(B) REM	(b-B) Difference	$\sqrt{\text{diag}(V_b - V_B)}$ S.E.
(LOG) HB	0.109	0.1138553	-0.0051511	0.0030944
(LOG) RB	-0.22	-0.2306492	0.0131626	0.0069121
(LOG) BEDE	0.039	0.0463873	-0.0072453	0.003187
OCRB	0.001	0.0012372	9.89E-06	0.0000179
(LOG) PHT	0.617	0.6234658	-0.006021	0.0087744

chi2 (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 12.55

Prob>chi2 = 0.028

B. Estimasi Fungsi Permintaan Pariwisata Indonesia

1. OLS

Source	SS	df	MS	Number of obs =	169
Model	21.9408531	5	4.38817062	Prob > F =	0.0000
Residual	31.3628858	163	.192410343	R-squared =	0.4116
-----				Adj R-squared =	0.3936
Total	53.3037389	168	.31728416	Root MSE =	.43865

(LOG) PDRBP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
(LOG) HB	.6987589	.2793179	2.50	0.013	.1472109 1.250307
(LOG) RB	-4.753868	.9630487	-4.94	0.000	-6.655528 -2.852208
(LOG) BEDB	4.041889	.9958557	4.06	0.000	2.075448 6.00833
OCRB	-.0069287	.0043439	-1.60	0.113	-.0155062 .0016488
(LOG) PHT	.7337857	.3124147	2.35	0.020	.1168839 1.350687
_cons	5.451953	.6067089	8.99	0.000	4.25393 6.649975

2. Fixed Effect Model

Fixed-effects (within) regression	Number of obs =	169
Group variable: KODE	Number of groups =	34
R-sq: within = 0.7304	Obs per group: min =	4
between = 0.2954	avg =	5.0
overall = 0.2913	max =	5
	F(5,130) =	70.43
corr(u_i, Xb) = 0.1071	Prob > F =	0.0000

(LOG) PDRBP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
(LOG) HB	.1087041	.0436792	2.49	0.014	.0222901 .1951182
(LOG) RB	-.2174865	.0891278	-2.44	0.016	-.3938153 -.0411578
(LOG) BEDB	.0391421	.0797851	0.49	0.625	-.1187033 .1969874
OCRB	.001247	.0004223	2.95	0.004	.0004116 .0020825
(LOG) PHT	.6174447	.0550722	11.21	0.000	.508491 .7263985
_cons	5.302073	.1466872	36.15	0.000	5.011869 5.592276

sigma_u	.48189458				
sigma_e	.02605672				
rho	.99708481	(fraction of variance due to u_i)			

5. Uji Hausman

	(b) FEM	(B) REM	(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
(LOG) HB	0.109	0.1138553	-0.0051511	0.0030944
(LOG) RB	-0.22	-0.2306492	0.0131626	0.0069121
(LOG) BEDB	0.039	0.0463873	-0.0072453	0.003187
OCRB	0.001	0.0012372	9.89E-06	0.0000179
(LOG) PHT	0.617	0.6234658	-0.006021	0.0087744
chi2 (b-B)' [(V_b-V_B)^(-1)] (b-B) = 12.55				
Prob>chi2 = 0.028				

